

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SISTEM
GANDA (PSG) TERHADAP OUTPUT SMKN 4
MADIUN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN**

SKRIPSI

Disusun oleh:

SARAS RAHMADANI

(0510313127)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

MALANG

2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan bangsa untuk saat ini. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang pintar cerdas dan dinamis. Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai salah satunya melalui penataan pendidikan yang baik. Secara hukum setiap individu di Indonesia berpeluang sama dalam hal mengenyam pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) pasal 28 C ayat (1) "bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

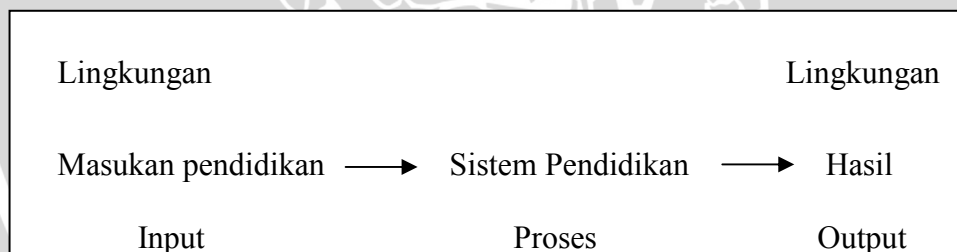
Secara konseptual, administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan suatu tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Suatu definisi administrasi publik yang agak komprehensif menurut Nigro dan Nigro (Zauhar, 2001 : 31) menyebutkan bahwa "administrasi publik mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan publik dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik". Hal ini jelas menggambarkan bahwa negara mempunyai peran penting untuk merumuskan suatu kebijakan dan melaksanakannya. Salah satu produk negara yang mengatur kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa:

"Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan".

Untuk mewujudkan itu, maka diperlukan peran administrasi publik yang tidak hanya diartikan sebagai kegiatan tata usaha, atau tulis menulis yang terdapat di tiap instansi, kantor dan lembaga pemerintah. Menurut Waldo (Soesilo Zauhar, 2001 : 31) mengungkapkan definisi administrasi publik sebagai : *“Public administration is the organization and management of men and materials to achieve the purpose of government”*. Administrasi publik tiada lain adalah pengelolaan sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan administrasi publik berfungsi untuk mengelola SDM yang terampil, cerdas dan professional di bidangnya untuk mewujudkan pembangunan nasional. Tentunya diperlukan juga pengelolaan sumber daya non manusia (seperti manajemen pembiayaan, profesionalisme guru, penyediaan sarana/prasarana) untuk mendukung program pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang menjamin relevansi mutu dengan kebutuhan masyarakat melalui kurikulum yang digambarkan melalui sistem pendidikan.

Pendidikan sebagai suatu sistem dapat dilihat dari bentuk model dasar input-output pada gambar :

Gambar 1:
Model Input-Output Pendidikan



Sumber: Sagala, 2007, hal.7.

Segala sesuatu yang masuk (input) dalam sistem dan berperan dalam proses pendidikan disebut masukan pendidikan. Lingkungan hidup dan masyarakat pengguna menjadi sumber masukan pendidikan. P.H.Coombs dan W.J. Platt (1968) mengemukakan tiga macam sumber masukan pendidikan yang terdiri atas (1) pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita dalam masyarakat, (2) penduduk dan persediaan layanan untuk belajar dan lulusan output berupa tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan juga tenaga ahli di berbagai bidang keahlian, dan (3) hasil produksi pendidikan dan penghasilan berupa outcome. Proses pendidikan

adalah suatu usaha mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu yang sistematis, baik struktural formal, maupun informal dan nonformal antara pendidik dengan peserta didik.

Pemerintah harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengenyam pendidikan disertai mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan pendidikan. Pemerintah memulai programnya dengan membangun sekolah di berbagai daerah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas disertai dengan program pembiayaannya melalui APBN maupun APBD. Pendidikan nasional juga dihadapkan pada beberapa masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan pendidikan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua. Untuk memenuhinya, kesiapan kualitas SDM makin ditingkatkan.

Sejak perekonomian Indonesia terpuruk pada tahun 1997, angka pengangguran di Indonesia tidak berkurang, justru setiap tahun selalu bertambah. Hal ini karena jumlah angkatan kerja yang lulus pada setiap tahunnya tidak bisa terserap habis di tahun tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional mencatat hingga Oktober 2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 11,1 juta orang. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama jumlah pengangguran, yaitu 3,9 juta orang. Urutan kedua disusul DKI Jakarta 2,8 juta orang dan ketiga ditempati Provinsi Jawa Timur 1,8 juta orang. Jumlah tersebut terdiri dari penganggur tetap berjumlah 10,80 juta atau 10,21 persen dan setengah penganggur (kadang kerja dan tidak kerja) sebanyak 29,64 juta atau 31,22 persen (redaksi tempointeraktif, 2006).

Tak terelakkan bahwa kualitas ketenagakerjaan Indonesia bisa dibilang agak menyedihkan. Daya saingnya di mata dunia, terbilang rendah. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Berdasarkan laporan pada Human Development Report 2005, ternyata Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia.

Bahkan yang lebih mencemaskan, peringkat tersebut justru sebenarnya semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 1997 HDI Indonesia berada pada peringkat 99, lalu menjadi peringkat 102 pada tahun 2002, dan kemudian merosot kembali menjadi peringkat 111 pada tahun 2004 Menurut IMD (2000), dalam hal daya saing, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 47 negara. Sedangkan, Singapura berada pada peringkat 2 dan Malaysia serta Thailand masing-masing pada urutan ke-25 dan ke-23 (Jurnal Jurist, edisi Desember 2006. Membangkitkan Ruh Pendidikan melalui Instrumen Hukum oleh Pan Mohamad Faiz).

Tentu saja fenomena ini membuat peluang para lulusan dalam negeri banyak tergeser oleh tenaga kerja dari negara lain. Padahal ini semua berasal dari masalah tingkat kompetensi tenaga kerja dalam negeri yang dinilai masih lemah. Menjelang era perdagangan bebas, ada tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja yang cukup produktif di mata internasional, ikut bersaing dengan negara lain. Atas fenomena ini, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat dikembangkan untuk meningkatkan angka siap kerja dan mencegah bertambahnya pengangguran. Jalurnya juga turut dipersiapkan melalui sistem pendidikan yang disesuaikan untuk mampu mengatasi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menjawab permasalahan ini, sepertinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu jalan keluar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), (www.wikipedia Indonesia.go.id). Pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia saat ini adalah pendidikan untuk menyiapkan dan mengembangkan kerja produktif dari peserta didiknya. Pada tataran mikro, indikator daya saing mutu pendidikan suatu negara secara kualitatif terletak pada prestasi belajar siswanya. Apa yang dicapai oleh para siswa di suatu negara menjadi acuan untuk mengukur prestasi pendidikannya. Dalam lingkup persekolahan, mutu dapat diukur dari tingkat prestasi siswa dalam penguasaan materi pelajaran (Jurnal Sosial, Pendidikan Mengangkat Martabat Bangsa, 35/th.VIII/September 2006).

Sekolah kejuruan masih menjadi sekolah 'kelas dua' setelah SMA. Padahal, salah satu peran sekolah kejuruan adalah mempersiapkan peserta didiknya untuk siap bekerja setelah mereka lulus yang didasarkan pada kegiatan latihan/praktek secara manual, dan sepenuhnya berhubungan dengan kegiatan perdagangan tertentu atau kesempatan penempatan tenaga kerja, oleh karenanya sangat membutuhkan partisipasi peserta didik. Pendidikan kejuruan seringkali mengarah pada pendidikan teknis, di mana peserta didik mengembangkan keahlian secara langsung dengan teknik tertentu atau menggunakan teknologi (Vocational Education journal 66, No.1

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu komponen yang patut dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan kejuruan dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan khusus (*specialized education*) karena kelompok pelajaran atau program yang disediakan hanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki minat khusus untuk mempersiapkan dirinya bagi lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Di sekolah kejuruan para peserta didik diberikan teori disertai praktek sesuai dengan mata pelajaran yang diambil agar mereka memiliki kecakapan (*skill*) setelah lulus nanti.

Pendidikan kejuruan tidak dapat diidentifikasi sebagai satu program unik yang mengkombinasikan berbagai keterampilan dan isi teknis dari berbagai macam disiplin dengan persyaratan-persyaratan mengenai dunia kerja supaya mampu mempersiapkan pemuda-pemudi mencapai keberhasilan teknis dan sosial di masyarakat yang akan dihadapi (Arikunto, 1988 : 244). Pendidikan kejuruan, walaupun bukan merupakan disiplin yang sifatnya unik, merupakan sesuatu yang programnya unik, hal ini tercermin dari banyaknya fasilitas yang dibutuhkan untuk program pengajarannya, kualifikasi pengajaran, tujuan subyek didiknya dan terakhir kurikulumnya. Di dalam daftar faktor keunikan sekolah kejuruan ini, tujuan subyek didik merupakan faktor terpenting dan menjadi dasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kurikulum, fasilitas dan sarana. Juga kualifikasi pengajar, berkembang sejalan dengan tuntutan yang lahir dari tujuan subyek didik. Filosofi yang memandang pendidikan kejuruan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas persiapan orang untuk bekerja, akan mempunyai dampak harus tersedianya diversifikasi jenis pendidikan yang fungsional. Namun

demikian, dasar tersebut akhirnya harus dikembalikan pada kebutuhan masyarakat lokal jika dikehendaki agar efektif, sehingga tujuan daripada sekolah kejuruan tersebut dapat tercapai.

Persoalan seputar pendanaan pendidikan sangatlah kompleks, karena bukan saja disebabkan keterbatasan alokasi anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi dana yang ada belum dapat dipergunakan sepenuhnya untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan yang diperoleh oleh sekolah, baik dari pemerintah atau orang tua siswa ternyata masih belum dapat memenuhi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Didukung oleh pernyataan Fangerlind, I dan Saha, L.J. dalam bukunya (Sagala, 2007 : 37) :

”Rendahnya biaya pendidikan yang disediakan negara pada negara berkembang menjadi alasan klasik rendahnya kemampuan pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi kebutuhan sekolah yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Hal inilah yang membedakan kualitas pendidikan pada negara berkembang dengan negara maju”.

Apabila sumber dana sekolah bertambah maka bertambah pula perolehan dana untuk pembiayaan pendidikan, dan akan berpengaruh pula terhadap peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

Selain perlunya peran pemerintah dalam hal *financial*, Sekolah Menengah Kejuruan juga melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dalam hal ini dunia usaha / pihak swasta yang sesuai dengan kurikulum sekolah masing-masing. Ini berarti, sekolah dan masyarakat bukan hanya terjalin hubungan interdependensi, bahkan terjalin integrasi antara program pendidikan sekolah dengan kehidupan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbarui sistem lama guna menunjang kegiatan belajar mengajar.

”Dunia usaha dalam hal ini posisinya sebagai sub sistem sekolah kejuruan mempunyai arti penting bagi siswa dan guru, yaitu sebagai lahan praktik nyata untuk memadukan mata Diklat yang telah dipelajari dan menyatukannya dengan seni bisnis melalui ilmu kewirausahaan dengan menganut wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan pasar dan wawasan ekonomi. Konsep berpikir inilah yang mendasari program pendidikan kejuruan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang

berkualitas untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang ada” (Hamalik, 1990 : 111).

Kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan dan dunia usaha/industri melalui kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) didasarkan atas arahan GBHN 1993 dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan pendukungnya. PSG merupakan sistem kerjasama yang dilandasi oleh kesadaran dan kepedulian dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia yang produktif, saling menguntungkan, kesepakatan, dan adanya tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan PSG. Kerjasama antara sekolah dan dunia usaha diusahakan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga sekolah lebih baik secara langsung ataupun tidak langsung didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Sesungguhnya, implementasi kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Indonesia telah berjalan sejak tahun 1993/1994 hingga sekarang. Dengan PSG, perancangan kurikulum, proses pembelajaran, dan penyelenggaraan evaluasinya didesain dan dilaksanakan bersama-sama antara pihak sekolah dan dunia usaha/industri. Diharapkan nantinya para lulusan SMK akan menjadi para lulusan yang siap kerja.

”Melalui PSG, siswa belajar di dua tempat, yaitu sekolah dan industri. Di sekolah, para siswa belajar teori dari para guru atau instruktur yang kegiatannya pada umumnya dibiayai pemerintah. Sedangkan kegiatan belajar yang diselenggarakan di perusahaan/industri, artinya para siswa ini belajar dan mendapatkan pelatihan praktik dari para instruktur dari yang bersangkutan. Pembiayaannya dilakukan oleh perusahaan terkait. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa sekolah melakukan semacam *outsourcing* yang dikerjakan oleh industri dalam bentuk penyediaan alat, instruktur, dan pengalaman praktik di lapangan. Sedangkan industri melihat sekolah sebagai bagian dari Human Resources Development (HRD) atau sumber daya manusia perusahaannya yang mencetak tenaga ahli yang handal dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan” (Andini, 2008: 5-6).

Madiun sebagai kota perdagangan dan perindustrian tentunya terdapat banyak dunia usaha/industri yang membutuhkan SDM yang terampil, cakap dan ahli dalam bidangnya. Selain itu, pola perkembangan dan pembinaan pendidikan di

kota Madiun harus mampu memberdayakan segenap potensi dan sumber daya penduduk yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. SDM tersebut salah satunya diperoleh dari output yang ada di beberapa SMK yang sudah menerapkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di kota Madiun. Diharapkan sekali dengan diterapkannya PSG di lingkungan SMK di kota Madiun ini akan memberikan kontribusi positif bagi dunia usaha/industri dalam memberdayakan SDM yang siap bekerja dan mampu bersaing tingkat global maupun internasional.

SMKN 4 Madiun adalah sekolah kejuruan negeri yang sudah menerapkan Pendidikan Sistem Ganda dan sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung bagi para siswanya untuk memadukan antara teori yang diterima dan prakteknya. SMKN 4 Madiun mempunyai 4 program keahlian yaitu Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan Rambut dan Akomodasi Perhotelan. Dunia usaha/industri yang ada di SMK 4 Madiun telah memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan dunia pendidikan saat ini, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar. Misalnya saja jurusan Tata Boga telah mengadakan kerja sama dengan *catering* Sono Kembang di kota Malang untuk menempatkan siswa-siswinya sehubungan dengan kegiatan praktek kerja industri yang merupakan implementasi dari PSG tadi. Kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan yang sampai sekarang dirasa masih jalan di tempat dan juga mampu mencetak para lulusan yang mempunyai daya saing tinggi.

Pada proses implementasi, permasalahan kebijakan seringkali muncul. Keterkaitan antara kurikulum pendidikan kejuruan dan pekerjaan sangat erat. Kendatipun demikian terdapat beberapa masalah (Hamalik, 1990 : 87). Masalah yang muncul dari kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun diantaranya adalah ketidaksiapan peserta didik untuk mengikuti proses pendidikan dari awal sampai akhir. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi dan budaya dari peserta didik. Selain itu kurangnya fasilitas yang disediakan sekolah untuk mendukung peserta didiknya melaksanakan praktek di sekolah juga mempengaruhi mengapa implementasi PSG belum bisa maksimal. Masalah lain yang muncul adalah jarak ataupun lokasi dari dunia usaha/industri yang bersangkutan. Semakin jauh lokasi, maka pengawasan dari para guru pembimbing

juga tidak bisa optimal terhadap peserta didik yang melaksanakan praktek kerja industri di luar kota. Dari semua faktor penghambat tersebut kebijakan anggaran pendidikan merupakan salah satu bagian yang penting untuk mendukung implementasi PSG pada Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh Indonesia.

Setiap tahunnya, masing-masing jurusan tidak sama dalam memasarkan outputnya, bisa jadi tergantung dari kualitas output yang ada di SMKN 4 Madiun dan permintaan dunia usaha/industri yang bersangkutan. Berdasarkan data jumlah lulusan yang diperoleh pada tahun pelajaran 2007/2008, dari 229 anak, jurusan yang paling banyak terserap tenaga kerja adalah Tata Busana sebanyak 51 anak, sedang yang paling sedikit ialah jurusan Tata Kecantikan Rambut sebanyak 15 anak. Jumlah anak yang sudah terserap tenaga kerja keseluruhan adalah 106 anak, masa tunggu/lain-lain 100 anak, sedang yang lain studi lanjut sebanyak 23 anak.

Hal ini menjadi dilema bagi pihak sekolah untuk mengambil langkah, di satu sisi sekolah diharapkan dapat mencetak SDM yang siap kerja melalui implementasi dari PSG, tetapi di sisi lain sekolah juga belum mampu menyediakan fasilitas yang sesuai standart industri dikarenakan minimnya anggaran dari pemerintah. Di samping itu kesiapan peserta didik dalam menerima pendidikan di sekolah kejuruan juga belum maksimal, dikarenakan minat mereka pada awal masuk SMK yang dijadikan pilihan alternatif ketika mereka gagal masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA), selain itu kondisi ekonomi, sosial, budaya keluarga juga turut mempengaruhi. Hal tersebut merupakan faktor yang membuat tidak optimalnya kebijakan PSG itu sendiri bagi para siswa dan tentu saja hal ini sangat beresiko terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mutu lulusan SMKN 4 Madiun.

Berkenaan dengan hal tersebut guna mewujudkan kerjasama antara sekolah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tersebut yang dituangkan dalam tulisan berjudul **"Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap Output SMKN 4 Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun?
2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulisan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa perumusan masalah di atas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengaruh Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap kualitas output SMKN 4 Madiun.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa faktor yang menghambat implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari adanya penelitian tentang pola kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini, dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan kualitas pendidikan.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi dunia pendidikan khususnya sekolah kejuruan dalam membuat kebijakan terkait dengan implementasi Pendidikan Sistem Ganda.

3. Bagi Peneliti sendiri
Sebagai sarana atau wahana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.
4. Bagi Peneliti lain
Dapat menjadi bahan-bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti terdahulu dan menjadi referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik atau judul yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, diantaranya :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian termasuk di dalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menampilkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang akan dihubungkan dengan teori yang mendukung.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berbagai saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait yang merupakan penutup dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Hakekat Kebijakan Publik

Terdapat perbedaan sifat antara istilah kebijaksanaan dan kebijakan, namun di Indonesia istilah *Public Policy* masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Banyak yang mengartikan sama antara kebijakan dan kebijaksanaan. Hal tersebut bukan suatu masalah jika sudah dimengerti dengan baik maksud dan tujuannya. Dalam penulisan skripsi ini tidak mempermasalahkan perbedaan istilah antara kebijakan dan kebijaksanaan karena kedua istilah tersebut telah dimengerti maksud dan tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam bukunya, Wahab (2005:4) mengungkapkan beberapa definisi kebijakan publik antara lain :

- 1) Kebijaksanaan negara itu adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah (Thomas R. Dye, 1978).
- 2) Kebijaksanaan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (W.I. Jenkins, 1978:15).
- 3) Kebijaksanaan negara sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Chief J.O. Udoji, 1981).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam bukunya, Wahab (2005 : 64-65) mengungkapkan beberapa konsep implementasi seperti disebutkan Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa : "*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk

melaksanakan sesuatu ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Jika pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai *”those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi terhadap suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam buku Wayne Parsons (2006 : 467), Lewis A.Gunn mengajukan sepuluh kondisi (atau *commandments*) yang bisa dikatakan dapat menjadi dasar kerangka pertanyaan yang bisa diajukan kepada sebuah program:

1. *Situasi di luar agen implementasi tidak menimbulkan perbatasan yang melumpuhkan;*
2. *Waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia untuk program;*
3. *Tidak ada batasan dalam sumber daya secara keseluruhan, dan juga setiap tahap dalam proses implementasi membutuhkan kombinasi sumber-sumber daya yang tersedia;*
4. *Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid;*
5. *Hubungan antara sebab dan akibat adalah bersifat langsung dan hanya ada sedikit, jika ada, hubungan yang mengganggu;*

6. *Ada satu agen dalam implementasi yang tidak tergantung pada agen lain agar bisa sukses. Jika agen lain harus dilibatkan, hubungan ketergantungan itu minimal dalam hal jumlah dan arti pentingnya;*
7. *Ada pemahaman penuh dan kesepakatan mengenai tujuan yang hendak diraih dan kondisi itu harus ada di seluruh proses implementasi;*
8. *Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan, secara rinci dan komplet, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap partisipan;*
9. *Ada komunikasi dan koordinasi sempurna diantara beragam elemen atau agen yang terlibat dalam program;*
10. *Pihak yang berkuasa dapat meminta dan menuntut ketaatan yang sempurna.*

Kebanyakan dari kita sering beranggapan bahwa jika pemerintah membuat suatu kebijakan di bidang tertentu, maka kebijakan tersebut dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Didukung oleh pernyataan Smith (1973) dan Grindle (1980) dalam (Wahab, 2008 : 218-219) yang berpendapat bahwa persoalan implementasi di Negara-negara Dunia Ketiga justru merupakan batu sandungan terberat lagi serius bagi efektivitas kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi

Pemerintah boleh saja mempunyai sejumlah kebijakan dan beberapa tujuan pembangunannya yang layak diacungi jempol, sayangnya dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk program-program dalam implementasinya terdapat sandungan yang sangat berat : banyak diantara kebijakan-kebijakan itu tetap saja berupa pernyataan simbolis dari pemimpin-pemimpin politik atau berupa undang-undang seperti yang tertulis di kitab perundang-undangan, sementara kebijakan lainnya yang telah dilaksanakan ternyata hasilnya tidaklah seperti yang semula diharapkan. Ada sejumlah alasan mengapa kebijakan-kebijakan itu tidak dilaksanakan atau jika toh dilaksanakan ternyata hasilnya tidaklah efektif. Langkanya sumber-sumber, kebijakan yang dirumuskan secara asal-asalan, dan perlawanan dari kelompok sasaran boleh jadi merupakan penyebab dari semua itu.

Sependapat dengan pernyataan dan Grindle, konsepsi sosiolog Myrdal (1970) dalam (Wahab, 2008 : 220) tentang *soft state* (negara lembek)

kiranya bermanfaat guna menjelaskan permasalahan pada Negara Dunia Ketiga di atas. Konsep itu secara telak menegaskan bahwa ketiadaan kemampuan pemerintah Dunia Ketiga adalah dalam membuat rencana, membuat dan melaksanakan kebijakan publik, serta program-program pembangunan yang efektif.

3. Fungsi Implementasi Kebijakan

Dalam bukunya, Wahab (2008 : 185) mengungkapkan secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah). Sebab itu fungsi implementasi mencakup juga apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian atau penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

B. Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

1. Hakekat Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara **sistematis** dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Pelaksanaan Pendidikan Sistem ganda (PSG) pada sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan didasarkan atas arahan GBHN 1993 dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan pendukungnya, antara lain :

- a. Untuk menyiapkan siswa SMK menjadi tenaga kerja, pada SMK dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional (pasal 29 ayat2) PP 29 Tahun 1990.

- b. Untuk memperoleh sumber pembiayaan, SMK dapat bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja dan para dermawan (Kepmen Dikbud nomor 0490/U/1992, pasal 44).
- c. Setiap SMK mengusahakan penyelenggaraan Unit Produksi (Kepmen Dikbud Nomor 0490/U/1992, pasal 29).

Perbedaan yang mendasar PSG bila dibandingkan dengan model pendidikan konvensional, bahwa pada PSG terdapat tanggung jawab bersama (*dual responsibilities*) antara pemerintah dan masyarakat tenaga kerja (khususnya dunia usaha/industri) mulai dari penyusunan program pendidikan, penerimaan siswa, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar (baik di sekolah maupun di dunia kerja), sampai pada tahap penilaian dan pemasaran tamatan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pelaksanaan pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pencapaian penguasaan kompetensi, kemampuan mengerjakan pekerjaan keahlian profesional, sesuai dengan persyaratan lapangan kerja.

PSG bukan semata-mata praktik kerja siswa di dunia usaha/industri, tetapi menyangkut keseluruhan aspek pendidikan di SMK. Pendidikan Sistem Ganda (PSG), dipilih karena model yang ideal untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Pemilihan pola ini karena PSG merupakan kerjasama dunia usaha/industri dengan SMK yang bertujuan untuk menciptakan tenaga terampil yang siap menggunakan teknologi maju yang digunakan dunia kerja.

Beberapa model pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996 : 14) antara lain :

Gambar 2
Model Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda

Model 1 : Pembekalan kemampuan produktif di dunia usaha/industri dilaksanakan mulai tahun ketiga, sedang kemampuan dasar kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah.

I	II	III
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(3c)
(3a)	(3a)	
(3b)	(3b)	

Model 2 : Pembekalan kemampuan produktif di dunia usaha/industri dilaksanakan mulai tahun ketiga, tapi dunia usaha/industri sudah terlibat sejak tahun kedua untuk menangani kemampuan dasar kejuruan.

I	II	III
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(3c)
(3a)	(3a)	
(3b)	(3b)	

Model 3 : Keterlibatan dunia usaha/industri dimulai sejak tahun pertama, yaitu untuk menangani kemampuan dasar kejuruan, sedang kemampuan produktif sepenuhnya diberikan pada tahun ketiga di dunia usaha/industri.

I	II	III
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(3c)
(3a)	(3a)	
(3b)	(3b)	

Model 4 : Pembekalan kemampuan produktif sepenuhnya dilaksanakan di dunia usaha/industri pada tahun keempat, setelah kemampuan-kemampuan lainnya diberikan di sekolah.

I	II	III	IV
(1)	(1)	(1)	(3c)
(2)	(2)	(2)	
(3a)	(3a)	(3a)	
(3b)	(3b)	(3b)	

Keterangan :  Sekolah  Dunia Usaha/industri

- (1) Kemampuan Normatif (pembentukan watak)
- (2) Kemampuan Adaptif (bekal pengembangan diri)
- (3a) Teori Kejuruan
- (3b) Praktik Dasar Kejuruan
- (3c) Praktik keahlian Produktif

Catatan :

- Program pendidikan komponen 1,2,3 (3a,3b,3c) pada dasarnya merupakan program bersama antara SMK dan institusi pasangannya. Dalam Pendidikan Sistem Ganda, isi program ketiga komponen tersebut dibahas dan disepakati bersama termasuk cara penyelenggaraan, bagian mana yang diselenggarakan di sekolah dan bagian mana yang diselenggarakan di industri/perusahaan.
- Program pendidikan subkomponen (3a) dan (3b), harus betul-betul diperkuat pada tahun I dan tahun II, agar pada tahun III siswa benar-benar siap untuk memasuki kegiatan produksi/bekerja langsung di industri/perusahaan.
- Program pendidikan subkomponen (3c) dalam bentuk bekerja langsung pada lini produksi, pada dasarnya dilaksanakan sepenuhnya di institusi pasangannya sesuai dengan jumlah waktu yang ditetapkan untuk menguasai keahlian produktif. Apabila industri/perusahaan yang menjadi pasangan hanya siap menerima siswa untuk sebagian waktu yang dipersyaratkan, maka sisa sebagian waktu yang lainnya harus

digunakan untuk praktek kerja di industri/perusahaan lain setidaknya dalam unit produksi di sekolah.

- Industri/perusahaan yang memiliki fasilitas pelatihan (*in-plant training*) dapat terlibat menangani program pendidikan komponen (3b), misalnya pada tahun II (model 2) atau mulai tahun I dan tahun II (model 3).
- Model 4, hanya berlaku pada SMK yang menyelenggarakan program pendidikan 4 tahun (STM Pembangunan dan SMPS).

2. Komponen Pendidikan Sistem Ganda

Karakteristik Pendidikan Sistem Ganda sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan, didukung oleh beberapa faktor yang menjadi komponen-komponennya, yaitu Institusi Pasangan, Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama, Kelembagaan Kerjasama, Nilai Tambah dan Jaminan Keberlangsungan. Ada beberapa komponen Pendidikan Sistem Ganda, lihat (Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996 : 8)

a) Institusi Pasangan

Pendidikan Sistem Ganda hanya mungkin dilaksanakan apabila terdapat kerjasama dan kesepakatan antara institusi pendidikan pelatihan kejuruan (dalam hal ini SMK) dan institusi lain (industri/perusahaan/instansi lain yang terkait dengan lapangan kerja) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan, untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan. Institusi lain yang mengikatkan diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan itu disebut Institusi Pasangan.

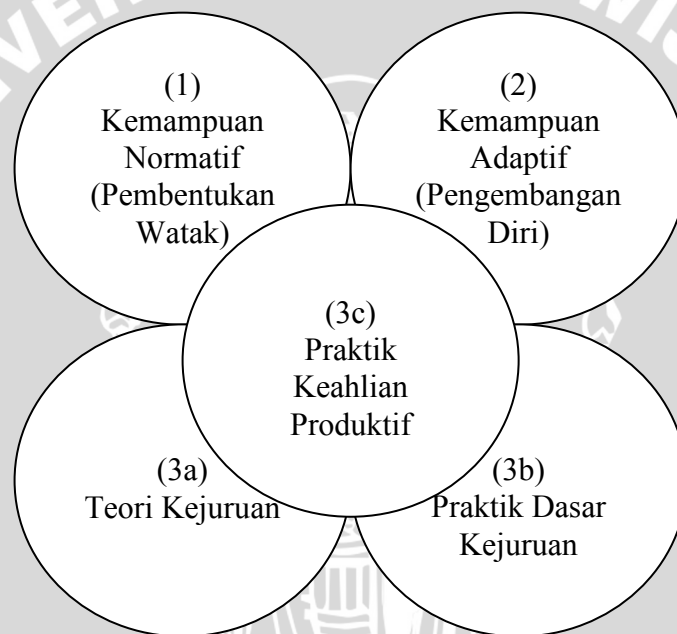
b) Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama

Program atau kurikulum lembaga pendidikan-pelatihan (khususnya SMK) yang saat ini berlaku, dikembangkan dan disusun dengan mengacu pada UU Nomor 2 tahun 1989 disempurnakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu disamping untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, juga lebih mengutamakan penyiapan lulusan agar dapat memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. Agar kurikulum tersebut menjadi program bersama, perlu dilakukan penyesuaian atau sinkronisasi antara materi yang tertuang dalam kurikulum dengan bidang pekerjaan yang tersedia

Diagram yang menggambarkan komponen-komponen program pendidikan dan pelatihan pada SMK meliputi :

Gambar 3
Diagram Komponen Program Pendidikan dan Pelatihan pada SMK



Sumber : Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, (1996 : 11).

Gambar 3 menjelaskan tentang berbagai kegiatan dari pihak sekolah dan dunia usaha/industri kepada para peserta didiknya yang terdapat dalam model pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda hal.14 yang dikelompokkan dari tahun pertama, kedua dan ketiga.

c) Kelembagaan Kerjasama

Pendidikan Sistem Ganda pada dasarnya merupakan program kerjasama antara sekolah dan institusi pasangannya (dunia usaha/industri). Dengan keputusan bersama Mendikbud dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Institusi Indonesia nomor 0267a/U/1994 dan

nomor 84/KU/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994, kebersamaan tersebut diatur dalam organisasi tingkat pusat disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, tingkat wilayah disebut Majelis Kejuruan Propinsi, dan tingkat Sekolah disebut Majelis Sekolah.

d) Nilai Tambah dan Insentif

Kerjasama antara SMK dan dunia usaha/industri khususnya dalam implementasi Pendidikan Sistem Ganda, dikembangkan dengan prinsip saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi untuk keuntungan bersama. Berdasarkan prinsip ini, implementasi Pendidikan Sistem Ganda akan memberi nilai tambah bagi pihak-pihak yang bekerjasama.

3. Tujuan PSG

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bertujuan untuk (Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996 : 7-8) :

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat penegetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja;
2. Meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan-pelatihan kejuruan/SMK dan dunia kerja;
3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional;
4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

C. Sekolah Menengah Kejuruan

1. Pengertian Sekolah

Pengertian sekolah memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Beberapa batasaan definisi tentang sekolah menurut para ahli dalam Sagala (2007 : 70) disajikan sebagai berikut :

- a. Sekolah tidak boleh diartikan hanya sebuah ruangan atau gedung saja, tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Tetapi sekolah sebagai institusi yang perannya jauh lebih luas daripada itu. Kemudian sekolah sebagai lembaga pendidikan terikat akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai (Nawawi, 1982).
- b. *"School as institution is the specific set essential function is serves in our society"*. Sekolah didefinisikan sebagai institusi yang spesifik dari seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat (Postman dan Weingartner, 1973).
- c. Sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat. Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan (Reimer 1987 : 25).
- d. Sekolah merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan. Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan oleh orang-orang yang profesional. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan kepada pembangunan bangsa (Nanang Fattah, 2003 : 1).
- e. Sekolah adalah suatu sistem organisasi, dimana terdapat sejumlah orang yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan sekolah, yang dikenal sebagai tujuan instruksional.(Gorton, 1976 : 84).

2. Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan

Masyarakat (*community*) menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku bangsa, atau bangsa. Apabila anggota kelompok-kelompok tadi, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa, sehingga

merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat. Rohmadi (1992:13) dalam Sagala (2007 : 233) membedakan kelompok masyarakat menjadi dua bagian, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah masyarakat atau warga yang menjadi bagian dari unit usaha, badan, sekolah atau instansi itu sendiri, sedangkan publik eksternal adalah orang luar atau publik umum atau masyarakat atau warga yaitu usaha atau sekolah tersebut berada.

UNESCO memberikan definisi yang berbeda mengenai masyarakat pendidikan yang meliputi pendukung material maupun non material, hal ini berarti ada keterlibatan khusus pada beberapa bagian dimaksud individual; kelompok masyarakat/LSM, perkumpulan pemuda, perkumpulan wanita, perserikatan dagang; organisasi kemanusiaan; lembaga keagamaan; perusahaan dan koperasi; pusat-pusat kebudayaan : musik, teater, seni, olahraga, asosiasi olahraga; perkumpulan masyarakat lokal/LSM.

Dalam konteks sekolah, masyarakat sekolah adalah warga atau individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. Masyarakat pendidikan adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap program pendidikan, sehingga lazim muncul pernyataan tentang *stake-holder* atau pihak yang berkepentingan yang berkenan untuk melakukan tugas tersebut. Kerangka berpikir pemberdayaan masyarakat pendidikan diantaranya melibatkan masyarakat dalam menggali sumber dana pendidikan dan pengembangan sumber daya manusianya. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan prinsip UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8-9 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat tanpa membedakan satu dengan lainnya. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan terungkap dengan ide-ide atau abntuan yang diwujudkan melauai dana dan tenaga. Masyarakat akan menjadi tumpuan atas

peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Jika sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dibantu oleh masyarakat, terpenuhi sesuai kebutuhan untuk digunakan peserta didik, dengan penyediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan penyediaan fasilitas belajar yang demikian baik, maka peserta didik akan mampu menyerap model pengajaran yang disampaikan oleh gurunya sebagai pendidik dan pengajar profesional.

Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya, bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah oleh suatu lingkungan masyarakat tertentu pula. Sekolah berperan dalam melestarikan dan memindahkan nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama yang dianut oleh para guru dan peserta didiknya kepada generasi penerusnya untuk menjamin kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial dengan menjadi pelaku aktif dalam perbaikan masyarakat. Sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, bahkan sekolah tumbuh dan berkembang sesuai harapan masyarakat. Dalam perjalanan pertumbuhan kelembagaan, sekolah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga kerjasama yang harmonis antara keduanya merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk kesinambungan program keduanya. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingannya bagi satuan pendidikan.

Di lain pihak ada sekolah menempatkan masyarakat hanya sasaran yang strategis bagi lembaga mengambil keuntungan finansial, sehingga masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan lembaga menjadi kecewa. Ketika kasus tersebut terjadi, dengan sendirinya masyarakat akan enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut, sebab peluang yang diberikan oleh masyarakat hanya dijadikan untuk kesempatan mengambil keuntungan bagi para pengelola sekolah

tersebut dan untuk kepentingan tertentu pula. Faisal (1981:179) dalam Sagala (2007 : 235) memberikan referensinya tentang pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat yang dibedakan melalui :

”(1) mencerdaskan kehidupan masyarakat; (2) membawa virus pembaharuan bagi perkembangan masyarakat; (3) melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali dengan kepentingan kerja di lingkungan masyarakat; (4) melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat”.

Sejalan dengan itu Azra dalam Sagala (2007:235) lebih rinci mengemukakan kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan., yakni :

”(1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan; (2) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kualitas (quality oriented); dan (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan dana pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat dalam merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan integritas masyarakatnya”.

3. Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai berikut : ”pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.” Lebih spesifik dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menyebutkan target Pendidikan Menengah yaitu : ”pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.” Karena itu pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja. Jika pada awal kemerdekaan hingga pelaksanaan Pelita I problem utamanya adalah pengadaan infrastruktur dan fasilitas, kemudian beranjak pada persoalan mutu dan belakangan berfokus pada bagaimana mengubah dari pendekatan ”*supply driven*” (paradigma apa yang dapat dihasilkan) menjadi ”*demand driven*” (apa yang diperlukan pasar) kemudian *link and match* (keterkaitan antara Sekolah Kejuruan dan Industri) sehingga

Pendidikan Sistem Ganda (dalam Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006 : 14).

4. Karakteristik Pendidikan Kejuruan

Salah satu sub-sistem dalam Sistem Pendidikan Nasional kita adalah Pendidikan Kejuruan. Menurut Wardiman 1998 (dalam Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006:13) karakteristik pendidikan kejuruan mempunyai ciri-ciri :

1. *Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja.*
2. *Pendidikan kejuruan didasarkan atas "demand driven" (kebutuhan dunia kerja).*
3. *Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja.*
4. *Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada "hands-on" atau performa dalam dunia kerja.*
5. *Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan.*
6. *Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi.*
7. *Pendidikan kejuruan harus ditekankan pada "learning by doing" dan "hands-on experience".*
8. *Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek.*
9. *Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum.*

5. Tujuan Pendidikan Kejuruan

Lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, tujuan penyelenggaraan SMK adalah bahwa "Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional." Jika merujuk pada surat Keputusan Mendikbud No. 04907/U/1990, tujuan pendidikan SMK dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih dan / atau meluaskan pendidikan dasar.*

- b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar.
- c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi dan kesenian.
- d. Menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional.

6. Prosedur Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Kejuruan

Sikap-sikap dan pengambilan keputusan mengenai konsep dan rekomendasi, menyediakan landasan pengorganisasian kurikulum untuk pendidikan kejuruan. Secara umum dikenal bahwa pengorganisasian kurikulum bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini dibutuhkan pengertian yang mendalam tentang teori belajar, proses dan prosedur pendidikan maupun teori-teori lain tentang kurikulum, yang kadang-kadang berada di luar jangkauan para guru. Sampai saat ini sudah banyak guru yang diikutsertakan dalam pengorganisasian kurikulum. Sudah cukup banyak upaya dilakukan dalam hal pendidikan kejuruan untuk memahami pengorganisasian kurikulum, lebih banyak dibandingkan dengan upaya lain untuk pengembangan kurikulum dalam pelaksanaan program pengajaran.

Langkah permulaan dalam Disain Sistem Instruksional yang istilah aslinya Instructional System Design (ISD), prosesnya nampak dengan jelas. Jika kita ingin menyiapkan seseorang memasuki dunia kerja dengan sukses, kita harus mengetahui persyaratan untuk pekerja yang sukses di pekerjaan.

Adapun langkah-langkah yang dilalui dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut, seperti yang dikutip Arikunto (1988 : 252-253) :

- 1) *Mengadakan analisis jabatan, yaitu mengadakan identifikasi terhadap tugas-tugas yang harus mampu ditangani oleh setiap pekerja yang bekerja di lapangan itu;*
- 2) *Menentukan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengemban tugas yang akan dikerjakan;*
- 3) *Mengadakan pemilihan terhadap materi yang menunjang pencapaian kemampuan sesuai dengan tugas yang diketahui dari analisis jabatan, dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dengan program;*

- 4) *Merumuskan tujuan pengajaran secara spesifik menurut kawasan kognitif, efektif dan psikomotorik;*
- 5) *Mengadakan identifikasi mengenai strategi instruksional yang akan diikuti. Strategi ini penting agar dapat diyakini pendekatan mana yang akan diambil sesuai dengan materi pelajaran, keterampilan yang akan dilahirkan, pengalaman yang telah dimiliki subyek didik, dan rencana alur subyek didik dalam perolehan pemilikan seluruh kemampuan yang diinginkan;*
- 6) *Menentukan urutan pembagian tugas untuk setiap garis besar pengajaran dengan landasan pada strategi mengajar yang telah ditentukan pada langkah kelima di atas;*
- 7) *Mengadakan pengelompokan terhadap tugas-tugas sesudah ditentukan strategi instruksional, direncanakan sedemikian rupa sehingga menunjukkan bagaimana pengelolaan subyek didiknya dalam bentuk kelompok kecil maupun kelompok besar untuk pelaksanaan praktek dan menggunakan peralatan yang tersedia;*
- 8) *Mengadakan pemilihan terhadap teknik-teknik instruksional terhadap analisis jabatan atau pekerjaan dengan uraian yang berbentuk tugas-tugas seperti yang tertera pada langkah ke-7. Langkah ini juga disebut sebagai pengorganisasian lingkup materi instruksional, disesuaikan dengan penggalan waktu yang disediakan untuk mencapai tujuan, yaitu mengerjakan tugas-tugas;*
- 9) *Langkah terakhir dari pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan adalah merencanakan penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian formatif merupakan bagian dari setiap demonstrasi pelaksanaan pengajaran. Penilaian sub-sumatif dilaksanakan setelah sekelompok program pengajaran dilaksanakan, atau setelah satu blok pengajaran diselesaikan. Sedangkan penilaian sumatif akan didasarkan penilaian formatif (dalam arti tidak menyimpang).*

7. Masalah yang Dihadapi

Menurut Hamalik (1990 : 87) keterkaitan antara kurikulum pendidikan kejuruan dan pekerjaan sangat erat. Kendatipun demikian terdapat beberapa masalah antara lain :

1. *Ketersediaan data tentang jenis dan jenjang pekerjaan dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Berdasarkan jenis pekerjaan tersebut dapat dianalisis tugas-tugas pokok dan kemampuan-kemampuan generik yang dituntut bagi masing-masing tenaga kerja. Ini berarti pula dilaksanakan gambaran yang lengkap macam-macam pekerjaan yang ada sekarang dan estimasi untuk masa mendatang.*
2. *Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan yang senantiasa menjamin relevansi, mutu dan efisiensi, pada gilirannya dibutuhkan tenaga pengembang kurikulum yang profesional dan pakar-pakar kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan*

kebutuhan/tuntutan kurikulum yang berorientasi pada pekerjaan, yang relatif terus berubah dan berkembang.

- 3. Di sisi lain, kurikulum hendaknya berusaha memberikan pelayanan dalam rangka pengembangan karier dan kurikulum yang terpadu dengan sub sistem pendidikan luar sekolah yang ruang lingkup gagasannya sangat luas. Oleh karena itu perubahan terus tak henti-hentinya, sehingga upaya inovasi pendidikan kejuruan terkena dampaknya, yang pada gilirannya menuntut terjadinya perubahan dan perbaikan kurikulum. Ini berarti masalah administrasi dan evaluasi kurikulum perlu memberikan andil yang sebanyak-banyaknya.*

8. Output

Menurut kamus Ilmiah Populer (Partanto dan Al Barry), output adalah hasil dan/atau keluaran. Output yang ada kaitannya dengan fungsi input dan proses pendidikan menurut Schultz (1963) dalam (Sagala, 2007:214) dapat diilustrasikan sebagai keterampilan dasar, keterampilan pekerjaan, kreativitas, bakat dan output lainnya. Output pendidikan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu konsumsi dan *investment*. Konsumsi berhubungan dengan kesenangan, kegembiraan yang didapatkan peserta didik. Sedangkan *investment* berhubungan dengan peningkatan keterampilan, produktivitas individu dan masyarakat, dan hari depan manusia yang lebih baik. Apabila dihubungkan dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), maka yang dimaksud output di sini adalah semua lulusan SMKN 4 Madiun yang telah memiliki keterampilan, kreativitas ataupun etos kerja yang merupakan hasil dari kebijakan PSG tersebut. Pendidikan yang lebih tinggi menurut Becker (1993) akan menimbulkan produktivitas yang lebih tinggi pula. Asumsi ini salah satu aspek penting dalam pengembangan SDM melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja. Walaupun perbedaan tingkat pendapatan tidak berhenti pada tingkat pendidikan saja tetapi juga harus didukung oleh pengalaman kerja, skills, sektor usaha, jenis usaha, lokasi dan lain sebagainya. Peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai pengaruh PSG terhadap output yang bisa dianalisis dari banyaknya jumlah lulusan yang berhasil terserap dunia kerja dan tidak. Dengan begitu hal ini menjadi

indikator keberhasilan implementasi PSG dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia.

D. PENDIDIKAN

1. Pengertian

Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Menurut Webster's New World Dictionary (1962) pendidikan adalah "proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya lewat persekolahan formal". Pemahaman mengenai pendidikan mengacu pada konsep tersebut menggambarkan bahwa pendidikan memiliki sifat dan sasarannya yaitu manusia. Manusia itu sendiri mengandung banyak aspek dan sifatnya yang sangat kompleks. Karena itu tidak ada suatu batasan yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan pendidikan yang dibuat para ahli tampak begitu beraneka ragam, dan kandungannya berbeda satu sama lain. Pendidikan adalah suatu upaya/perbuatan sudah berlangsung sejak dahulu dan sudah tidak diragukan lagi eksistensinya. Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia lahir di muka bumi ini dalam bentuk pemberian warisan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari para orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan dan masa depannya.

Gambaran pendidikan dilihat dari teori secara faktual adalah aktivitas secara kelompok orang dan guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan untuk orang-orang muda dan secara perspektif memberikan petunjuk bahwa pendidikan adalah muatan, arahan, pilihan yang telah ditetapkan sebagai wahana pengembangan masa depan anak didik yang tidak terlepas dari keharusan kontrol manusia (Sagala, 2007 : 1-2).

2. Perlunya Standarisasi Pendidikan

Dalam H.A.R. Tilaar (2006 : 75-77) disebutkan pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran atau *yardstick* sudah sampai di mana perjalanan kita di dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang *intangible* dan terus-menerus berubah dan meningkat. Tujuan pendidikan

selalu bersifat sementara atau "tujuan yang berlari". Hal ini berarti tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar yang perlu dicapai di dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah dan fisible mengenai tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan rencana strategis yang terlihat dengan keadaan dan waktu tertentu. Di dalam UUD 1945 telah merumuskan suatu tujuan yang ideal yaitu mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut ialah warganegara Indonesia yang cerdas. Untuk mengetahui sejauh mana tercapainya manusia yang cerdas itu dapat kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari di dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional memerlukan standar. Standar tersebut bukanlah standar dalam pengertian yang kaku tetapi standar yang terus-menerus meningkat. Dengan kata lain kualitas pendidikan nasional semakin lama semakin meningkat. Pertanyaan mengenai perlunya standarisasi pendidikan nasional jawabannya adalah "ya" dalam arti :

- 1) Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia kita memerlukan *yardstick* untuk menilai sejauh mana warganegara Indonesia itu juga memiliki visi yang sama, pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan negara kesatuan tersebut.
- 2) Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi. Dunia dewasa ini telah merupakan suatu kampung global sehingga satu negara tidak dapat bersembunyi lagi. Di dalam kehidupan global terjadi persaingan yang semakin lama semakin tajam, oleh sebab itu setiap warganegara perlu mengangkat dirinya sendiri di dalam kehidupan yang penuh persaingan. Bukan berarti

kehidupan yang penuh permusuhan tetapi terus-menerus memperbaiki diri dengan meningkatkan kemampuan diri agar tidak menjadi budak dari negara-negara lain.

- 3) Standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan (*progress*). Setiap warganegara tidak menginginkan negaranya tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Apabila dewasa ini Indonesia masih tergolong negara berkembang, tetapi tentunya mempunyai cita-cita untuk meningkatkan martabatnya sebagai negara maju. Untuk mencapai anggota dari negara maju tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusianya yang tinggi yang bukan hanya menjadi konsumen dari produk-produk negara maju lainnya tetapi juga dapat berpartisipasi di dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia.

3. Kualitas sebagai Inti dari Standarisasi

Istilah kualitas mempunyai banyak arti. Kualitas dapat berarti *a degree of action*, sesuai dengan requirement, keseluruhan karakteristik yang memuaskan di dalam penggunaan suatu produk, bebas dari kekurangan-kekurangan (*freedom from defect*), pengertian ini dalam konteks ISO-9000 berarti totalitas dari karakteristik yang memuaskan kebutuhan. Atau dengan singkat secara operasional berarti *fitness for use*. Suatu produk yang memiliki sifat-sifat yang memuaskan pelanggan adalah suatu produk yang berkualitas. Jadi pelanggan adalah satu-satunya yang menentukan apakah suatu produk atau servis berkualitas. Kepuasan ini dapat dilihat secara sadar apakah produk tersebut memberikan keuntungan atau kerugian di dalam penjualan, berkurangnya *market share* yang pada akhirnya menghasilkan kerugian. Inilah inti dari kualitas.

Goetsh dan Davis (Arief, 2007 : 117) mengatakan bahwa kualitas adalah "suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan".

Menurut Philip Kotler (Arief, 2007 : 117) berpendapat bahwa kualitas ialah "keseluruhan ciri, serta sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”.

The American Society for Quality Control (Arief, 2007 : 117) mengartikan kualitas sebagai “totalitas fitur dan karakteristik produk/jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun implisit”.

Mengutip pendapat dari bukunya H.A.R Tilaar (Standarisasi Pendidikan Nasional, 2006 : 37), David Hoyle menyebutkan berbagai karakteristik dari kualitas, antara lain :

“produk, accessibility, availability, appearance, adaptability, cleanliness, consumption, durability, disposability, emitability, plammability, flexibility, functionality, interchangeability, maintainability, odour, operability, fortability, producibility, reliability, repairability, safety, security, size, suscepibility, storability, taste, testability, traceability, toxicity, transfortability, vulnerability, weight”.

(“produk, mudah didapatkan, tersedia, kemasannya bagus, mampu beradaptasi, bersih, konnsumtif, tahan lama, setelah dipakai dapat dibuang, memancarkan sesuatu, fleksibel, fungsional, dapat dipelihara, tahan lama, berbau, dapat dioperasionalkan, dapat diteruskan, dapat diproduksi, terpercaya, dapat diperbaiki, aman, mempunyai ukuran, berasa, dapat diuji, mempunyai jejak, mengandung racun apabila kadaluarsa, dapat dipindahkan, mudah rapuh, mempunyai berat”).

Karakteristik dari servis adalah sebagai berikut :

“accessibility, accuracy, courtecy, comfort, competence, credibility, dependability, efficiency, effectiveness, flexibility, honesty, promptness, responsiveness, reliability, security”.

(“mudah didapatkan, akurat, ramah tamah, nyaman, kompeten, terpercaya, saling terkait, efisien, efektif, fleksibel, jujur, tepat waktu, tanggap, dapat dipercaya, menjamin keamanan dan kenyamanan”).

Dimensi-dimensi Kualitas. Menurut H.A.R Tilaar (Standarisasi Pendidikan Nasional, 2006:37) terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu:

a. Dimensi Kualitas Bisnis

Artinya sejauh mana bisnis tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Dimensi Produk

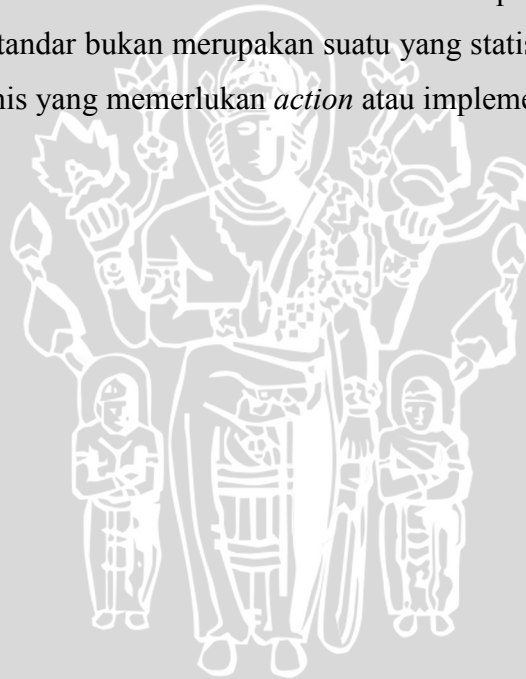
Sejauh mana produk dan service memenuhi pelanggan tertentu (specific customer).

c. Dimensi Organisasi

Sejauh mana organisasi mempunyai efisiensi secara maksimal dan efektif, mempunyai waste yang minimum, manajemen yang efisien dan mempunyai good human relation.

Di dalam memproduksi suatu produk yang berkualitas, diperlukan tiga komponen di dalam segi tiga: *quality insurance*, *quality improvement*, dan *quality control*. Ketiga jenis kegiatan ini menentukan apa yang disebut *quality management*.

Di dalam proses *quality control* seperti dikemukakan oleh David Hoyle ditunjukkan betapa standar memerlukan implementasi dan verifikasi serta aksi perbaikan sesudah diimplementasikan. Apabila dalam implementasi hasilnya tidak sesuai dengan standar sesudah diverifikasi, maka diadakan suatu upaya perbaikan. Jadi standar bukan merupakan suatu upaya perbaikan. Jadi standar bukan merupakan suatu yang statis tetapi merupakan suatu yang dinamis yang memerlukan *action* atau implementasi.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986 : 2) dalam bukunya Moleong (2008 : 2) pada mulanya bersumber pada pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat perlu mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu pengamat perlu menghitung dari satu, dua, tiga dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup perhitungan persentase, rata-rata, cikuadrat yang melibatkan diri dalam *perhitungan* atau *angka* atau *kuantitas*. dan perhitungan lainnya. Di pihak lain *kualitas* menunjuk segi alamiah yang dipertentangkan dengan *kuantum* atau *jumlah*. Atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Adapun definisi dari penelitian kualitatif dalam bukunya Moleong (2008 : 4) seperti yang dikutip dari pernyataan beberapa penulis antara lain, menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). David Wiliams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedang yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya

memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku baik individu maupun sekelompok orang.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam proposal penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap output SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meliputi :
 - a. Prosedur implementasi PSG dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4 Madiun;
 - b. Faktor yang mendukung implementasi PSG dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4 Madiun;
 - c. Output yang diharapkan dari implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun :
 - Tabel ataupun grafik jumlah lulusan SMKN 4 Madiun tahun 2006/2007 ataupun tahun 2007/2008 yang terserap dunia kerja.
2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
 - a. Hambatan internal, yang meliputi :
 - 1) Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir;
 - 2) Pandangan guru terhadap kurikulum baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik;
 - 3) Jumlah fasilitas/sarana yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun.
 - b. Hambatan eksternal, yang meliputi :
 - 1) Kebijakan pendidikan;
 - 2) Lokasi perusahaan/tempat magang.

C. Lokasi dan Situs

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Dengan demikian situs dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan negeri 4 Madiun.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun karena sekolah ini telah menerapkan Pendidikan Sistem Ganda yang terlihat dari adanya praktek bersama antara sekolah dan dunia usaha/industri dalam meningkatkan kualitas output (lulusannya) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Sedangkan alasan peneliti memilih situs penelitian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun karena Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun telah berhasil menerapkan Pendidikan Sistem Ganda yang terlihat dari prosentase output yang berhasil terserap dunia kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dan diharapkan di tempat ini peneliti dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan judul penelitiannya. Namun bukan berarti kondisi yang baik di atas memastikan tidak ada masalah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun. Kondisi yang dapat dilihat adalah masih kurangnya sarana dan fasilitas untuk mendukung prakteknya. Kemudian kegiatan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di dalamnya juga masih kurang. Berdasarkan hal inilah peneliti memilih Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun sebagai situs penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Sugiyono (2006: 156) sumber data dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Data Primer

Diperoleh Peneliti melalui penelitian secara langsung untuk mengambil data, yaitu melalui wawancara dengan Kepala SMKN 4 Madiun, Wakasek/Humas SMKN 4 Madiun, guru-guru, mencakup guru BK dan guru Prakerin, dan peserta didik kelas XII.

2. Jenis Data Sekunder

Diperoleh berdasarkan data pendukung. Adapun data pendukung ini berasal dari dokumen yang meliputi prosedur pelaksanaan prakerin, dokumen tentang jumlah dan kondisi sarana/prasarana yang ada di SMKN 4 Madiun, catatan yang meliputi prestasi akademik dan non akademik sekolah, laporan yang meliputi laporan hasil evaluasi peserta didik selama melaksanakan prakerin, laporan latar belakang sosial wali peserta didik serta arsip sekolah yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu tentang implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2006 : 156), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Riset Pustaka

Pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Riset Lapangan

Kegiatan yang dilakukan dalam riset ini adalah penelitian secara langsung melalui :

Interview, teknik ini sering disebut wawancara, pelaksanaannya dengan proses tanya jawab peneliti dengan informan, mengenai obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini ketika hendak melakukan wawancara peneliti harus membuat janji terlebih dahulu dengan pihak sekolah, lalu wawancara dilakukan secara *face to face* serta menggunakan daftar pertanyaan yang disampaikan kepada nara sumber yaitu antara lain Kepala SMKN 4 Madiun, Wakasek Humas, guru, serta peserta didik kelas XII.

Observasi, yaitu cara pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud pengamatan langsung adalah mengamati langsung mengenai keadaan dan kenyataan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sedangkan secara tidak langsung dengan mengamati dan menyimpulkan pendapat orang lain/pengamat lain yang berada di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi Pendidikan Sistem Ganda, sumber daya pendukung yang dimiliki SMKN 4 Madiun terkait fasilitas belajar serta kualitas SDM yang dilihat dari output, dan hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan implementasi PSG kurang maksimal.

Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen penelitian, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data yang akan didokumentasikan berupa latar belakang wali peserta didik, fasilitas yang ada guna mendukung implementasi PSG dan profil SMKN 4 Madiun.

Questioner, teknik ini dilakukan dengan memberikan 15 pertanyaan seputar proses pendidikan dan pelaksanaan prakerin di SMKN 4 Madiun sebagai implementasi PSG terhadap peserta didik kelas XII program keahlian restoran, ketika mereka tidak ada pelajaran/jam kosong. Dalam

penelitian ini, data yang disajikan berupa pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Tujuan teknik ini adalah selain mempersingkat waktu juga melihat sampai di mana kemampuan siswa untuk memberikan tanggapan tertulis seputar implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk wawancara, instrumen penelitiannya adalah Peneliti sendiri dengan bantuan pedoman wawancara.
2. Untuk teknik observasi, instrumen penelitiannya adalah Peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.
3. Untuk teknik pengumpulan data terutama data sekunder, instrumen penelitiannya adalah alat pencatatan dokumentasi.

G. Analisis Data

Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data menurut Patton dalam Moeleong (2004 : 280) adalah : "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian". Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data dalam Moeleong (2004 : 280) sebagai : "proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu".

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema

dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Walaupun kedudukannya penting, dengan sendirinya tahap analisis data ini hanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tahap-tahap lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Kota Madiun

a. Letak, Batas, dan Kondisi Wilayah

Kota Madiun terletak pada 111° s/d 112° BT dan 7° s/d 8° LS. Secara administratif Kota Madiun memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- Sebelah Timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Suhu berkisar antara terendah 20° dan tertinggi 35° , hal ini disebabkan letak ketinggian Kota Madiun dari permukaan laut yaitu :

- Sebelah Selatan : 67m
- Utara : 64m
- Tengah : 63m

Gambar 4 :
Peta Kota Madiun



Sumber : www.pemkabmadiun.go.id

Ditilik dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Sepanjang tahun 2006 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Desember, sedangkan pada bulan Juli sampai dengan Oktober tidak ada curah hujan sama sekali. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun pada tahun 2006 sempat mengakibatkan bencana banjir tepatnya di Kecamatan Kartoharjo namun demikian tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar.

b. Kondisi Administratif

Kota Madiun terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo, masing-masing kecamatan terbagi atas 9 Kelurahan. Dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun empat diantaranya termasuk kelurahan swadaya (2 swadaya mula dan 2 swadaya madya), 9 termasuk kelurahan swakarya (5 swakarya mula dan 4 swakarya madya), serta 14 kelurahan yang termasuk swasembada mula.

Kota Madiun dipimpin seorang Walikota dibantu oleh Wakilnya yang dipilih setiap 5 tahun sekali oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pembangunan di Kota Madiun sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan dibangunnya beberapa pusat perbelanjaan, perhotelan dan sudah banyak industri yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun garment.

c. Kondisi Demografis (penduduk, kebudayaan masyarakat sehari-hari)

Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2006 mencapai 198.745 jiwa dengan angka pertambahan penduduk alami sebesar 0,52. Sementara itu kepadatan penduduk secara keseluruhan adalah 5.981 jiwa/ km². Dari 3 (tiga) kecamatan yang ada Kecamatan Taman adalah kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk 6.712 jiwa/ km², sedangkan kepadatan penduduk 2 (dua) kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kartoharjo masing-masing 6.100 jiwa/ km² dan 5.021 jiwa/ km². Komposisi penduduk Kota Madiun terdiri dari 95.752 jiwa penduduk laki-laki dan 102.933 jiwa penduduk perempuan serta berada pada kelompok umur penduduk muda (www.statistik.madiunkota.com).

Berdasarkan pernyataan ini, dapat diketahui bahwa Kota Madiun memiliki ciri-ciri penduduk *expansive*, yaitu jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada jumlah penduduk usia tua.

46% dari jumlah usaha yang ada di Kota Madiun berada pada Kecamatan Taman, namun 72% tenaga kerja berasal dari 2 (dua) kecamatan lainnya. Bisa dikatakan pusat ekonomi dan pemerintahan Kota Madiun berada di Kecamatan Taman sehingga secara ekonomis mempunyai daya tarik, dengan demikian terjawab mengapa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Taman paling tinggi.

Tabel 1 :
Banyaknya Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatannya
Pada Tahun 2006

Uraian <i>Description</i>	2005			2006		
	L <i>Male</i>	P <i>Female</i>	L+P <i>Total</i>	L <i>Male</i>	P <i>Female</i>	L+P <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pencari Kerja <i>Job Seekers</i>	5.967	6.831	12.798	4.634	4.415	9.049
Penempatan <i>Placement</i>	341	896	1.237	52	747	799
Penghapusan Pencari Kerja <i>Wiping Out to Job Seekers</i>	3.942	4.399	8.341	2.620	2.778	5.398
Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan <i>Un Place Job Seekers</i>	1.648	4.536	6.220	1.962	890	2.852
Permintaan Lowonngan <i>Vacancies for Worker</i>	341	945	1.286	65	933	998
Dipenuhi <i>to be Fulfilled</i>	341	896	1.237	52	747	799
Penghapusan Lowongan <i>Wiping Out to Vacancy</i>	-	-	-	-	-	-
Sisa Lowongan yang belum Dipenuhi <i>Vacancies Remaining</i>	-	49	49	13	186	199

Sumber: www.statistik.kota.madiun.go.id

d. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat

46% dari jumlah usaha yang ada di Kota Madiun berada pada Kecamatan Taman, namun 72% tenaga kerja berasal dari 2 (dua) kecamatan lainnya. Bisa dikatakan pusat ekonomi dan pemerintahan Kota Madiun berada di Kecamatan Taman sehingga secara ekonomis mempunyai daya tarik, dengan demikian terjawab mengapa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kecamatan Taman paling tinggi.

PDRB Kota Madiun tahun 2006 baik atas dasar harga konstan 2000 maupun atas dasar harga berlaku sama-sama menunjukkan gejala kenaikan. Kenaikan PDRB harga berlaku adalah sekitar 16% yaitu dari 1.455.346,70 pada tahun 2005 menjadi 1.687.456,62 pada tahun 2006, sedangkan kenaikan PDRB harga konstan di atas 5% atau dari 889.322,53 pada tahun 2005 menjadi 937.574,10 pada tahun 2006. Secara sektoral peranan sektor industri dalam PDRB Kota Madiun adalah yang paling menonjol, disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa-jasa, dan sektor bangunan (www.madiunkota.com).

Dalam bidang pendidikan, tingkat partisipasi sekolah di Kota Madiun dari tahun ke tahun dapat dikatakan tidak mengalami perubahan, karena tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan. Namun demikian perkembangan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya mengalami peningkatan baik mutu maupun jumlahnya. Tingkat Sekolah Dasar, sama seperti pada daerah lain jumlah siswa/ pelajar terbanyak di Kota Madiun adalah siswa/ pelajar tingkat Sekolah Dasar. Untuk mendukung program nasional pendidikan dasar sembilan tahun sudah semestinya jika jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP mendapat perhatian khusus, hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah ketersediaan tenaga mengajar/ guru dan sekolah. Ketersediaan tenaga pengajar tingkat SD di Kota Madiun masih relatif mencukupi, rata-rata seorang guru mengajar 15 orang hingga 24 orang siswa dan rata-rata kelas mampu menampung 22 orang hingga 47 orang siswa.

Tingkat Sekolah Lanjutan, pada dasarnya pada jenjang Sekolah Lanjutan (Tingkat Pertama maupun Tingkat Atas) perbandingan murid dengan guru maupun murid dengan sekolah dirasa masih mencukupi, namun yang perlu diingat adalah suasana yang nyaman di kelas sewaktu proses belajar mengajar

berlangsung dapat terjaga, oleh karena itu jumlah murid di dalam kelas hendaknya jangan terlalu banyak. Dan yang terakhir tingkat Perguruan Tinggi, pada tahun 2006 tercatat 7.731 orang mahasiswa yang tersebar pada 13 kampus perguruan tinggi yang ada di Kota Madiun. Sementara itu tenaga dosen yang mengajar sebanyak 527 orang, artinya rata-rata dosen di Kota Madiun mengajar 15 orang mahasiswa. Selain itu tercatat juga 207 orang tenaga administrasi.

2. Gambaran SMKN 4 Madiun

a. Sejarah dan Gambaran Umum

SMKN 4 Madiun didirikan pada tahun 1969 dan terletak di Jalan Mastrip No.27, Kecamatan Taman, Desa Mojorejo, Kota Madiun. Luas tanah SMKN 4 Madiun adalah 7180 m² dan merupakan sekolah kejuruan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. SMKN 4 Madiun memiliki empat program keahlian atau jurusan, yaitu Akomodasi Perhotelan, Restoran, Tata Kecantikan Rambut, dan Tata Busana. Secara administratif SMKN 4 Madiun memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Stadion Wilis
- Sebelah Selatan : KPU atau SMAN 6
- Sebelah Timur : Dinas Pajak
- Sebelah Barat : SMAN 5 Madiun

Mengingat letak sekolah yang berada di lingkungan pendidikan, maka diharapkan SMKN 4 Madiun dapat menjadi tempat yang kondusif bagi peserta didiknya dalam proses belajar-mengajar, dan menghasilkan output yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri sekarang ini. SMKN 4 Madiun sekarang dipimpin oleh Bapak Liluk Dwi Muljanto, S.Pd selama masa jabatan 2007-2010. SMKN 4 Madiun memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi SMKN 4 Madiun :

“Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan yang Profesional dan Mandiri serta Berjiwa Entrepreneur”.

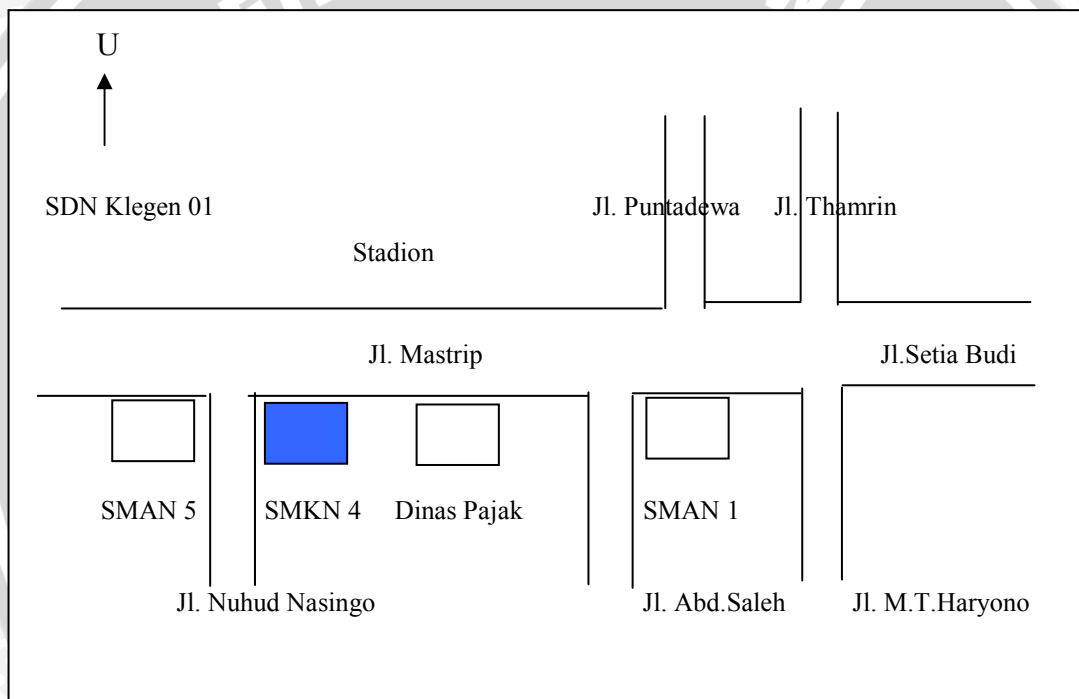
Misi SMKN 4 Madiun :

- 1) Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi aset bangsa yang berakhlak, berbudi pekerti, berwawasan dan berkemampuan untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.
- 2) Menghasilkan tenaga yang kreatif, adaptif dan produktif sesuai dengan bidang keahliannya.

Motto :

”SIAP SETIAP SAAT”

Gambar 5 :
Peta Letak SMKN 4 Madiun



b. Infrastruktur dan Fasilitas SMKN 4 Madiun

SMKN 4 Madiun merupakan sekolah yang bentuk bangunannya kondusif atau dapat dikatakan nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar bagi para guru dengan siswanya. Dari tahun ke tahun diadakan renovasi dan pengembangan fisik SMKN 4 Madiun demi menciptakan tempat yang layak untuk

pendidikan. Seperti pengadaan lab bahasa yang dilakukan secara bertahap, penambahan fasilitas belajar mengajar untuk praktik, pembangunan ruangan dilakukan demi menambah rasa nyaman siswa-siswi dalam mendapatkan pendidikan di dalam sekolah. Masing-masing jurusan di SMKN 4 Madiun mempunyai ruangan sendiri untuk dapat melaksanakan prakerin sesuai dengan bidangnya. Untuk jurusan Akomodasi Perhotelan terdapat satu ruangan yang merupakan replika dari kamar di hotel, jurusan Tata Busana mempunyai manequin baik pria maupun wanita dari anak, dewasa, sampai remaja. Jurusan Tata Kecantikan Rambut ada semacam ruangan yang mirip dengan salon dan memang difungsikan sebagai salon oleh para guru dan siswa. Jurusan Restoran mempunyai ruangan yang lebih lebar dan mirip rumah makan. Dan semua ruangan replika tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan prakerin.

Jumlah ruangan secara keseluruhan adalah 55 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Ruangan	Jumlah
-----	--------------	--------

1	Ruang Tata Usaha	1
2	Ruang Kepala Sekolah	1
3	Ruang BP	1
4	Ruang Dapur	1
5	Ruang Kelas Teori	10
6	Ruang Disain	1
7	Ruang Perpustakaan	1
8	Ruang Aula	1
9	Ruang UKS	1
10	Ruang Kapolsek	1
11	Ruang OSIS	1
12	Ruang Sekretariat Prakerin	1
13	Ruang Sekretariat Kurikulum	1
14	Ruang Salon	1
15	Ruang Mini Hotel	4
16	Ruang Sanggar Busana	1
17	Ruang SIM	1
18	Ruang Guru	3
19	Ruang Mushola	1
20	Ruang Praktek Dapur	3
21	Ruang Praktek APH	1
22	Ruang Praktek Busana	4
23	Ruang Praktek Kecantikan	3
24	Ruang Lap Bahasa	1
25	Ruang Lap Komputer	1
26	Ruang Kantin Siswa	1
27	Toilet	4
28	Gudang	1
29	Ruang Sanggar Pramuka	1
30	Ruang Parkir Sepeda Motor	1
31	Lapangan Upacara	1

Tabel 2 :
Jumlah Ruangan SMKN 4 Madiun



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sumber : laporan SMKN 4 Madiun

c. Keadaan Guru SMKN 4 Madiun

Jumlah guru yang ada saat ini adalah 94 orang (termasuk Guru Tidak Tetap/Honorer). Sebagian besar latar belakang pendidikan guru di SMKN 4 Madiun adalah lulusan Sarjana Keguruan/A4 dan rata-rata membekali dirinya dengan mengikuti pelatihan ataupun penataran sesuai dengan bidang yang diajarkan. Prestasi guru-guru di SMKN 4 Madiun bukan hanya di dalam kota saja tetapi sudah ke luar kota. Mereka mempunyai kompetensi dan keahlian dalam bidangnya untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Tugas mereka antara lain :

- Kepala Sekolah : merupakan jabatan tertinggi pada tingkat struktural sekolah dan tugasnya adalah membawahi organ-organ di bawahnya.. Bertanggung

jawab terhadap seluruh kegiatan guru, siswa dan dunia usaha/industri dalam rangka implementasi PSG baik di dalam ataupun di luar sekolah sesuai dengan visi dan misi.

- Wakil Kepala Sekolah : membantu Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya, selain itu juga memberikan pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku bagi peserta didiknya.

- Guru :

- 1) Memberikan pendidikan sesuai kurikulum bagi seluruh peserta didik;
- 2) Membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mampu mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk siap bekerja setelah lulus nanti ;
- 3) Mengawasi jalannya proses pendidikan dalam rangka PSG baik di dalam maupun di luar sekolah.

- Staf administrasi :

- 1) Mencatat dokumentasi
- 2) Mencatat arsip-arsip penting
- 3) Menyediakan data tentang SMKN 4 Madiun

d. Kondisi Peserta Didik SMKN 4 Madiun

Jumlah siswa yang ada pada SMKN 4 Madiun rata-rata sudah mencukupi ruangan yang disediakan, meski tidak sebanyak jumlah siswa di Sekolah Menengah Umum. Hal ini dikarenakan jumlah peminat Sekolah Menengah Kejuruan lebih sedikit daripada peminat Sekolah Menengah Umum yang ada di Kota Madiun. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Samar, selaku guru SMKN 4 Madiun,

“rata-rata siswa yang mendaftar di SMKN 4 ini pada awalnya dikarenakan gagal masuk ke Sekolah Menengah Umum sehingga mereka baru ada niat mendaftar di sini/SMKN 4 Madiun.” (tanggal 30 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB).

Tabel 3 :
Data Jumlah Peserta Didik (Kelas X,XI,XII)
Agustus 2008

JUMLAH SISWA PER PROGRAM KEAHLIAN

No.	JURUSAN	L	P	JUMLAH
1.	AKOMODASI PERHOTELAN	5	94	99
2.	RESTORAN	18	209	227
3.	KECANTIKAN RAMBUT	2	90	92
4.	TATA BUSANA	4	290	294
	JUMLAH	29	683	712

Sumber : Dokumentasi BP SMKN 4 Madiun.

Berdasarkan tabel di atas jumlah siswa yang paling banyak adalah jurusan Tata Busana. Tidak heran banyak siswa yang berminat pada jurusan ini, karena perkembangan model pakaian dari waktu ke waktu terus berubah dan diminati oleh pria maupun wanita sebagai kebutuhan primer. Permintaan dari luar sekolah terhadap siswa-siswi SMKN 4 Madiun untuk acara *fashion show* di pusat perbelanjaan juga banyak. SMKN 4 Madiun juga harus menyiapkan berbagai fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan siswa ketika melaksanakan praktek di sekolah. Kota Madiun menyediakan alternatif tempat bagi masyarakat untuk berbelanja pakaian mulai dari harga yang terjangkau sampai harga yang mahal sekalipun. Oleh karena itu lapangan pekerjaan di bidang ini sangat menjanjikan mengingat wanita sangat menyukai mode.

e. **Kondisi Wali Peserta Didik SMKN 4 Madiun**

Tabel 4 :

Data Jenis Pekerjaan Wali Peserta Didik Jurusan Restoran Kelas X (Pihak Orang Tua Laki-Laki Saja).

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	PNS	5
2.	Wiraswasta	50
3.	Petani	24
4.	TKI	2
5.	TNI/POLRI	4
6.	Tidak Bekerja	13

Total	98
--------------	-----------

SSumber : Laporan Data Pribadi Wali Peserta Didik Siswa SMKN 4 Madiun tahun pelajaran 2008-2009 (BP).

Berdasarkan data yang disebutkan rata-rata jenis pekerjaan wali peserta didik adalah wiraswasta dengan jumlah 50 dari 98 orang yang terdiri dari sopir, pedagang, buruh dan lain-lain. Dan mereka sebagian besar mempunyai latar belakang pendidikan tingkat menengah atas (SMA).

Tabel 5
Data Tingkat Pendidikan Wali Peserta Didik Jurusan Restoran Kelas X (Pihak Orang Tua Laki-Laki Saja)

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	26
2.	SLTP	16
3.	SLTA	36
4.	D3	1
5.	S1	4
6.	AKADEMI	1
7.	KOSONG	14
Total		98

Sumber : Laporan Data Pribadi Wali Peserta Didik Siswa SMKN 4 Madiun tahun pelajaran 2008-2009 (BP)

f. Permasalahan SMKN 4 Madiun

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samar salah satu Guru di SMKN 4 Madiun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Jumlah dan mutu sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standart industri.
- 2) Perbedaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan industri.
- 3) Kurangnya jumlah kelas yang digunakan untuk praktek peserta didik dalam rangka implementasi PSG. Selama ini ada beberapa kelas yang berfungsi ganda, di samping digunakan untuk kelas teori juga digunakan untuk kelas praktek.

- 4) Masih ada beberapa guru yang dinamika berpikirnya cenderung kurikulum lama, padahal sistem pendidikan kejuruan yang ada sudah menyesuaikan dengan kurikulum 2006 (bersumber pada kurikulum 2004 tetapi lebih menyesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing). Pembelajaran di sekolah dituntut menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri. (Jumat, 14 November 2008, 09.00 WIB)

3. Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun

a. Sejarah Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan didasarkan atas arahan GBHN 1993 dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun sudah dimulai dari tahun 1997. Dari orientasi kurikulum 1994 yang *supply driven* sampai orientasi kurikulum 2006 yang *demand driven*. Sistem pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Sekolah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini dunia usaha/industri (dudi) untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan tempat prakerin agar siswa mempunyai pandangan pekerjaan yang akan dijalankan setelah lulus nanti. Hal ini berarti sekolah dituntut untuk mampu membuat perencanaan kebijakan yang mendukung keberhasilan implementasi Pendidikan Sistem Ganda dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di kota Madiun khususnya. Tantangan implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun adalah bagaimana memberdayakan sekolah dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dimana siswa-siswi SMKN 4 Madiun berada pada komunitas masyarakat/orang tua yang mempunyai latar pendidikan masih sampai pada tingkat menengah atas (SMA).

b. Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) menghendaki siswa-siswi pada Sekolah Menengah Kejuruan belajar di dua tempat, yaitu sekolah dan industri. Salah satu implementasi PSG dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4 Madiun adalah kegiatan praktek kerja industri (prakerin) yang wajib diikuti setiap siswa-siswi pada kelas XI dan XII dalam waktu enam bulan dan dibagi menjadi dua gelombang. Syarat yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi sebelum mendaftar prakerin di sekolah adalah :

- 1) Menyelesaikan tugas-tugas dan ulangan harian.
- 2) Menyelesaikan segala administrasi sekolah.
- 3) Menyelesaian administrasi prakerin. Para siswa wajib membayar uang praktek kerja industri @ Rp. 175.000 (bisa diangsur 2x, dengan keterangan angsuran I Rp. 100.000 dan angsuran II Rp.75.000).
- 4) Satu kelas dibagi menjadi 2 (1 regu terdiri dari 15 s/d 17 anak).
Peraturan yang ditetapkan di sekolah mengenai lama praktek kerja industri/prakerin adalah 6 bulan dibagi menjadi 2 gelombang (per gelombang 3 bulan). Waktu prakerin ketika siswa berada pada tingkat II (kelas XI) pada semester genap yang lamanya 3 bulan, dan pada tingkat III (kelas XII) pada semester ganjil yang lamanya 3 bulan.
- 5) Jujur dan disiplin. Setiap siswa harus bisa bersikap jujur dan disiplin untuk masuk ke dunia kerja. Karena hal ini merupakan salah satu sikap yang dibutuhkan industri untuk mengukur kinerja siswa-siswi ketika melaksanakan prakerin.

Setelah semua syarat di atas dapat dipenuhi maka masing-masing siswa diijinkan mencari tempat prakerin yang sesuai dan memenuhi syarat yang diminta industri atau tidak. Pada mulanya ada beberapa industri yang mau menerima siswa prakerin dengan persyaratan tertentu. Jika calon siswa prakerin tadi belum memenuhi persyaratan yang diminta maka industri belum bisa menerima. Sebaliknya ada beberapa industri yang tidak memakai persyaratan tertentu untuk menerima siswa prakerin. Dalam hal ini sekolah bekerja sama dengan dunia usaha/industri yang berada di dalam ataupun di luar kota untuk menempatkan siswa-siswinya melaksanakan prakerin. Kesepakatan antara industri dan sekolah bisa lebih dijelaskan dalam perjanjian tertulis yang lebih dikenal dengan istilah

MoU (*Memorandum of Understanding*). Fungsi dari MoU di sini adalah memberikan keabsyahan perjanjian, wewenang, tanggung jawab dan hak daripada pihak pertama dan pihak kedua (yaitu Kepala SMKN 4 Madiun dan industri yang bersangkutan) disertai meterai tempel dan tanda tangan dari kedua pihak. Apabila selama waktu yang dijanjikan salah satu pihak ingkar maka bisa dituntut ke pihak berwajib. Sekolah beserta lembaga pendidikan yang membawahi bekerja sama dengan masyarakat yaitu dunia usaha/industri untuk menempatkan para siswa SMKN 4 Madiun agar dapat melaksanakan prakerin selama waktu yang telah disepakati. Dengan semacam MoU antara sekolah dan dunia usaha diharapkan masing-masing pihak mematuhi segala substansi dari perjanjian tersebut yang telah disepakati untuk dilaksanakan bersama.

Tempat melaksanakan prakerin bisa di dalam kota atau luar kota, tergantung penempatan individu. Pihak sekolah bertanggung jawab untuk memberikan guru pembimbing yang diberikan surat tugas langsung dari Kepala Sekolah sekaligus memberikan tugas untuk mengawasi, membina, dan membimbing siswa-siswi selama prakerin walaupun tidak setiap hari harus ke tempat kerja. Sebelum tahap pemberangkatan, siswa diberikan pembekalan oleh sekolah seputar rambu-rambu yang harus dipatuhi selama di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Para siswa yang terbagi menjadi 2 gelombang mulai ditempatkan sesuai dengan pembagiannya dan dapat melakukan segala aktivitas seputar dunia kerja di tempat prakerin (bisa di sekolah ataupun di luar sekolah). Selama melaksanakan prakerin, siswa menyesuaikan cara bekerja dengan dunia usaha/industri yang bersangkutan karena masing-masing industri mempunyai cara yang berbeda-beda. Selama di tempat kerja para siswa tadi melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sehari-hari dan beberapa industri juga memberikan pengetahuan ataupun kiat-kiat sukses ketika hendak masuk ke dunia kerja. Guru yang sudah ditugaskan untuk menjadi pembimbing siswa-siswi selama prakerin diharapkan tidak lepas tanggung jawab terhadap kondisi kesehatan maupun psikis mereka.

Pada kenyatannya, kondisi di atas masih mengalami beberapa kendala. Untuk siswa-siswi yang melaksanakan prakerin di luar kota kendala utama adalah dari diri mereka sendiri. Mulai dari kemampuan untuk beradaptasi sampai

masalah keuangan untuk biaya hidup di kota lain. Walaupun keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi tempat kerja yang memiliki kultur berbeda dengan di sekolah atau tempat kerja, keadaan tersebut seharusnya menjadi tantangan guru untuk lebih kreatif memberikan bimbingan kepada siswa dalam masalah motivasi dan *life skill* menuju ke arah yang lebih baik untuk keperluan mereka di masa depan. Hal ini membutuhkan kesiapan mental yang baik dari siswa dan bimbingan guru karena dianggap sudah tidak berada di lingkungan sekolah dan harus berhadapan dengan orang banyak yang menilai pekerjaan mereka sehari-hari. Agar memiliki nilai yang baik dari dunia usaha/industri, maka para siswa harus menunjukkan kinerja yang baik juga

Pelaksanaan prakerin bagi siswa-siswi SMKN 4 Madiun merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan komunitas lokal atau pelaksanaan kebijakan pendidikan kejuruan yang dilakukan oleh seluruh pihak sekolah termasuk siswa-siswi yang berada di sekolah kejuruan. Berdasarkan keterangan para siswa-siswi, sisi positif dari pelaksanaan prakerin mereka mendapatkan pengalaman kerja sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dari awal untuk bersaing dalam dunia kerja. Dengan hanya berbekal nilai yang bagus ketika lulus saja tidak cukup, para siswa-siswi lulusan tersebut dituntut untuk mempunyai keterampilan yang mendukung untuk masuk ke bidang pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi Pendidikan Sistem Ganda yang ada di seluruh sekolah kejuruan di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dengan cara terus meningkatkan kualitas kompetensi dari sumber daya manusianya melalui kebijakan pendidikan yang *fleksible* terhadap perkembangan jaman. Implementasi PSG di setiap sekolah pastilah berbeda walaupun konsepnya sama, yang harus diperhatikan adalah pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu, di samping harus menyesuaikan dengan dunia usaha/industri. Karena itu pendidikan kejuruan harus selau dekat dengan dunia kerja.

Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun menemui beberapa kendala terutama menyangkut masalah jumlah dan mutu sarana dan prasarana yang digunakan untuk praktek siswa-siswi dan guru. Beberapa peralatan praktek juga belum memenuhi standart dunia industri. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap

usaha sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah sendiri, dikarenakan belum tersedianya dana pendidikan untuk mengadakan peralatan praktek yang baru dan memenuhi standart. Walaupun demikian, tetapi peran guru di sini sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk kelangsungan belajar mengajar. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Liluk, selaku Kepala SMKN 4 Madiun :

“Keadaan sarana dan prasarana bisa dikatakan cukup mesti belum standart, karena merupakan sarana dan prasarana yang sudah lama didukung dan diberikan oleh kantor pemerintah yang ada di SMKN 4 Madiun. Belum mencukupi kebutuhan siswa seluruhnya, tetapi perlu diperhatikan peran guru dalam memanfaatkan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan praktek kerja lapangan tadi. Peralatan yang belum mencukupi tersebut bukan menjadi alasan utama dalam meningkatkan keterampilan siswa, guru-guru harus berpikir untuk memanfaatkan sarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4” (tanggal 30 Oktober 2008 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan keterangan kepala sekolah keadaan tersebut, kendala-kendala yang muncul dalam implementasi PSG merupakan tantangan tersendiri bagi SMKN 4 Madiun untuk mampu memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswinya. Di samping itu sekolah juga memperhatikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan masyarakat di luar lingkungan sekolah. Peran masyarakat dirasa sangat perlu mulai dari awal sampai akhir untuk perkembangan karakter maupun kemampuan peserta didik. Peran masyarakat khususnya dunia usaha/industri terlihat ketika siswa-siswi SMKN 4 Madiun melaksanakan prakerin di luar sekolah. Industri selain memberikan pengetahuan dan keterampilan juga mengadakan evaluasi terhadap kinerja siswa-siswi SMKN 4 Madiun. Evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi pihak sekolah untuk menyiapkan siswa-siswinya kelak menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga sekolah dapat mengetahui perkembangan siswa selama prakerin. Hal ini lebih efektif daripada harus mengawasi siswa setiap harinya di tempat kerja. Dengan begitu diharapkan dapat terwujud kerja sama yang baik antara guru, siswa dan masyarakat.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meliputi :

a. Prosedur Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun

Prosedur implementasi PSG di SMKN 4 Madiun terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

Sosialisasi program. Sosialisasi program yang berhubungan dengan Pendidikan Sistem Ganda harus sesuai dengan ketentuan dalam buku petunjuk dan pelaksanaan. Sebelum siswa melaksanakan prakerin, maka Kepala Sekolah mengadakan sosialisasi program terlebih dahulu kepada seluruh guru SMKN 4 Madiun baru kemudian dilanjutkan kepada siswa-siswi kelas XI yang akan melaksanakan prakerin. Sosialisasi program ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan PSG. Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan bantuan beberapa badan dari luar sekolah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi kepada siswa ketika tiba waktunya melaksanakan prakerin. Salah satu badan yang diundang SMKN 4 Madiun adalah badan kesehatan. Untuk melepas peserta didiknya selama 6 bulan, pihak sekolah juga mendatangkan pembicara dari badan anti narkoba atau badan kesehatan yang menjelaskan seputar bahaya dari HIV AIDS. Hal ini dimaksudkan agar para siswa waspada terhadap pengaruh dari luar dan tetap fokus pada kegiatan di tempat praktek kerja. Pada tahap ini, sekolah juga mengadakan pertemuan bersama antara wali peserta didik dan perwakilan dari pihak sekolah. Sekolah perlu memberikan gambaran seputar Pendidikan Sistem Ganda dan segala programnya termasuk praktek kerja/prakerin selama 6 bulan yang dibagi menjadi dua gelombang. Peran wali peserta didik di sini adalah ikut membantu sekolah untuk memberikan izin pada putra-putrinya mengikuti rangkaian kegiatan prakerin baik yang berada di dalam maupun di luar sekolah. Pada prinsipnya, siswa bebas memilih tempat untuk melaksanakan prakerin, atau jika siswa tidak mempunyai gambaran tempat untuk melaksanakan prakerin, maka sekolah membantu melalui bagian HUMAS. Sekolah juga memberikan gambaran pada wali peserta didik untuk tidak khawatir apabila putra-putrinya memilih tempat prakerin di luar kota, karena pihak sekolah sudah menyiapkan guru pembimbing untuk mereka. Tetapi pihak sekolah juga

meminta agar para wali peserta didik ikut terus memantau perkembangan putra-putrinya karena bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab bersama.

Pemetaan peserta. Tahap selanjutnya, siswa kelas XI setiap kelas dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 15 s/d 17 anak. Pembagian siswa ini juga diikuti dengan pembagian guru pembimbing siswa prakerin yang nantinya bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi siswa selama waktu yang ditentukan untuk melaksanakan prakerin. Pada tahap ini, hendaknya Kepala Sekolah telah memberikan tanggung jawab beserta tugas yang akan dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap perkembangan peserta didiknya selama lepas dari pengawasan sekolah. Sehingga peserta didik selain dapat konsultasi dengan guru BP juga dapat konsultasi dengan guru pembimbing terkait pelaksanaan prakerin sebagai salah satu program pendukung PSG.

Penjajakan/pengiriman surat. Pada tahap ini sekolah mulai menjajaki dunia usaha/industri yang pada nantinya akan dibuat tempat prakerin siswa. Ketika pihak sekolah dan industri sepakat untuk mengadakan kerja sama maka pihak sekolah perlu mengirimkan surat kepada industri untuk menempatkan siswa-siswi SMKN 4 Madiun melaksanakan prakerin sesuai waktu yang disepakati. Biasanya terdapat kesepakatan atau yang lebih dikenal dengan istilah Memorandum of Understanding (MoU), yang berisi wewenang, tanggung jawab dan hak daripada pihak pertama dan pihak kedua (yaitu Kepala SMKN 4 Madiun dan industri yang bersangkutan) disertai meterai tempel dan tanda tangan dari kedua pihak.

Pendaftaran. Pada tahap ini siswa-siswi yang akan melaksanakan prakerin harus mendaftar terlebih dahulu kepada BKK sekolah, yaitu ruang kesekretariatan prakerin di SMKN 4 Madiun yang fungsinya terkait langsung dengan dunia usaha/industri. Lalu dilanjutkan penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan prakerin sebesar @ Rp.175.000. Didukung oleh penjelasan salah satu peserta didik kelas XII sebagai berikut :

”Ketika saya mendaftar prakerin di BKK sekolah pada saat kelas XI saya wajib menyelesaikan segala administrasi sekolah terlebih dahulu, menyelesaikan tugas-tugas dan ulangan harian, jujur dan disiplin, kemudian terdaftar menjadi siswa SMKN 4 Madiun. Setelah semua

syarat itu saya penuhi, baru saya dibebankan biaya administrasi prakerin sebesar Rp.175.000” (tanggal 17 November 2008, pukul 10.00 WIB).

Senada dengan pernyataan tersebut Ibu Endang Tri selaku guru BP SMKN 4 Madiun, menambahkan pernyataannya pada wawancara tanggal 31 Oktober 2008 :

”Ketika mendaftar, para siswa diwajibkan membayar uang praktek kerja industri sebesar Rp.175.000 Bisa diangsur dua kali, dengan keterangan angsuran I Rp.100.000 dan angsuran II Rp.75.000. Praktek kerja industri merupakan salah satu kebijakan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik, maka diharapkan peserta didik yang sudah kelas XI dapat mendaftar tanpa ada beban biaya dari sekolah yang dirasa memberatkan” (pukul 08.00 WIB).

Seleksi. Setelah tahap pendaftaran, maka semua siswa yang mendaftar akan diseleksi oleh pihak sekolah menyesuaikan dengan industri yang akan dimasuki apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak. Ada beberapa industri yang mengajukan persyaratan tertentu bagi para siswa yang akan melaksanakan prakerin karena alasan standart kebutuhan dunia kerja saat ini. Misalnya seperti Hotel Merdeka yang ada di kota Madiun, mengajukan persyaratan khusus seputar ketentuan fisik bagi para siswa, karena menyesuaikan kebutuhan karyawan hotel saat ini. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Endang Tri, salah satu guru BK SMKN 4 Madiun, sebagai berikut :

”Ketika memasuki tahap seleksi, biasanya ada beberapa dunia usaha/industri yang mengajukan persyaratan khusus terhadap siswa-siswi SMKN 4 Madiun untuk melaksanakan prakerin di tempat yang bersangkutan. Misalnya, Hotel Merdeka Madiun meminta siswa-siswi SMKN 4 Madiun yang akan prakerin di situ, diutamakan bagi yang memiliki postur tubuh tinggi. Hal ini disesuaikan dengan standart karyawan hotel saat ini” (tanggal 29 Oktober 2008 pukul 08.00 WIB).

Apabila tidak memenuhi persyaratan yang diajukan pihak industri yang bersangkutan, maka para calon siswa prakerin yang mendaftar di sekolah belum bisa melaksanakan prakerin di industri yang bersangkutan. Pada tahap seleksi ini, diharapkan ada informasi dari pihak sekolah tentang persyaratan khusus dari dunia usaha/industri terkait calon siswa prakerin sejak awal kepada peserta didik yang memasuki kelas XI. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa berpikir

sekaligus mempersiapkan diri untuk mencari informasi dunia usaha/industri yang sesuai dengan bidang dan keahlian individu. Sehingga ketika mendaftar, mereka mantap dengan pilihannya tanpa ada hambatan persyaratan dari industri yang bersangkutan selama proses seleksi.

Penempatan dan pembekalan. Setelah dilakukan seleksi oleh pihak sekolah, tahap selanjutnya adalah penempatan dan pembekalan bagi siswa-siswi yang akan melakukan prakerin. Pembekalan dari berbagai pihak yang meliputi sekolah dan badan dari luar sekolah yang memberikan motivasi, gambaran, arahan, dan tantangan berada di dunia kerja. Pembekalan ini diperlukan siswa-siswi agar selama berada di tempat kerja tetap fokus dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang demi kebaikan mereka sendiri. Penting untuk menyampaikan kepada peserta didik yang akan berangkat prakerin selalu disiplin demi menjaga nama baik sekolah, karena selain kualitas individu dalam bekerja yang dinilai oleh pihak industri, latar belakang sekolah peserta didik juga turut mempengaruhi. Kebudayaan sekolah yang melekat dalam diri peserta didik seperti hanya mendengar dan mencatat sewaktu guru menerangkan, kemudian bersendau gurau dengan teman sekelas sebaiknya juga dihilangkan. Karena kebudayaan di tempat kerja tidak sama dengan kebudayaan selama mereka di sekolah. Mereka tidak bisa lagi bersantai-santai karena resiko kegagalan dalam mutu hasil pekerjaan bisa fatal. Dan peserta didik yang berada pada lingkungan pekerjaan baru biasanya dituntut untuk memanfaatkan batas waktu, melampaui *delivery time* yang berarti *cost* bagi industri yang bersangkutan, tidak seperti budaya di sekolah yang tidak mengukur kegagalan maupun keterlambatan sebagai *cost*.

Pemberangkatan. Pada tahap selanjutnya, siswa-siswi prakerin diberangkatkan disertai guru pembimbing untuk mengantarkan mereka sampai di tempat tujuan. Agar kondisi psikis bagi siswi perempuan khususnya yang melaksanakan prakerin di luar kota tidak *down*, maka sebaiknya orang tua juga turut memberikan dukungan moril karena ini merupakan salah satu sarana latihan kemandirian bagi mereka selama berada di tempat kerja.

Prakerin. Setelah sampai di tempat tujuan, para siswa mulai ditempatkan sesuai dengan pembagiannya dan dapat melakukan segala aktivitas seputar dunia kerja di tempat prakerin (bisa di sekolah ataupun di luar sekolah).

Selama melaksanakan prakerin, siswa menyesuaikan cara bekerja dengan dunia usaha/industri yang bersangkutan karena masing-masing industri mempunyai cara yang berbeda-beda. Para siswa tadi umumnya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sehari-hari. Sebagaimana pernyataan dalam questioner yang diajukan peneliti terhadap siswa kelas XII program keahlian Restorant :

”Selama saya melaksanakan prakerin di Hotel Inna Simpang Surabaya, saya banyak mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut. Saya membantu karyawan dalam kegiatan menyajikan hidangan, membantu *prepare* bahan untuk para koki ketika mereka akan memasak, saya juga membantu *prepare* area sebelum acara dimulai. Ketika ada acara tertentu saya juga disuruh mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan terlibat dalam *service* tamu.” (tanggal 17 November 2008, pukul 10.00 WIB).

Selama prakerin berlangsung guru pembimbing melakukan monitoring terhadap kondisi siswa-siswinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Siswa diberi lembar monitoring yang berisi kegiatan siswa selama prakerin di tempat kerja. Begitu pula dengan industri juga memberikan penilaian pada daftar nilai pelatihan siswa prakerin menyangkut kedisiplinan, kesesuaian, kreativitas dan hasil kerja mereka selama prakerin berlangsung. Pada tahap ini, hendaknya peserta didik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperdalam pekerjaan sesuai bidang keahliannya dan juga menumbuhkan etos kerja agar mereka tidak kaget ketika memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Karena bagaimanapun budaya di sekolah berbeda dengan budaya di dunia kerja. Ini merupakan salah satu fasilitas yang menarik ketika kita mengenyam pendidikan di SMK karena di SMA tidak diberikan.

Penjemputan (kembali ke sekolah). Setelah waktu yang ditentukan habis, maka pihak sekolah memulangkan siswa prakerin dengan menjemput mereka dari tempat kerja. Setiap siswa wajib membawa lembar penilaian yang telah diisi oleh pihak industri yang bersangkutan dan akan dievaluasi oleh pihak sekolah sebagai akumulasi nilai saat kelulusan nanti.

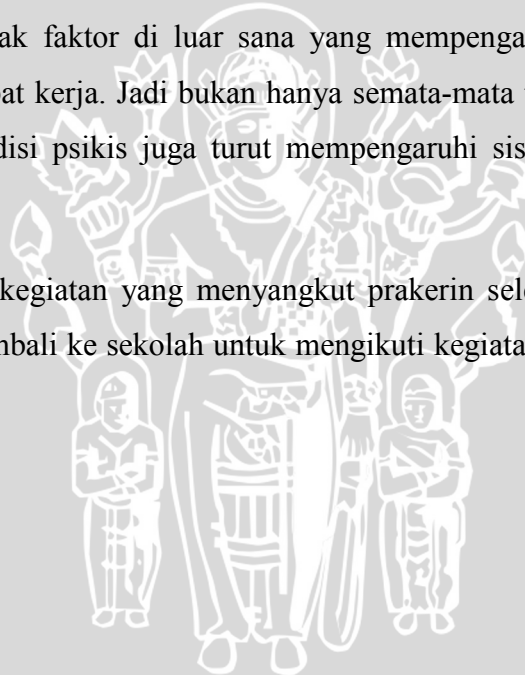
Evaluasi dan pembuatan laporan. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan pembuatan laporan selama prakerin berlangsung. Evaluasi dilakukan dari berbagai sumber mulai dari daftar hadir, daftar nilai, daftar jurnal dan daftar lembar monitoring. Nilai dari industri diserahkan kepada guru yang bersangkutan

untuk kemudian diakumulasikan dari seluruh sumber penilaian. Seperti keterangan Bangkit salah satu siswa kelas XI Restorant dalam questionner, :

Setelah kita selesai melaksanakan prakerin, ada beberapa pihak industri yang melakukan semacam uji kompetensi untuk mengukur seberapa tingkat kephahaman kita terhadap pekerjaan yang selama ini kita praktekan dan nilainya akan ditindak lanjuti bersama-sama dengan sekolah sebagai akumulasi nilai akhir yang menentukan kelulusan. (tanggal 17 November 2008, pukul 10.20 WIB).

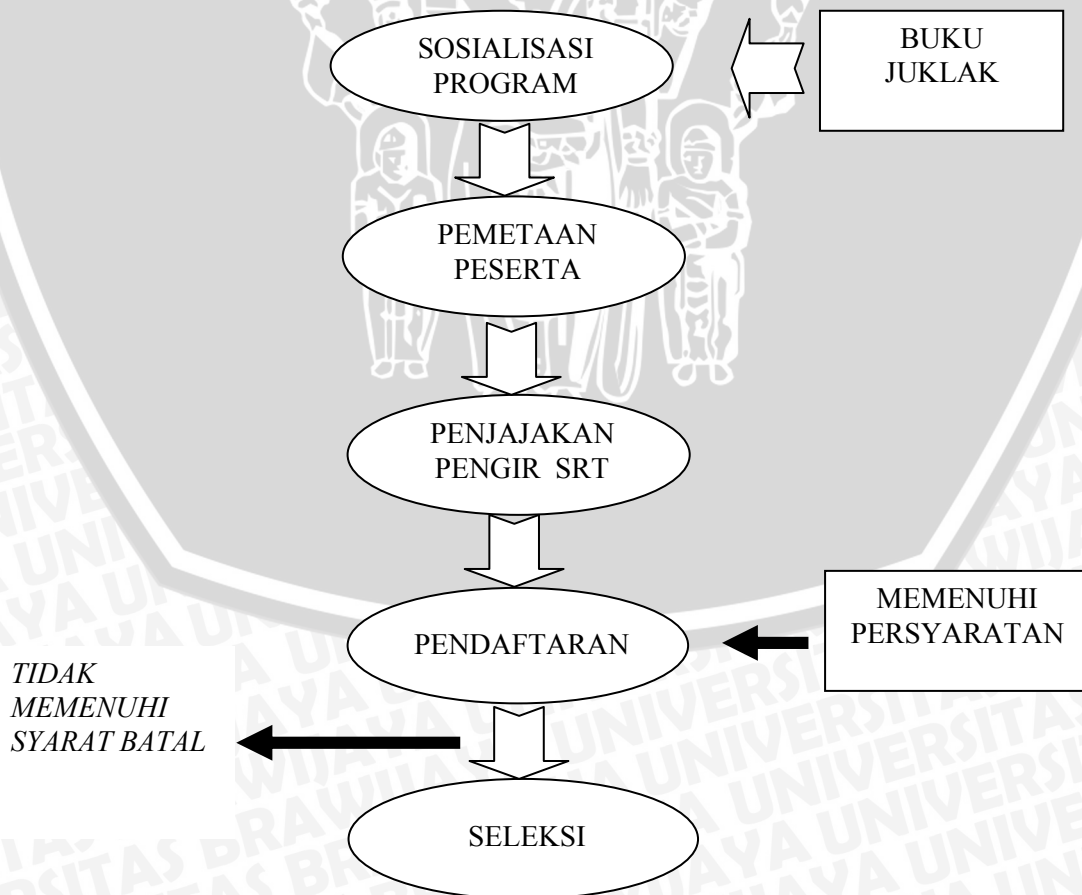
Sebaiknya dalam proses evaluasi ini, guru juga melibatkan siswa, karena bagaimanapun juga subyek dari kebijakan Pendidikan Sistem Ganda ini adalah seluruh siswa SMKN 4 Madiun khususnya yang duduk di kelas XI dan XII. Jadi, siswa juga merasa bahwa evaluasi yang dilakukan oleh guru mereka berdasarkan apa yang terjadi di lapangan bukan hanya melihat pada nilai yang diberikan industri. Karena banyak faktor di luar sana yang mempengaruhi kinerja siswa selama berada di tempat kerja. Jadi bukan hanya semata-mata tingkat kredibilitas siswa saja tetapi kondisi psikis juga turut mempengaruhi siswa dalam praktek kerja.

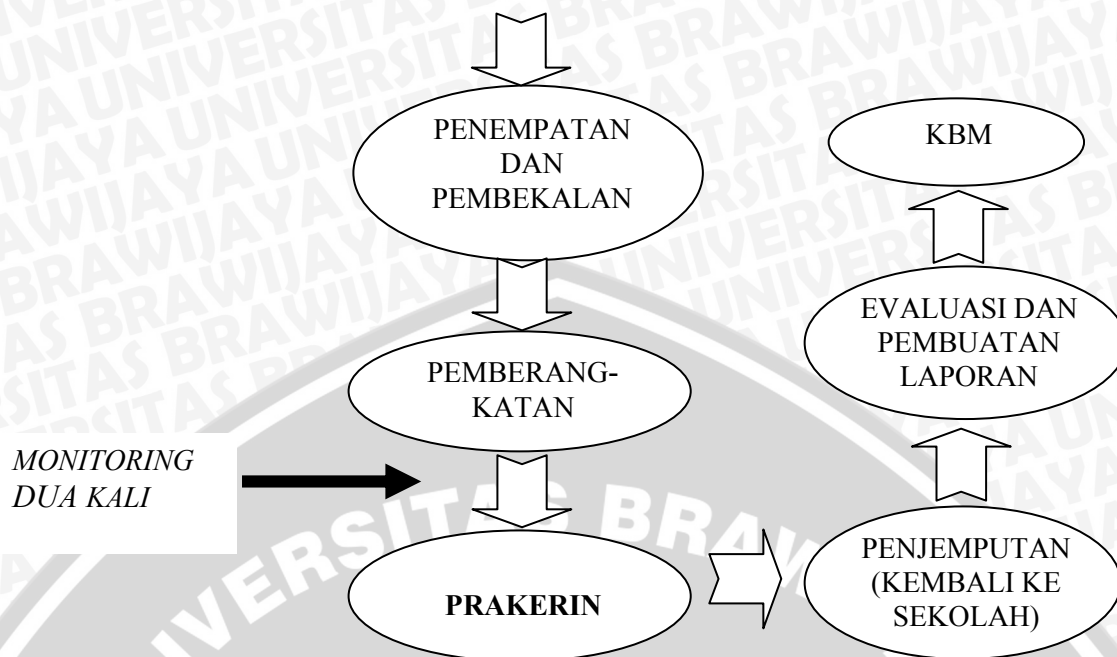
KBM. Setelah semua kegiatan yang menyangkut prakerin selesai, maka peserta didik harus masuk kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti semula.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Gambar 6 :
Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri**





Sumber : Dokumentasi BKK SMKN 4 Madiun.

b. Faktor yang mendukung implementasi PSG dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4 Madiun

Agar kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung implementasi PSG guna meningkatkan kualitas pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun antara lain :

- 1) Peningkatan Pemberian Pelayanan Pendidikan, yang meliputi :
 - a. Memberikan fasilitas dan pendidikan yang relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini.

Dalam kegiatan belajar mengajar, selain ada mata pelajaran teori, peserta didik juga harus bisa praktek untuk menyempurnakan ilmu yang didapat. Untuk bisa praktek peserta didik membutuhkan fasilitas yang mendukung mereka dalam menghubungkan teori yang ada dengan kenyataannya. Jadi sekolah harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun. Berdasarkan observasi peneliti jumlah maupun sarana dan prasarana yang digunakan peserta didik untuk praktek masih minim dan belum mencukupi standart industri. Tetapi guru pembimbing selalu kreatif dan berpikir keras agar fasilitas yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin untuk

kepentingan peserta didiknya. Selama ini peserta didik tidak pernah mengeluh dikarenakan keterbatasan fasilitas tadi. Justru menurut mereka fasilitas yang ada sudah dapat mencukupi kebutuhan untuk praktek di sekolah. Sebagaimana pernyataan dari beberapa siswa SMKN 4 Madiun dalam wawancara dan quessioner yang diajukan peneliti terhadap siswa kelas XII Restorant :

”Sebagai murid SMKN 4 Madiun, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kami dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan ketika melaksanakan praktek di sekolah. Tetapi saya berharap pihak sekolah dapat memperbaiki fasilitas yang ada untuk mendukung proses pembelajaran yang orientasinya pada peningkatan kualitas pendidikan” (17 November, pukul 10.15 WIB).

Setiap program keahlian disediakan ruangan praktek sendiri dari pihak sekolah, jadi jika para peserta didik tersebut melaksanakan prakerin di sekolah maka fasilitas yang ada sudah dapat mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan seperti berada dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk program keahlian Akomodasi Perhotelan telah disediakan ruangan yang standart hotel, untuk Tata Kecantikan disediakan ruangan yang standart salon, begitu pula dengan 2 program keahlian lainnya Restorant dan Tata Busana. Sebagaimana observasi peneliti saat di SMKN 4 Madiun, terdapat salon yang dibuka untuk umum di pintu masuk dan sudah dilengkapi peralatan salon yang memadai, harganyaapun terjangkau untuk umum. Biasanya yang datang dari kalangan siswa dan guru SMKN 4 sendiri pada jam istirahat/lepas.

b. Pengembangan program komputerisasi dan Teknologi Informasi.

Untuk mengakomodir pembelajaran yang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi, maka pola pembelajaran harus didukung oleh program komputerisasi dan Teknologi Informasi yang memadai. SMKN 4 Madiun telah mengaplikasikan program komputerisasi kepada setiap peserta didik mulai dari kelas X. Ruangan untuk lab komputer dapat terisi lebih dari 30 siswa. Ruangan tersebut juga dilengkapi dengan internet untuk memfasilitasi peserta didik *browsing* situs-situs yang dapat menambah daya imajinasi dan kreativitas

mereka sehubungan dengan bidang yang mereka tekuni. Hal ini juga sebagai upaya SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di dalam lingkungan sekolah.

c. Program kunjungan industri.

Program kunjungan industri merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak peserta didik kelas X (pada tahun pertama). Hal ini juga termasuk pemberian pelayanan dari sekolah yang tujuannya agar peserta didik sudah bisa mendapatkan gambaran seputar dunia kerja sejak dini. Karena sejalan dengan kegiatan belajar mengajar, implementasi PSG di sekolah merupakan bentuk kerja sama antara sekolah dengan dunia usaha/industri dalam memberikan materi pendidikan. Program ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menyiapkan diri lebih awal untuk memilih tempat kerja dan keahlian apa saja yang harus dimiliki jika suatu saat ingin bekerja di tempat tersebut. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Samar, salah satu guru prakerin SMKN 4 Madiun, sebagai berikut :

“Salah satu kebijakan sekolah bagi peserta didik khususnya kelas X adalah adanya program kunjungan industri yang wajib diikuti peserta didik dan didampingi oleh guru pembimbing. Salah satu tujuan dari program ini adalah memberikan gambaran bagi peserta didik tentang dunia kerja yang sesungguhnya agar ke depannya mereka tidak mengalami kesulitan ketika praktek di sekolah. Selama kunjungan industri peserta didik diperbolehkan untuk mengamati, berinteraksi dan mengajukan pertanyaan” (tanggal 30 Oktober pukul 09.30 WIB).

d. Pelayanan dan peningkatan peran guru pengajar, terutama peran guru Bimbingan Konseling.

Satu kali dalam seminggu selama 1 jam pelajaran, guru BK mengajar dalam kelas. Materi yang diberikan berguna untuk memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal serta membantu peserta didik agar mampu menghadapi segala permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkembangannya. Oleh karena itu, guru pelajaran harus senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru BK secara rutin dan berkesinambungan. Selain itu BK juga memberikan pelayanan konseling setiap waktu. Atas inisiatif sendiri, peserta didik

mendatangi ruangan guru BK untuk meminta layanan pendidikan, ada juga yang menceritakan masalah pribadi mereka yang bisa menghambat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Fungsi BK ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tersedianya ruang konseling untuk memberikan kenyamanan dan menjaga *privacy* peserta didik yang berkonseling. Dengan demikian BK juga berperan untuk memberikan pelayanan psikologis dalam menunjang implementasi PSG di SMKN 4 Madiun. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Endang Tri, salah satu guru BP SMKN 4 Madiun dalam wawancara :

“Dalam hal pemberian pelayanan pendidikan di SMKN 4 Madiun, peranan BK sangat penting. Guru BK berperan sebagai partner guru dalam penilaian aspek afektif siswa dan membantu dalam memberikan motivasi terhadap seluruh siswa selama proses pendidikan. Kami sering memberikan konseling kepada mereka demi mendorong semangat belajar mereka. Tanpa diminta pun, kami siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, karena bagi kami kepuasan siswa dan keberhasilan sekolah adalah yang terpenting dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan” (tanggal 29 Oktober pukul 08.00 WIB).

Dengan adanya pelayanan pendidikan terhadap peserta didik, maka setiap kebutuhan pendidikan bagi peserta didik dapat segera direspon dan dipenuhi untuk pelaksanaan proses pendidikan. Dengan begitu, pelayanan pendidikan yang ada di SMKN 4 Madiun akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

2) Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan Warga Sekolah

Pendidikan Sistem Ganda adalah upaya untuk membentuk siswa agar memiliki *skill* yang kompetitif di era globalisasi di mana kualitas sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pengadaan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang efektivitas belajar perlu dilakukan untuk menampung minat dan bakat peserta didik. Berbagai prestasi akademik dan non akademik telah diraih peserta didik, hal ini membawa nama baik sekolah di tingkat lokal maupun nasional. Dengan terus mengasah berbagai bakat maupun kemampuannya melalui kegiatan ekstrakurikuler, maka peserta didik diharapkan mempunyai bekal agar lebih percaya diri untuk masuk ke dunia kerja nantinya.

Untuk pengembangan kemampuan guru sendiri, ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang diadakan di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai prestasi diperoleh baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kredibilitas guru-guru SMKN 4 Madiun tidak diragukan lagi. Bahkan ada salah satu prestasi yang diperoleh guru SMKN 4 Madiun terkait dengan seleksi calon kepala sekolah. Melalui seleksi tersebut, akan dipilih satu guru yang berkompentensi untuk bisa memimpin, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan SMKN 4 madiun dalam budang pendidikan. Hal ini juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di SMKN 4 Madiun.

Dalam beberapa kesempatan, pihak sekolah juga mendatangkan beberapa praktisi dari luar lingkungan sekolah. Misalnya untuk program keahlian Tata Kecantikan, ada beberapa praktisi yang datang ke sekolah untuk memberikan pengetahuan seputar kecantikan dan biasanya peserta didik sangat tertarik untuk mengikuti. Praktisi tersebut berasal dari berbagai hotel yang ada di dalam maupun luar kota. Melalui program ini, maka diharapkan peserta didik mempunyai pengetahuan yang beragam seputar bidang pekerjaan yang sedang digeluti ketika mereka di sekolah. Cara ini sangat efektif bagi peserta didik mengingat mereka sangat membutuhkan banyak informasi seputar dunia kerja yang akan mereka masuki nantinya.

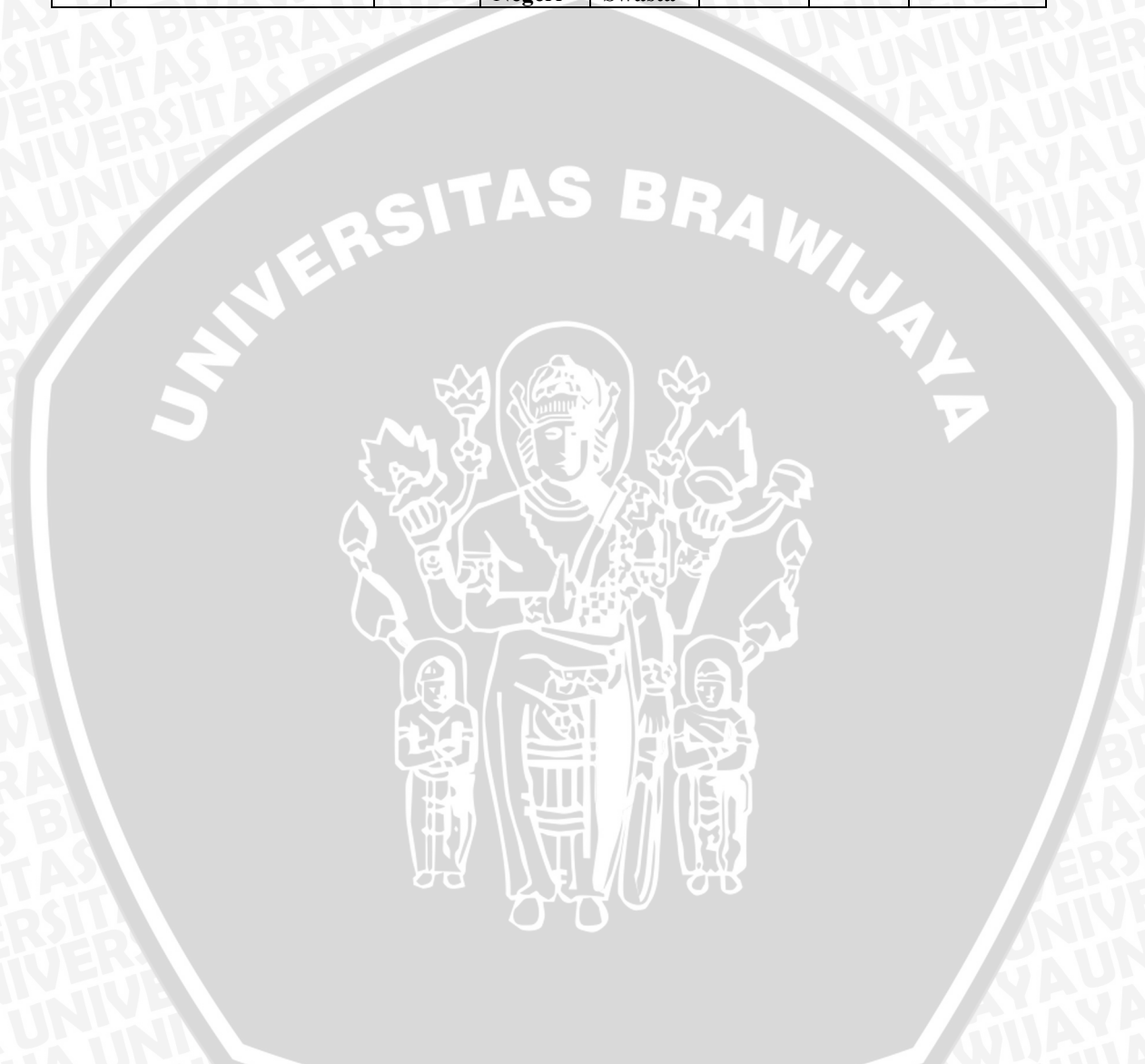
c. Output yang diharapkan dari implementasi PSG di SMKN 4 Madiun

Output yang diharapkan dari implementasi PSG di SMKN 4 Madiun ini sebenarnya tercantum dalm misi sekolah yaitu : menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menjadi aset bangsa yang berakhlak, berbudi pekerti, berwawasan dan berkemampuan untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan menghasilkan tenaga yang kreatif, adaptif dan produktif sesuai dengan bidang keahliannya. Pihak sekolah juga berperan sebagai katalisator terhadap industri yang membutuhkan. Sebagaimana pernyataan dari salah satu guru prakerin, Bapak Samar dalam wawancara :

”Harapan sekolah ini ke depannya adalah agar para lulusannya bisa terserap dunia usaha/industri lebih maksimal lagi. Seperti jurusan Tata Kecantikan selama 4 tahun ini pasti terserap dunia kerja. Sedangkan jurusan Tata Boga, Tata Busana, Akomodasi Perhotelan rata-rata 70%.

Ada peningkatan dari tahun ke tahun terhadap keterserapan lulusan SMKN 4 Madiun. Industri juga datang ke SMKN 4 Madiun untuk meminta lulusan yang siap kerja dan memiliki kompetensi yang memadai, dengan persyaratan tertentu dan biasanya dipasang di papan pengumuman ruang kesekretariatan prakerin, agar siswa bisa cepat mendapat informasi tentang

No	Program Keahlian	Jumlah lulu-	Studi Lanjut		Peru- sahan /	Mandi ri/	Masa Tung-gu/
			Negeri	Swasta			



lowongan pekerjaan. Untuk 30% siswa lainnya sebenarnya bukan tidak ada tempat tetapi justru hambatannya adalah kesiapan mereka sendiri untuk siap bekerja setelah tamat. Karena ada sebagian yang masih berat untuk meninggalkan kota asalnya dan lain-lain” (Jumat, 14 November 2008, 09.30 WIB).

		san			Pabrik	Swasta	Lain-Lain
Tahun Pelajaran 2003/2004							
1	Tata Boga	94	0	8	18	61	9
2	Tata Busana	98	0	9	58	8	23
3	Tata Kecantikan Rambut	26	0	1	25	0	1
Tahun Pelajaran 2004/2005							
1	Tata Boga	100	8	3	50	5	37
2	Tata Busana	103	0	0	50	17	34
3	Tata Kecantikan Rambut	22	1	0	18	3	0
Tahun Pelajaran 2004/2005							
1	Tata Boga	96	11	2	17	4	66
2	Tata Busana	92	0	2	68	6	19
3	Tata Kecantikan Rambut	27	2	8	12	1	8
Tahun Pelajaran 2006/2007							
1	Akomodasi Perhotelan	30	1	0	10	3	16
2	Tata Boga	55	3	0	20	4	28
3	Tata Busana	102	4	0	32	15	51
4	Tata Kecantikan Rambut	25	2	0	12	7	4
Tahun Pelajaran 2007/2008							
1	Akomodasi Perhotelan	32	0	2	10	10	10
2	Tata Boga	64	0	4	11	9	40
3	Tata Busana	96	3	9	36	15	33
4	Tata Kecantikan Rambut	37	0	5	0	15	17

Tabel 7 :

**DATA PENELUSURAN TAMATAN DAN KETERSERAPAN SISWA
SMKN 4 MADIUN**

Sumber : Dokumentasi SMKN 4 Madiun

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat keterserapan siswa-siswi lulusan SMKN 4 Madiun dari tahun ke tahun terhadap dunia kerja (lihat kolom 6 dan 7) melebihi jumlah siswa-siswi yang berada pada masa tunggu (lihat kolom 8). Pada

tahun pelajaran 2005/2006 jumlah lulusan SMKN 4 Madiun yang terserap perusahaan maupun swasta yaitu 108 orang, sedangkan yang masih dalam masa tunggu dan lain-lain adalah 93 orang. Pada tahun pelajaran 2006/2007 jumlah lulusan SMKN 4 Madiun yang terserap perusahaan maupun swasta yaitu 103 orang, sedangkan yang masih dalam masa tunggu dan lain-lain adalah 99 orang. Lalu pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah lulusan SMKN 4 Madiun yang terserap perusahaan maupun swasta yaitu 106 orang, sedangkan yang masih dalam masa tunggu dan lain-lain adalah 100 orang. Lulusan tadi tidak hanya ditempatkan perusahaan/industri di dalam kota saja tetapi juga di luar kota, karena rata-rata perusahaan mempunyai cabang di kota lain jadi membutuhkan pegawai/karyawan dari lulusan SMK termasuk SMKN 4 Madiun. Walaupun tidak seberapa signifikan selisihnya tetapi output SMKN 4 Madiun yang bekerja setelah lulus menunjukkan hasil yang baik. Hal ini membawa SMKN 4 Madiun ikut berkontribusi dalam menghasilkan output yang berdaya saing terhadap dunia kerja sekarang ini. Terbukti lulusan SMKN 4 Madiun diakui oleh dunia usaha/industri di beberapa kota, tidak hanya di kota Madiun saja, karena pihak industri melihat kualitas individunya. Sedangkan siswa-siswi SMKN 4 Madiun yang melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya rata-rata sedikit, karena memang dari awal siswa-siswi ini dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Siswa-siswi yang berada pada masa tunggu biasanya ada yang belum bekerja, ada yang tidak diketahui keberadaannya karena sekolah kesulitan untuk menghubungi mereka, dan ada yang sedang menunggu panggilan dari perusahaan/industri.

Berdasarkan tabel juga, pada tahun pelajaran 2004/2005 hanya dibuka 3 program keahlian/jurusan yang keseluruhan outputnya berjumlah 215 orang. Dengan jumlah segitu pihak sekolah melihat peluang bahwa sekolah menengah kejuruan jangan hanya dijadikan pilihan kedua setelah gagal masuk ke sekolah menengah umum, tetapi sekolah harus menarik minat calon siswa terhadap sekolah kejuruan. Lalu pada tahun pelajaran berikutnya, mulai dibuka program keahlian akomodasi perhotelan. Hal ini juga melihat dari banyaknya hotel yang ada di kota Madiun dan pada akhirnya juga membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Dengan begitu sampai sekarang SMKN 4 Madiun menawarkan 4 program keahlian, dan menjadi tantangan sendiri bagi SMKN 4

Madiun untuk bisa mengantarkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang produktif, dan tidak dipandang sebelah mata oleh pihak industri.

Program-program yang diadakan SMKN 4 Madiun terkait bagaimana mempersiapkan peserta didiknya setelah lulus nantinya akan mempengaruhi jumlah output yang berhasil terserap dunia kerja pada akhirnya. Jika dihubungkan dengan Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun, secara keseluruhan timbul hubungan sebab akibat. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bertujuan untuk (Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996 : 7-8) :

5. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja;
6. Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan-pelatihan kejuruan/SMK dan dunia kerja;
7. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional;
8. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Output yang dihasilkan SMKN 4 Madiun dari tahun ke tahun berhasil terserap menjadi tenaga kerja meskipun belum maksimal. Upaya untuk lebih memaksimalkan output SMKN 4 Madiun telah dilakukan pihak sekolah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas misalnya, SMKN 4 Madiun selalu membekali peserta didiknya dengan keterampilan yang mendukung dunia kerja untuk saat ini, berusaha meningkatkan kenyamanan siswa belajar di sekolah dengan stimulasi praktek didampingi guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Sedangkan dari segi kuantitas SMKN 4 Madiun berusaha menjalin kerja sama dengan lebih banyak dunia usaha/industri sebagai tempat pelaksanaan prakerin peserta didik dan dapat menjadi alternatif pilihan pekerjaan setelah kelulusan. Dengan adanya kerja sama semacam ini peserta didik mempunyai pandangan tentang jenis pekerjaan yang akan mereka pilih nantinya dan mereka dapat

menjalin hubungan baik dengan industri yang bersangkutan selama prakerin guna memunculkan *image* yang baik ketika akan melamar pekerjaan setelah mereka lulus. Didukung oleh pernyataan Bapak Janarko, sebagai Wakasek Humas SMKN 4 Madiun dalam wawancara :

”Peran dunia usaha selama proses pendidikan di SMKN 4 Madiun ini sangat mendukung. Pada tahun 2008 saja ada 45 macam dunia industri/usaha yang telah menjalin kerja sama. Selama ini memang dunia usaha/industri belum pernah memberikan kontribusi berupa peralatan praktek terhadap SMKN 4 Madiun. Tetapi, industri siap bekerja sama untuk ditempati sekaligus siap melatih peserta didik dari SMKN 4 Madiun yang ditempatkan guna menambah pengalaman dan wawasan selama mereka melaksanakan prakerin ”(tanggal 14 November, pukul 09.45 WIB).

Dunia usaha/industri di sini melihat pengalaman kerja merupakan kebutuhan dan bagian dari proses pendidikan pada sekolah kejuruan. Dengan praktek kerja industri yang harus diikuti sebagai bagian dari proses pendidikan di SMKN 4 madiun, maka seluruh siswa-siswi akan mempersiapkan dirinya dari awal dan mereka juga dapat melihat peluang kelebihan yang harus dimiliki dan kelemahan lawan untuk bersaing masuk ke dunia kerja setelah lulus nanti. Lingkungan sekolah saja kurang bisa membentuk etos kerja seseorang, maka di sini diperlukan peran masyarakat yaitu dunia usaha/industri untuk bisa memberikan pelajaran di luar pelajaran sekolah bagi seluruh peserta didik. Proses pendidikan yang semacam itu, sangat mempengaruhi output yang dihasilkan SMKN 4 Madiun.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Pendidikan Sistem Ganda yang ada di SMKN 4 Madiun membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama sekolah dan dunia usaha demi terciptanya keadaan yang diinginkan. Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh di lapangan, implementasi PSG di SMKN 4 Madiun bisa dikatakan masih belum maksimal. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan mengapa

implementasi PSG belum berjalan maksimal. Faktor penghambat itu dibedakan menjadi faktor internal yang berasal dari dalam sekolah dan faktor eksternal yang berasal dari luar sekolah.

a. Hambatan Internal

Hambatan internal yang membuat implementasi PSG di SMKN 4 Madiun belum maksimal antara lain adalah : *pertama*, faktor latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dari peserta didik. Latar belakang seseorang menentukan bagaimana orang tersebut untuk bersikap dan bergaul dengan lingkungannya. Seperti pernyataan dari Kepala sekolah SMKN 4 Madiun Bapak Liluk S.Pd. dalam wawancara :

”Salah satu hambatan implementasi PSG di SMKN 4 Madiun adalah latar belakang siswa, menyangkut masalah sosial, ekonomi dan budaya. Latar belakang pendidikan sebagian orang tua siswa adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dan *mindset* sebagian besar masyarakat kita bahwa pendidikan SMA lebih bagus dari pendidikan di sekolah kejuruan. Sebagian orang tua siswa menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pilihan alternatif apabila putra-putrinya tidak diterima di Sekolah menengah Atas (SMA). Hal ini mempunyai dampak terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, terutama terhadap kegiatan belajar mengajar” (Kamis, 13 November 2008, 09.00 WIB).

Melihat kondisi di atas maka pihak sekolah mempunyai tanggung jawab untuk bisa mencukupi kebutuhan pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik mulai awal mereka masuk di SMKN 4 Madiun. Tentang minimnya pengetahuan peserta didik tentang sistem pendidikan di sekolah kejuruan pada tingkat pertama, mendorong pihak sekolah harus membuat program pendidikan yang mendukung agar Pendidikan Sistem Ganda bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh peserta didik.

Hambatan yang *kedua* berasal dari diri guru SMKN 4 Madiun. Sebagian guru masih mempunyai dinamika berpikir (*mindset*) yang cenderung merasa nyaman terhadap kurikulum lama, dan enggan ikut berpartisipasi untuk mendorong minat ataupun kreativitas peserta didiknya dalam kegiatan belajar-mengajar sesuai kurikulum pendidikan yang menjamin mutu dan kebutuhan masyarakat, padahal sekolah sudah menetapkan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2006 (KTSP). Dengan pola berpikir yang tidak mengarah pada perubahan dan pembaharuan, maka

sebagian guru masih pasif dalam proses pendidikan yang berusaha secara kreatif dalam mencetak peserta didik menjadi tenaga profesional di bidangnya. Hal ini membuat implementasi PSG belum maksimal di SMKN 4 Madiun. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Samar, salah satu guru prakerin di SMKN 4 Madiun dalam wawancara :

”Salah satu hambatan implementasi PSG di SMKN 4 Madiun adalah kecenderungan berpikir/mindset beberapa guru yang masih lama dan hanya mengikuti program-program sekolah tanpa ada inisiatif untuk peka terhadap kebutuhan peserta didik (tanggal 30 Oktober 2008 ,09.00 WIB”.

Hambatan yang *ketiga* adalah belum tersedianya jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standart industri. Hal ini turut diungkapkan salah satu guru prakerin SMKN 4 Madiun, Bapak Samar :

”Sarana dan prasarana bisa dikatakan cukup mesti belum standart, karena merupakan sarana dan prasarana yang sudah lama didukung dan diberikan oleh kantor pemerintah yang ada di Kota Madiun. Belum mencukupi kebutuhan siswa seluruhnya” (tanggal 30 Oktober 2008 ,09.00 WIB).

Berdasarkan kondisi tersebut, guru SMKN 4 Madiun harus mampu mengakomodir seluruh peserta didik dalam memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai kebutuhan pendidikan. Sehingga dengan kekurangan fasilitas tersebut, tetap dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar sesuai silabus dan kurikulum yang berlaku. Untuk meningkatkan pola berpikir guru yang mengedepankan kualitas peserta didiknya selama proses belajar sehingga dapat terbentuk output yang diharapkan, maka guru juga harus tanggap terhadap kebutuhan peserta didiknya dan tidak membatasi kreativitas mereka. Guru jangan terkekang dengan budaya lama yang semua perencanaan dan pelaksanaan sudah ditetapkan kurikulum dari pusat, sehingga sekolah hanya mengikuti saja, tetapi peran guru di sini sangat penting mengingat pikiran, ide, gagasan dan tenaga mereka dibutuhkan untuk kemajuan peserta didik.

b. Hambatan Eksternal

Selain hambatan internal di atas dalam rangka implementasi PSG di SMKN 4 Madiun juga menemui hambatan eksternal yang turut mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar antara seluruh komponen di SMKN 4 Madiun. Hambatan eksternal tersebut antara lain adalah : *pertama*, adalah kebijakan

pemerintah dalam rangka anggaran pendidikan di Indonesia. Dengan hanya mengandalkan dana pendidikan dari pemerintah, yaitu 20% dari APBN, untuk memenuhi program-program pendidikan di SMKN 4 Madiun, tidaklah memenuhi. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Endang Tri, salah satu guru prakerin di SMKN 4 Madiun :

”Anggaran pendidikan yang hanya 20% untuk seluruh kepentingan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah jelas sekali sangat tidak memenuhi. Hal ini merupakan hambatan bagi SMKN 4 Madiun untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik dalam rangka implementasi PSG. Selama ini, bantuan pemerintah dari segi fisik misalnya sarana dan prasarana memang prosentasenya masih kecil sekali. Tetapi dari segi non-fisik pemerintah memberikan semacam lisensi dan informasi kepada dunia usaha/industri, sehingga ketika pihak SMKN 4 Madiun datang dan akan menjalin kerjasama dunia industri tadi tidak keberatan/tidak masalah. Dengan pendekatan tersebut, maka akan mempermudah prosedur dari pelaksanaan prakerin pada tahap penjajakan/pengiriman surat dari pihak sekolah terhadap dunia usaha/industri yang bersangkutan demi kepentingan peserta didik” (tanggal 31 Oktober 2008, pukul 08.00 WIB).

Maka otonomi pendidikan di sekolah-sekolah di setiap daerah harus mampu mengadakan pembiayaan pendidikan secara mandiri demi terciptanya kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan tidak ketinggalan jaman. Hal ini membuat SMKN 4 Madiun harus menyesuaikan antara anggaran yang disubsidi oleh pemerintah dalam hal pendidikan dengan seluruh program yang direncanakan untuk mendukung implementasi PSG. Keterbatasan dana merupakan masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Jika dalam pengembangan infrastruktur masalah finansial masih bisa teratasi dengan dana yang diadakan sendiri oleh sekolah, lain halnya dengan peningkatan kualitas SDM selama proses pendidikan. Kemandirian SMKN 4 Madiun dalam hal ini terlihat dari ide untuk membuka fasilitas yang ada di sekolah kepada umum. Misalnya dibuka catering makanan untuk umum. Ide ini juga melibatkan siswa dalam praktek bersama untuk memberikan *service* yang baik kepada masyarakat umum. Maka dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standart industri untuk mendukung implementasi PSG belum bisa terpenuhi sampai sekarang. Hambatan eksternal *kedua* adalah berhubungan dengan lokasi dunia usaha/industri yang ditempati siswa untuk prakerin dalam mendukung

implementasi PSG. Dalam melaksanakan prakerin sebagian siswa ditempatkan di luar kota. Berdasarkan keterangan mereka, hambatan prakerin di luar kota adalah membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk sehari-hari, dan sebagian lainnya merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka prakerin. Ditambah lagi jika para siswa tadi terganggu kesehatannya, maka mereka sulit mendapatkan perawatan segera mungkin, mengingat mereka tinggal di kota lain dan tidak ada guru pembimbing atau teman seperti di sekolah atau di rumah. Jika kondisi mereka tidak sehat, maka kegiatan siswa tadi tidak bisa maksimal dalam melaksanakan prakerin. Sebagaimana pernyataan dari Nike, salah satu siswi kelas XII program keahlian Restorant dalam wawancara:

”Ketika saya melaksanakan prakerin di Sonokembang Catering Semarang, hambatan yang saya rasakan adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk makan dan kos selama tinggal di sana. Saya juga sulit beradaptasi dengan orang-orang di tempat prakerin, tetapi banyak pengalaman yang saya dapat di sana selama 3 bulan. Dengan mengikuti prakerin di sana, berarti saya sudah mengikuti program sekolah yang terkait Pendidikan Sistem Ganda” (17 November 2008, pukul 10.15 WIB).

Hal ini tentu saja mempengaruhi penilaian industri yang bersangkutan terhadap kinerja mereka. Ketika kondisi siswa prakerin tadi terganggu, maka keterampilan dan pengetahuan seputar pekerjaan yang seharusnya mereka dapatkan juga menjadi maksimal. Melihat kondisi tersebut, maka pihak sekolah harus bisa meminimalisir hambatan di atas agar implemenatsi Pendidikan Sistem Ganda khususnya di SMKN 4 Madiun berjalan sesuai target.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan paparan teori pada bab sebelumnya, menurut Webster’s New World Dictionary (1962) pendidikan adalah ”proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya lewat persekolahan formal”. Pemahaman mengenai pendidikan mengacu pada konsep tersebut menggambarkan bahwa pendidikan memiliki sifat dan sasarannya yaitu manusia. Menurut sagala (2007 : 1-2) pendidikan dilihat dari teori secara faktual adalah aktivitas secara kelompok orang dan guru yang yang melaksanakan

kegiatan pendidikan untuk orang-orang muda dan secara perspektif memberikan petunjuk bahwa pendidikan adalah muatan, arahan, pilihan yang telah ditetapkan sebagai wahana pengembangan masa depan anak didik yang tidak terlepas dari keharusan kontrol manusia. Dari pemahaman tersebut, arah dari obyek pendidikan adalah manusia, dan setiap pendidikan memerlukan proses untuk menjadikan manusia berkembang lebih baik dan pada gilirannya dapat direncanakan suatu program pendidikan ke arah masyarakat baru yang lebih baik pula.

Melihat pemikiran di atas, berarti pendidikan adalah proses yang terus menerus yang dilakukan untuk membentuk karakter manusia tetapi tetap memperhatikan sasaran maupun tujuan tiap individu. Proses untuk memberikan pelatihan, pengembangan, pengetahuan, keterampilan terhadap sekelompok orang tersebut membutuhkan suatu lembaga pendidikan formal yang dinamakan sekolah. Pemikiran Nanang Fattah lebih meneguhkan apa yang diungkapkan oleh Sagala, persekolahan dalam pandangan Nanang Fattah (2003:1), sekolah merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan. Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan oleh orang-orang yang profesional. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan kepada pembangunan bangsa. Mendukung pernyataan tersebut, maka kebijakan pendidikan di Indonesia perlu diarahkan untuk mempersiapkan sekaligus menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Tiap sekolah wajib untuk mendukung sekaligus merealisasikan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui program-program di sekolah masing-masing. Untuk lebih memfokuskan terhadap kebutuhan masyarakat khususnya dunia usaha/industri dalam menampung tenaga kerja, maka pendidikan kejuruan merupakan salah satu solusi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidangnya. Pendidikan kejuruan pada tingkat menengah di Indonesia dikenal

dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai berikut : "pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu." sejalan dengan definisi tersebut, SMKN 4 Madiun adalah sekolah kejuruan yang mempunyai 4 program keahlian/jurusan yaitu tata Kecantikan, Tata Busana, Restorant dan Akomodasi Perhotelan. Setiap program keahlian yang ada di SMKN 4 Madiun harus peka terhadap kebutuhan pasar, sehingga dalam memadu padankan teori dengan prakteknya selalu mengikuti perkembangan jaman dalam rangka mempersiapkan peserta didiknya masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus.

Gambaran tentang Sekolah Menengah Kejuruan tidak akan lengkap tanpa adanya karakteristik khusus yang membedakannya dari Sekolah Menengah Umum. Menurut Wardiman 1998 (dalam Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006:13) karakteristik pendidikan kejuruan mempunyai ciri-ciri :

1) *Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja.* Pendidikan kejuruan yang ada di SMKN 4 Madiun memang didesain untuk mempersiapkan peserta didiknya memiliki daya saing dan terampil di bidangnya, agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk siap bekerja setelah lulus nanti. Kurikulumnya pun dipersiapkan untuk memberikan gambaran pada peserta didik dan standart kompetensi yang harus dimiliki guna memasuki dunia kerja. Pada tingkat pertama, sudah ada beberapa program sekolah seperti kunjungan industri yang dimaksudkan agar peserta didik mempunyai gambaran dan pengetahuan yang relevan tentang dunia kerja yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah pada tingkat II dan tingkat III peserta didik wajib mengikuti praktek kerja industri untuk memadupadankan teori yang didapat dengan kenyataannya di dunia kerja, dibantu oleh guru pembimbing dan dinilai.

2) *Pendidikan kejuruan didasarkan atas "demand driven" (kebutuhan dunia kerja).* Sistem pembelajaran di SMKN 4 Madiun didasarkan pada peluang dan kebutuhan pasar. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara sekolah dengan

industri/perusahaan terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan beberapa program yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan/praktek kejuruan program keahlian Restoran juga menyesuaikan dengan kebutuhan rumah makan saat ini. Misalnya peserta didik harus mampu mempersiapkan *table manner* yang inovatif, rapi, dan indah secara kreatif untuk menarik perhatian konsumen dan memberikan *service* yang memuaskan. Peserta didik juga harus membekali dirinya dengan menu makanan yang sedang digemari pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga, masyarakat akan menilai dan memberikan *feedback* kepada sekolah untuk dijadikan bahan evaluasi.

3) *Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi.* Di era global, semua serba cepat dimana penguasaan informasi dan teknologi merupakan hal yang paling penting untuk dijadikan senjata bagi suatu negara agar tidak terjajah oleh bangsa lain. Pengetahuan global merupakan sumber informasi bagi suatu negara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus berpacu dalam segala hal, termasuk kualitas sumber daya manusianya jika tidak ingin tertinggal dari negara lain. Pendidikan kejuruan menuntut peserta didik untuk mampu mengoperasionalkan peralatan-peralatan praktek sesuai standart industri/perusahaan yang seba canggih. Karena hanya pandai dalam hal teori saja tidak cukup, apalagi pendidikan kejuruan sangat mengedepankan *learning by doing*, yang artinya belajar sambil mempraktekkan. Berdasarkan observasi peneliti selama di SMKN 4 Madiun, peralatan yang digunakan peserta didik ketika praktek juga tidak terlalu kuno dan disesuaikan dengan kebutuhan industri meski belum maksimal dalam hal pengadaannya karena terbentur masalah minimnya anggaran dari pemerintah. Tetapi dengan peralatan yang ada sangat membantu siswa untuk mendapatkan gambaran tentang dunia kerja agar mereka lebih mempersiapkan diri dari awal.

4) *Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum.* Salah satu keistimewaan pendidikan kejuruan di SMK adalah adanya kebijakan PSG yang menuntut peserta didik untuk bisa belajar di dua tempat, sekolah dan industri demi mempersiapkan

peserta didiknya untuk masuk dunia kerja setelah lulus nanti. Dengan begitu, maka pendidikan kejuruan harus mampu menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung implementasi kebijakan PSG dengan biaya operasional yang tidak sedikit. Pengadaan alat tersebut juga sebagai bahan investasi yang tidak sekali pakai dan dapat digunakan untuk peserta didik pada tahun berikutnya. Untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan/fasilitas tersebut, maka pihak sekolah juga harus menyediakan biaya operasional yang tidak dapat mengganggu biaya pokok sekolah, hal ini memerlukan kerja sama antara seluruh komponen sekolah dalam membuat perencanaan biaya pendidikan.

Sejalan dengan itu, pendidikan kejuruan di Indonesia memerlukan standarisasi. Dalam H.A.R. Tilaar (2006 : 75-77) standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi. Dunia dewasa ini telah merupakan suatu kampung global sehingga satu negara tidak dapat bersembunyi lagi. Di dalam kehidupan global terjadi persaingan yang semakin lama semakin tajam, oleh sebab itu setiap warganegara perlu mengangkat dirinya sendiri di dalam kehidupan yang penuh persaingan. Salah satu yang termasuk sistem pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan adalah Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Dengan Pendidikan Sistem Ganda, siswa belajar di dua tempat, sekolah dan industri. Agar terwujud suatu kondisi yang dicita-citakan, maka PSG harus dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun membutuhkan peran aktif seluruh pihak sekolah, masyarakat khususnya dunia usaha/industri dalam memberikan materi kepada peserta didik.

Untuk mendukung agar implementasi PSG di SMKN 4 Madiun dapat berjalan dengan baik maka ada beberapa faktor yang menjadi komponennya yaitu Institusi Pasangan, Progam Pendidikan dan Pelatihan Bersama, Kelembagaan Kerjasama, Nilai Tambah dan Jaminan Keberlangsungan. Ada beberapa komponen Pendidikan Sistem Ganda (Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996 : 8) yaitu :

a. Institusi Pasangan

Pendidikan Sistem Ganda hanya mungkin dilaksanakan apabila terdapat kerjasama dan kesepakatan antara institusi pendidikan pelatihan kejuruan (dalam

hal ini SMK) dan institusi lain (industri/perusahaan/ instansi lain yang terkait dengan lapangan kerja). Berdasarkan data yang didapat peneliti dan hasil wawancara selama berada di SMKN 4 Madiun, sudah terdapat lebih dari 40 dunia usaha/industri yang bekerja sama untuk menempatkan peserta didik melaksanakan prakerin. Peran institusi pasangan di sini adalah sebagai tempat yang digunakan peserta didik untuk bekerja langsung secara terprogram dalam situasi yang sebenarnya untuk mencapai tingkat keahlian dan sikap kerja profesional. Contoh institusi pasangan yang bekerja sama dengan SMKN 4 Madiun program keahlian Restoran antara lain : Inna Simpang Surabaya, Rumah Makan Menggo Terrace di Surabaya, Hotel Tugu di Malang, Catering Sono Kembang Malang, Club Bali Madiun, Rumah Sakit Umum Madiun, Imelda Bakery Magetan, Catering Rovita Madiun, Catering Lutfi Madiun dan lain-lain. Seluruh peserta didik yang telah memasuki tahun kedua (kelas XI) dan pada semester ganjil diwajibkan mengikuti program prakerin sebagai implementasi dari PSG dan akan ditempatkan pada salah satu industri/perusahaan yang telah bersedia untuk ditempati sebagai lahan praktek kerja yang sesungguhnya selama 6 bulan.

b. Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama

Program pendidikan di SMK yang terdiri dari komponen normatif, komponen adaptif, dan komponen pendidikan dan pelatihan kejuruan pada dasarnya merupakan program bersama antara SMK dan pasangannya. Dalam PSG, isi program tersebut dibahas dan disepakati bersama termasuk cara penyelenggaraan, bagian mana yang diselenggarakan di sekolah dan bagian mana yang diselenggarakan di industri/perusahaan. Perlu disepakati isi atau materi pendidikan dan pelatihan apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk dapat menguasai kemampuan-kemampuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian terhadap guru SMKN 4 Madiun, pengaruh dunia usaha/industri terhadap kurikulum di sekolah adalah dengan adanya kurikulum implementasi. Peran dunia usaha/industri di sini adalah membicarakan kurikulum yang relevan dengan keperluan dan peluang pasar saat ini, tentu saja harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Misalnya bagi peserta didik program

keahlian Tata Busana di SMKN 4 Madiun, mereka dituntut untuk minimal mengetahui tentang pengetahuan mesin, bahan dan alat jahit, bordir dasar dan desain motif bordir. Karena hal ini merupakan bekal mereka ketika melaksanakan prakerin yang bagi pihak industri dinilai semuanya sudah dapat dikerjakan sendiri dengan baik dan benar. Untuk tingkat kreativitasnya, hal ini tergantung pada tiap individu dalam tahap produksi. Standart kompetensi yang diberikan pihak sekolah bagi peserta didiknya merupakan ukuran yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama masa sekolah. Dan penilaiannya pun harus berdasarkan standart kompetensi tadi, baik dari segi teori maupun praktek.

c. Kelembagaan kerjasama

Organisasi tingkat pusat yang membawahi pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia disebut Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, tingkat wilayah disebut Majelis Kejuruan Propinsi, dan tingkat sekolah disebut Majelis Sekolah. Tugas MPKN antara lain merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan implementasi sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan. Tugas MKP antara lain merumuskan dan mengajukan rekomendasi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk dilaksanakan di propinsi yang bersangkutan. Sedangkan tugas dari MS adalah mengkoordinasikan kegiatan penyesuaian materi pendidikan di sekolah dan institusi pasangannya (industri/perusahaan), memonitor pelaksanaan PSG, baik di SMK maupun di institusi pasangannya (dunia usaha/industri). Masing-masing majelis memiliki peran dan tanggung jawab untuk memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. Majelis Sekolah mempunyai susunan organisasi berikut tugas anggotanya dalam mengarahkan ataupun membimbing pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di SMK pada rapat kerja yang diselenggarakan secara rutin. Dengan begitu, maka kebijakan PSG di SMKN 4 Madiun mempunyai arah yang jelas dan tidak melewati batas-batas yang telah disepakati bersama dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian siswanya.



d. Nilai tambah dan insentif

Dengan adanya PSG maka diharapkan terdapat nilai tambah bagi kedua belah pihak (sekolah dan industri). Bagi sekolah misalnya kebijakan PSG ini

dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi perkembangan peserta didiknya, menambah pengalaman dan pengetahuan seputar dunia kerja, serta dapat memanfaatkan industri sebagai lahan untuk praktik keahlian produktif. Bagi dunia usaha/industri yang bersangkutan, melihat SMKN 4 Madiun sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai sumber daya manusia terampil di bidangnya dan sesuai kebutuhan pasar. Bukan tidak mungkin bagi pihak industri untuk mengambil lulusan SMKN 4 Madiun yang memang berkompeten dilihat dari cara kerja mereka selama melaksanakan prakerin di industri/perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari banyaknya pamflet yang dipasang di dinding maupun ruang kesekretariatan prakerin di SMKN 4 Madiun yang berisi lowongan pekerjaan dari dunia kerja. Dapat dikatakan bahwa kebijakan PSG merupakan sarana SMK dalam menghasilkan output yang berdaya saing dan siap kerja karena selama 3 tahun masa sekolah, sistem pendidikannya dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber di SMKN 4 Madiun, model pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun hampir sama seperti pada gambar model PSG di SMK (Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional, 1996 : 14) :

I	II	III
(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(3c)
(3a)	(3a)	
(3b)	(3b)	

Keterangan :  Sekolah  Dunia Usaha/industri

- (3) Kemampuan Normatif (pembentukan watak)
- (4) Kemampuan Adaptif (bekal pengembangan diri)
- (3a) Teori Kejuruan
- (3b) Praktik Dasar Kejuruan
- (3c) Praktik Keahlian Produktif

Keterlibatan dunia usaha/industri dimulai sejak tahun pertama, yaitu untuk menangani kemampuan dasar peserta didik di samping teori yang diberikan di sekolah. Tetapi ada yang berbeda pada implementasi PSG di SMKN 4 Madiun. Jika pada gambar di atas kemampuan produktif sepenuhnya diberikan pada tahun ketiga di dunia usaha/industri, lain halnya dengan di SMKN 4 Madiun. Kemampuan produktif diberikan pada tahun kedua semester ganjil dan pada tahun ketiga semester awal dan programnya disebut prakerin (praktek kerja industri). Siswa sudah diperbolehkan kerja produktif pada tahun kedua dengan pertimbangan untuk dapat segera memadupadankan antara teori yang diterima di sekolah dengan bekerja langsung pada industri yang bersangkutan. Industri dapat memberikan pengetahuan maupun *skill* secara langsung sesuai dengan bidang peserta didik di sekolah.

a. Prosedur Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMKN 4 Madiun

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan kejuruan yang mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini dunia usaha/industri untuk bersama-sama memberikan pelatihan ataupun penguasaan keahlian bagi peserta didik untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Van Meter dan Van Horn dalam bukunya Wahab (2005 : 64-65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Mengacu pada pemikiran tersebut, implementasi PSG di SMKN 4 Madiun merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik, dibimbing oleh guru dan dibantu oleh dunia usaha/masyarakat yang dikenal dengan sebutan prakerin (praktek kerja industri), yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus. Peran dunia usaha/industri ketika siswa melaksanakan prakerin sebagai implementasi dari PSG adalah menjadi wadah siswa-siswi untuk latihan bekerja dan sebagai lembaga kerja sama antara pihak sekolah dan industri dalam hal transfer pengetahuan maupun keterampilan seputar dunia kerja. Tahap pelaksanaan prakerin melewati

beberapa tahap antara lain : (1) sosialisasi program; (2) pemetaan peserta; (3) penjajakan/pengiriman surat; (4) pendaftaran; (5) seleksi; (6) penempatan dan pembekalan; (7) pemberangkatan; (8) prakerin; (9) penjemputan kembali ke sekolah; (10) evaluasi dan pembuatan laporan; (11) KBM. Dan berdasarkan pemaparan tersebut, Pendidikan Sistem Ganda diharapkan bisa ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam era globalisasi sehingga dapat turut serta meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia yang dirasa masih kurang. Tetapi implementasi PSG di SMKN 4 Madiun belum bisa maksimal, hal ini ditunjukkan dengan minimnya sarana dan prasarana yang sesuai standart industri untuk mendukung praktek di sekolah.

Berdasarkan observasi peneliti di SMKN 4 Madiun, masih terdapat kelas yang berfungsi ganda, yaitu selain berfungsi sebagai kelas teori juga digunakan untuk kelas praktek. Selain itu, ada beberapa peralatan praktek yang sudah lama dan tidak sesuai dengan peralatan yang digunakan dunia usaha/industri saat ini. Misalnya seperti program keahlian Tata Busana, ada beberapa mesin jahit dalam kondisi yang tidak maksimal, walaupun masih layak pakai digunakan oleh peserta didik, tetapi jika dilihat tingkat kecepatannya masih jauh dari mesin jahit yang baru. Hal ini tentu merupakan kondisi yang harus dipikirkan kembali oleh sekolah untuk merencanakan adanya penambahan sarana yang dapat membuat seluruh peserta didik dapat melaksanakan praktek dengan nyaman dan leluasa. Jika hal ini hanya didiamkan saja tanpa ditindaklanjuti maka bukan tidak mungkin jika akan mempengaruhi kualitas lulusan.

b. Faktor yang Mendukung Implementasi PSG dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMKN 4 Madiun

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun, salah satunya termasuk peningkatan pemberian pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Ketika sekolah hendak membuat suatu program yang berguna untuk pembentukan karakter individu maka harus terlebih dahulu melihat berbagai faktor yang memungkinkan program tersebut dapat berjalan dengan baik pada nantinya. Dengan adanya berbagai faktor yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun diharapkan dapat terciptanya suatu keadaan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Berdasarkan pemikiran Lewis

A.Gunn dalam buku Wayne Parsons (2006:467) ada beberapa kondisi yang bisa dikatakan dapat menjadi dasar kerangka pertanyaan yang diajukan kepada sebuah program, diantaranya adalah :

11. Situasi di luar agen implementasi tidak menimbulkan perbatasan yang melumpuhkan.

Pendidikan Sistem Ganda merupakan sistem pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan yang turut mengajak partisipasi dunia usaha/industri dalam hal transfer pengetahuan dan keterampilan untuk membentuk karakter peserta didik agar siap kerja setelah mereka lulus nantinya. Salah satu program yang mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun adalah prakerin (praktek kerja industri) yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada tahun kedua dan ketiga. Agar program ini dapat dilaksanakan dengan baik maka membutuhkan dukungan dari masyarakat luas yang berada di luar lingkungan sekolah itu sendiri termasuk latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Sekolah juga harus peka terhadap pandangan masyarakat terhadap program ini, karena kita tahu bahwa selama ini *mindset* masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya di SMK masih dijadikan pilihan kedua setelah SMA. Berdasarkan observasi peneliti, maka situasi di luar agen implementasi (sekolah dan industri) sangat mendukung terlaksananya program ini karena dirasa mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi para peserta didik. Pandangan karir orang tua terhadap peserta didik setelah mereka lulus nanti juga merupakan faktor pendukung terlaksananya program prakerin lebih maksimal.

12. Waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia untuk program.

Dalam implementasi PSG, sekolah harus menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan peserta didik untuk membantu mereka dalam memadupadankan teori dengan prakteknya. Di SMKN 4 sendiri, masing-masing program keahlian telah mempunyai ruang praktek sendiri berikut peralatannya. Pihak sekolah juga tanggap terhadap kebutuhan siswa untuk ikut berperan aktif dalam penguasaan teknologi sebagai tuntutan era global. Hal ini terbukti dengan adanya lab bahasa dan lab komputer agar

peserta didik dapat mengikuti arus perkembangan jaman dan menggali potensi dalam dirinya. Pelaksanakan prakerin sebagai implementasi dari PSG di SMKN 4 Madiun membutuhkan waktu 6 bulan yang dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu 3 bulan pertama pada tahun kedua dan 3 bulan berikutnya pada tahun ketiga. Waktu 6 bulan dirasa oleh pihak sekolah cukup bagi peserta didiknya untuk memadu padankan teori yang didapat dari sekolah dengan praktek di dunia kerja yang sebenarnya. Peserta didik harus mampu menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan selama melaksanakan prakerin baik di dalam kota maupun luar kota. Keberhasilan suatu program dapat dilihat juga apabila industri merasa puas terhadap hasil kerja individu yang dinilai dalam daftar nilai pelatihan siswa prakerin.

13. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.

Ketika sekolah merencanakan suatu program maka harus didasarkan pada teori sebab-akibat yang terlihat dari kondisi yang ada dan kondisi yang diinginkan. Dalam era globalisasi seperti saat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai daya saing di mata internasional untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Fakta yang nampak di negara ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas ditambah banyaknya jumlah tenaga kerja produktif yang mempunyai latar belakang pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan melihat adanya peluang dalam membentuk karakter tiap individu melalui suatu proses pendidikan yang membutuhkan waktu tiga tahun untuk menghasilkan output yang profesional di bidangnya.

Berdasarkan observasi peneliti selama proses dokumentasi di SMKN 4 Madiun, perbedaan SMK dengan SMU adalah bahwa dalam kegiatan belajar mengajar di SMK lebih banyak terdapat praktek untuk mengaplikasikan teori yang diterima dengan kenyataannya dan hal ini tentu saja membutuhkan daya kreativitas dari masing-masing peserta didik dalam memahami bidang keahliannya. Tetapi jika di SMU kegiatan

belajar- mengajar lebih banyak dihabiskan di kelas, dan walaupun ada praktek untuk beberapa mata pelajaran tertentu biasanya hanya seminggu sekali. Dari sinilah, pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda harus lebih peka terhadap kondisi bangsa saat ini khususnya seluruh komponen pendidikan kejuruan di Indonesia apakah telah benar-benar siap untuk menciptakan sebuah kondisi yang penuh persaingan dalam menghasilkan lulusan terampil di bidangnya.

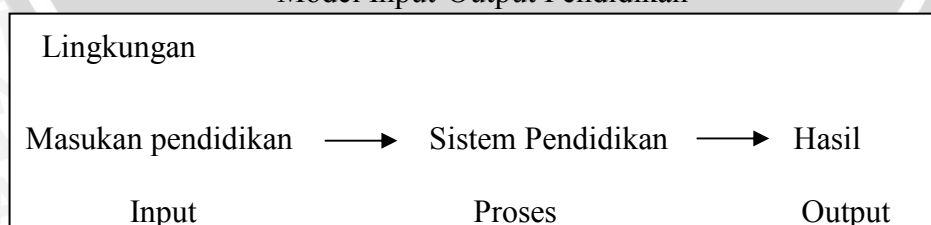
14. Ada komunikasi dan koordinasi sempurna diantara beragam elemen atau agen yang terlibat dalam program.

Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun membutuhkan koordinasi dari tiap unsur untuk mencapai hasil maksimal sesuai tujuan kebijakan tersebut dibuat. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang baik antara guru, peserta didik, dunia usaha/industri untuk bersama-sama menjalankan fungsinya dengan mengetahui tanggung jawab masing-masing. Jika hubungan baik tersebut sudah terwujud dalam bentuk kerja sama maka akan lebih mudah bagi pihak sekolah untuk merealisasikan program-program yang dibuat dalam mendukung implementasi PSG.

c. Output yang Diharapkan dari Implementasi PSG

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) bila dilihat dari keseluruhan sistem pendidikan di sekolah kejuruan merupakan suatu poses di mana berperan membentuk karakter peserta didik sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Pendidikan sebagai suatu sistem dapat dilihat dari bentuk model dasar input-output seperti yang dirumuskan oleh Sagala (2007 : 17) pada gambar :

Model Input-Output Pendidikan



Input sebagai masukan pendidikan di SMKN 4 Madiun adalah seluruh peserta didik yang mempunyai minat dan bakat berbeda dan membutuhkan keterampilan yang akan membekali mereka dalam menghadapi dunia kerja yang

sesungguhnya setelah mereka lulus. Melalui suatu proses pendidikan sekolah merencanakan dan merealisasikan berbagai program untuk mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun. Salah satu proses untuk memberikan pendidikan bagi peserta didik di SMKN 4 Madiun adalah dengan adanya program prakerin (praktek kerja industri). Melalui prakerin siswa bisa memadupadankan antara pendidikan yang didapat di sekolah dengan keterampilan dan keahlian yang didapat dari industri. Jadi siswa dapat langsung terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya dan mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus nanti.

Setelah input tersebut diolah melalui suatu proses selama tiga tahun masa pendidikan di sekolah, maka munculah hasil akhir atau output pendidikan berupa seluruh siswa yang lulus dengan memenuhi syarat standar kelulusan nasional. Produk sekolah berupa seluruh peserta didik yang lulus belum bisa dikatakan produk yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan Pendidikan Sistem Ganda. Untuk melihat sejauh mana output yang dihasilkan SMKN 4 Madiun dikatakan pantas untuk terjun ke masyarakat, maka kita harus menelaah kembali apa sebenarnya tujuan dari Pendidikan Sistem Ganda. Dalam Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia (1996 : 7-8) salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pendekatan Pendidikan Sistem Ganda adalah menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Hal ini jelas terlihat pada diri peserta didik di SMKN 4 Madiun. Dari tingkat pertama di sekolah seluruh beserta didik diberikan pengetahuan, keterampilan dan melaksanakan praktek kerja industri pada tahun kedua dan ketiga untuk membekali diri mereka setelah lulus nanti agar mampu bersaing masuk ke dunia kerja. Hal ini membuktikan bahwa orientasi daripada sekolah kejuruan adalah mencetak tenaga terampil di bidangnya dan memiliki etos kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain itu masyarakat bisa memberi pengakuan ataupun penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Kita tahu bahwa sebagian perusahaan/industri membutuhkan calon pekerja yang sudah

memiliki pengalaman sesuai dengan bidang yang ditawarkan kepada umum. Dengan adanya program prakerin sebagai implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun, maka siswa diharapkan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing dengan yang lain ketika memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Pengalaman kerja didapat ketika peserta didik melaksanakan prakerin pada tahun kedua dan ketiga, dan ada beberapa industri yang memberikan sertifikat kepada siswa-siswi prakerin sebagai bukti mereka pernah melaksanakan program sekolah di industri yang bersangkutan.

Faisal (1981:179) dalam Sagala (2007 : 235) memberikan referensinya tentang pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat yang dibedakan melalui :

(1) Mencerdaskan kehidupan masyarakat;

Salah satu tujuan pendidikan formal adalah turut mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui suatu proses pembentukan karakter dan intelektual yang pada akhirnya dapat menghasilkan hasil akhir sesuai visi dan misi sekolah. SMKN 4 Madiun telah mengantarkan peserta didiknya mengukir prestasi akademik maupun non-akademik yang berada di luar lingkungan sekolah. Hal ini membuktikan bahwa kualitas peserta didik SMKN 4 Madiun tidak kalah dengan para pesaingnya di luar sana. Melalui proses pendidikan selama 3 tahun, peserta didik dibekali ilmu pengetahuan seputar pendidikan kejuruan dan dunia kerja yang relevan dengan perkembangan jaman atau teknologi saat ini. Sebagai hasil akhir, peserta didik juga diberikan ujian kompetensi dan ujian praktek sesuai silabus pendidikan untuk kemudian menjadi bukti bagi orang tua peserta didik. Melalui ujian kompetensi maupun ujian praktek tadi, maka sekolah juga dapat menilai sampai di mana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan guru selama ini.

(2) Membawa virus pembaharuan bagi perkembangan masyarakat;

Pendidikan formal juga berperan dalam membawa virus pembaharuan bagi perkembangan masyarakat yang akan membawa kemajuan bangsa. Hal ini terkait dengan kurikulum yang diberikan selalu mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan dunia kerja dari waktu ke waktu.

Peserta didik juga diberikan pengetahuan seputar dunia kerja dari pihak sekolah bersama-sama dengan *stake holder* (pihak yang berkepentingan) seperti perusahaan/industri untuk mempersiapkan peserta didik masuk dunia kerja setelah lulus nanti. Dengan begitu, peserta didik juga harus membekali dirinya dengan pengetahuan di luar sekolah yang dapat menunjang *self building* daripada peserta didik.

(3) Melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali dengan kepentingan kerja di lingkungan masyarakat;

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan memang dikhususkan untuk mempersiapkan peserta didiknya siap masuk ke dunia kerja yang sebenarnya setelah lulus nanti. Kurikulumnya juga turut dipersiapkan dalam rangka membekali peserta didiknya agar menjadi individu yang cerdas, terampil dan profesional dibidangnya. Mulai dari tahun pertama, peran dunia usaha/industri sudah kentara sekali, hal ini terlihat dari peran aktif mereka untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan seputar dunia kerja. Misalnya, sekolah mendatangkan para ahli/pakar sesuai dengan program keahlian yang ada untuk sekedar memberikan diskusi ringan ataupun memperkaya pengetahuan peserta didik. Hal ini merupakan serangkaian program belajar dari sekolah untuk membekali peserta didik dengan informasi dan pengetahuan yang relevan terhadap dunia kerja saat ini. Pada tahun kedua dan ketiga perusahaan/industri sudah turun tangan secara langsung dalam memberikan *skill* kepada peserta didik yang melaksanakan prakerin selama 6 bulan di dudi yang bersangkutan. Praktek kerja industri ini merupakan implementasi dari kebijakan PSG yang terdapat di SMKN 4 Madiun.

(4) Melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.

Adanya kerja sama antara sekolah dan dunia usaha/industri dalam mengembangkan kurikulum dan mempersiapkan output yang profesional di bidangnya akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa yang dirasa masih jalan di

tempat. Sudah saatnya bangsa ini bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan bahwa sumber daya manusianya turut berkontribusi dalam membawa suatu perubahan. Selain itu peran orang tua juga sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik, mengingat pendidikan tidak hanya didapat dari lingkungan formal seperti di sekolah saja. Kondisi sosial budaya masyarakat juga akan mempengaruhi kesiapan siswa untuk mempraktekkan materi yang didapat dengan kenyataan sebenarnya. Jika lingkungan eksternal tidak bisa mendukung program belajar yang diadakan oleh sekolah, maka tujuan pendidikan sekolah kejuruan tidak akan tercapai secara maksimal.

Untuk mengukur apakah output yang dihasilkan SMKN 4 Madiun mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat kita hubungkan dengan berbagai dimensi kualitas. Sejalan dengan itu, menurut H.A.R Tilaar (Standarisasi Pendidikan Nasional, 2006:37) terdapat tiga dimensi kualitas yang saling berkaitan, yaitu:

d. Dimensi Kualitas Bisnis

Artinya sejauh mana bisnis tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. SMKN 4 mempunyai 4 program keahlian yang terdiri dari : Tata Kecantikan, Tata Busana, Restorant, dan Akomodasi Perhotelan. Dengan 4 program keahlian yang berusaha dikembangkan, sekolah berusaha melihat kebutuhan pasar terhadap peserta didiknya. Madiun adalah kota perdagangan dan industri yang banyak terdapat pusat perbelanjaan, hotel dan industri. Dengan melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, hal ini merupakan faktor pendorong bagi pihak sekolah untuk mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka memenuhi kondisi pasar di kota Madiun.

Di SMKN 4 Madiun sendiri, terdapat bisnis yang sengaja dikembangkan untuk menanggapi respon masyarakat terhadap *service* yang diberikan peserta didik. Misalnya saja seperti fasilitas ruang pertemuan yang dibuka untuk umum dan sudah dilengkapi dengan peralatan jamuan makan. Sekolah memberikan kesempatan dan kebebasan tentu saja dengan bantuan guru pembimbing kepada siswa khususnya program keahlian Restorant dalam kegiatan berproduksi yang sesuai dengan materi maupun latihan praktek yang

sudah didapat selama ini. Dengan begitu, masyarakat akan menilai apakah bisnis tersebut sudah berhasil memenuhi tingkat kepuasan konsumen.

e. *Dimensi Produk*

Sejauh mana produk dan service memenuhi pelanggan tertentu (*specific customer*). SMKN 4 telah membuktikan bahwa lulusannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dunia usaha/industri akan sumber daya manusia yang terampil dan profesional di bidangnya. Hal ini terbukti adanya kerja sama antara pihak sekolah dan industri dalam memasarkan lulusan SMKN 4 Madiun. Pihak industri melihat SMKN 4 Madiun mampu menghasilkan output yang berdaya saing dan mempunyai etos kerja, sehingga setiap tahun banyak tawaran yang datang ke SMKN 4 Madiun untuk menawarkan bidang pekerjaan terhadap siapa saja yang memenuhi persyaratan tertentu standar industri yang bersangkutan. Berdasarkan Data Penelusuran Tamatan dan Keterserapan Siswa SMKN 4 Madiun pada tahun 2007/2008, jumlah lulusan yang terserap perusahaan maupun swasta yaitu 106 orang dari jumlah siswa 229. Hal ini membuktikan bahwa hampir setengah dari jumlah lulusan berhasil diterima di dunia kerja dan mereka memang kompeten di bidangnya. Ataupun bagi mereka yang berwiraswasta juga menggunakan ilmu yang didapat selama mengenyam pendidikan dari sekolah dengan membuka usaha baru dan tidak tergantung dengan pihak lain.

f. *Dimensi Organisasi*

Sejauh mana organisasi mempunyai efisiensi secara maksimal dan efektif, mempunyai *waste* yang minimum, manajemen yang efisien dan mempunyai *good human relation*. Berdasarkan data keterserapan tamatan di SMKN 4 madiun, dari tahun ke tahun lebih dari 50% lulusan yang berhasil terserap dunia kerja di luar jumlah lulusan yang meneruskan pendidikan ke tingkat lebih lanjut. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sekolah mempunyai *waste* yang tidak terlalu banyak. Dalam proses pendidikan selama tiga tahun, sekolah membuat program-program yang mendukung implementasi PSG dengan manajemen yang efektif dan memberikan pelayanan pendidikan

kepada seluruh peserta didik dengan baik, sesuai dengan visi misi SMKN 4 Madiun. Hubungan yang baik antara guru dengan murid atau dengan lingkungan sekitar membuat seluruh peserta didik belajar secara kondusif.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kebanyakan dari kita sering beranggapan bahwa jika pemerintah membuat suatu kebijakan di bidang tertentu, maka kebijakan tersebut dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Didukung oleh pernyataan Smith (1973) dan Grindle (1980) dalam (Wahab, 2008 : 218-219) yang berpendapat bahwa persoalan implementasi di Negara-negara Dunia Ketiga justru merupakan batu sandungan terberat lagi serius bagi efektivitas kebijakan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah boleh saja mempunyai sejumlah kebijakan dan beberapa tujuan pembangunannya yang layak diacungi jempol, sayangnya dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk program-program dalam implementasinya terdapat sandungan yang sangat berat : banyak diantara kebijakan-kebijakan itu tetap saja berupa pernyataan simbolis dari pemimpin-pemimpin politik atau berupa undang-undang seperti yang tertulis di kitab perundang-undangan, sementara kebijakan lainnya yang telah dilaksanakan ternyata hasilnya tidaklah seperti yang semula diharapkan. Sependapat dengan pernyataan Grindle, konsepsi sosiolog Myrdal (1970) dalam (Wahab, 2008 : 220) tentang *soft state* (negara lembek) kiranya bermanfaat guna menjelaskan permasalahan pada Negara Dunia Ketiga di atas. Konsep itu secara telak menegaskan bahwa ketiadaan kemampuan pemerintah Dunia Ketiga adalah dalam membuat rencana, membuat dan melaksanakan kebijakan publik, serta program-program pembangunan yang efektif. Sebagian dari masalah-masalah tersebut seperti Myrdal dan sarjana-sarjana lain memandangnya disebabkan oleh berkembang biaknya praktek korupsi di tubuh sistem politik dan administrasi.

Melihat pernyataan di atas, jika dihubungkan dengan keadaan sebenarnya bahwa implementasi PSG di SMKN 4 Madiun tidak mungkin tanpa kendala sama sekali. Ada beberapa faktor penghambat yang membuat implementasi PSG tidak

berjalan sempurna, tetapi hal ini tidak membuat pihak sekolah diam saja dan hanya berpangku tangan dalam meminimalisir kendala tersebut. Peneliti membedakan hambatan yang berasal dari dalam lingkungan sekolah sebagai hambatan internal, sedangkan hambatan yang berasal dari luar sekolah adalah hambatan eksternal. Macam-macam hambatan yang menyebabkan implementasi PSG tidak dapat berjalan maksimal di SMKN 4 Madiun antara lain :

a. *Hambatan internal.*

Bila diidentifikasi, hambatan internal berasal dari peserta didik, guru dan fasilitas/sarana yang ada di SMKN 4 Madiun :

Pertama, hambatan yang berasal dari peserta didik apabila dilihat dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi orang tua peserta didik sangat mempengaruhi selama proses pendidikan berlangsung. Berdasarkan dokumentasi peneliti selama di SMKN 4 Madiun, untuk program keahlian Restoran, latar belakang pendidikan orang tua peserta didik 37% menyelesaikan pada tingkat SLTA dan 27% hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD. Sedangkan latar belakang sosial dan ekonomi dari peserta didik lebih dari 50% bekerja sebagai wiraswasta yang terdiri dari sopir, pedagang, buruh dan lain-lain. Salah satu sumber pembiayaan selama proses pendidikan berlangsung adalah dari orang tua peserta didik, hal ini berhubungan dengan tingkat penghasilan. Bagi siswa yang tidak dapat memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya praktek maupun kewajiban SPP, tentu akan menghambat kelancaran proses belajar, dan timbul rasa kurang percaya diri sehingga tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah.

Apabila dalam penyelesaian administrasi sekolah terkait dengan implementasi Pendidikan Sistem Ganda dirasa memberatkan orang tua peserta didik, karena penghasilan yang dirasa minim dan terpaksa harus menunda, maka akan menjadi penghambat sekolah dalam mengurus segala keperluan siswa dikarenakan dana yang terkumpul tidak memenuhi perencanaan awal. Hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat perkembangan siswa dalam menerima dan mempraktekkan materi pelajaran yang didapat dari sekolah. Sumber dana dari orang tua peserta didik digunakan untuk membantu sekolah

bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan maka akan menghambat terciptanya output sekolah pendidikan kejuruan yang cerdas, kreatif dan profesional di bidangnya.

Selain itu faktor pendidikan orang tua juga sangat menentukan perkembangan peserta didik melalui pembentukan kepribadian, wawasan, komunikasi yang efektif yang tidak didapat dari pendidikan formal seperti di sekolah. Berdasarkan data yang didapat untuk program keahlian Restoran kelas X, latar belakang pendidikan orang tua peserta didik 37% yang menyelesaikan pada tingkat SLTA dan 27% hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD. Siswa dalam membentuk dan menggali potensi diri juga sangat dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua siswa juga dituntut untuk mampu memberi arahan dan bimbingan guna membentuk karakter putra-putrinya selama berada di luar lingkungan sekolah. Ketika peserta didik membawa pekerjaan rumah dari guru di sekolah maka peran orang tua adalah membantu membimbing dan memberikan pemahaman baik langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui peran lembaga bimbingan di luar sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk lebih giat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi orang tua dapat mengontrol perkembangan putra-putrinya dan memahami keinginan mereka setelah lulus. Jika orang tua peserta didik kurang mempunyai wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang memadai, maka akan berakibat kurang maksimalnya proses pembentukan karakter peserta didik.

Kedua, aspek guru. Hambatan implementasi Pendidikan Sitem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun terkait dengan pola berpikir guru yang cenderung terikat dengan kurikulum lama, padahal kurikulum sekarang yang digunakan menuntut kreativitas dan kemampuan guru untuk lebih peka mengembangkan kemampuan siswa yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kurikulum pendidikan yang dipakai sekarang ini untuk menyempurnakan kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan berpijak pada panduan KTSP dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP,

sekolah diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Di samping itu, sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan melihat potensi lokal. Tetapi, permasalahan yang ada dari beberapa kelemahan KTSP adalah kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamalik (1990 : 87) keterkaitan antara kurikulum pendidikan kejuruan dan pekerjaan sangat erat, sehingga masalah yang dihadapi SMK adalah :

Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan yang senantiasa menjamin relevansi, mutu dan efisiensi, pada gilirannya dibutuhkan tenaga pengembang kurikulum yang profesional dan pakar-pakar kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan/tuntutan kurikulum yang berorientasi pada pekerjaan, yang relatif terus berubah dan berkembang.

Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, belum maksimalnya peran guru dalam mendukung kurikulum 2006 (KTSP) juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Kurikulum pendidikan kejuruan di SMKN 4 Madiun juga disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri (*demand driven*). Kepala Sekolah, guru dan pihak manajemen dituntut untuk mampu menyusun dan menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan keadaan riil di lapangan. Kurikulum tersebut disusun bersama dengan pihak yang berkepentingan terhadap visi dan misi SMKN 4 Madiun dalam rangka menghasilkan output yang cerdas, kompeten, dan profesional di bidangnya.

Jika SDM yang ada di SMKN 4 belum bisa memahami isi dari KTSP dan mengimplementasikannya sesuai target, maka tujuan dari kebijakan Pendidikan Sistem Ganda tidak akan terwujud.

Ketiga, kurangnya fasilitas yang digunakan untuk kegiatan praktek di sekolah. Sedikitnya anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah membuat sekolah kekurangan dana pendidikan untuk biaya pengadaan fasilitas/sarana yang sesuai standart industri yang digunakan peserta didik mempraktekkan teori yang didapat dari sekolah dengan kenyataannya. Berdasarkan wawancara dengan guru SMKN 4 Madiun, sarana dan prasarana yang ada di SMKN 4 Madiun belum sesuai dengan standart industri saat ini. Contohnya seperti peralatan masak yang digunakan program keahlian Restorant untuk mengolah makanan masih kuno dan belum menggunakan teknologi terkini. Begitu juga Hal ini tentu membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sesuatu. Jika waktu yang digunakan kurang efektif maka berpengaruh terhadap *service*. Dalam dunia kerja kecepatan dan kenyamanan sangat dibutuhkan konsumen, sehingga konsumen akan cenderung mencari pelayanan yang cepat daripada yang lambat.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa fasilitas peralatan praktek di SMKN 4 Madiun perlu diperbarui mengingat karakteristik penilaian pada pendidikan kejuruan adalah terletak pada "*hands-on*" atau performa dalam dunia kerja yang mana membutuhkan fasilitas untuk praktek peserta didiknya. Tetapi perlu diperhatikan, peran guru di sini sangat berpengaruh sekali dalam memanfaatkan secara efektif dan efisien fasilitas yang ada guna menunjang kegiatan praktek di sekolah. Berdasarkan data yang didapat, selama peserta didik melaksanakan prakerin, pihak industri menilai berdasarkan aspek teknis dan non teknis. Hal ini berarti peserta didik harus diberikan keterampilan teknis pada tingkat pertama dan kedua, yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam penyelenggaraannya. Standar kompetensi peserta didik ini dirumuskan dalam kurikulum pendidikan kejuruan yang berorientasi pada "*demand driven*". Pendidikan kejuruan sangat antisipatif terhadap kemajuan teknologi, oleh karena itu peralatan praktek yang digunakanpun harus memenuhi standart kualitas untuk mendukung peserta didiknya dalam berproduksi. Pihak sekolah

terus mengadakan upaya-upaya peningkatan kualitas ataupun pelayanan pendidikan yang bermanfaat untuk perkembangan peserta didiknya agar tidak mudah menyerah, dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.

b. Hambatan eksternal

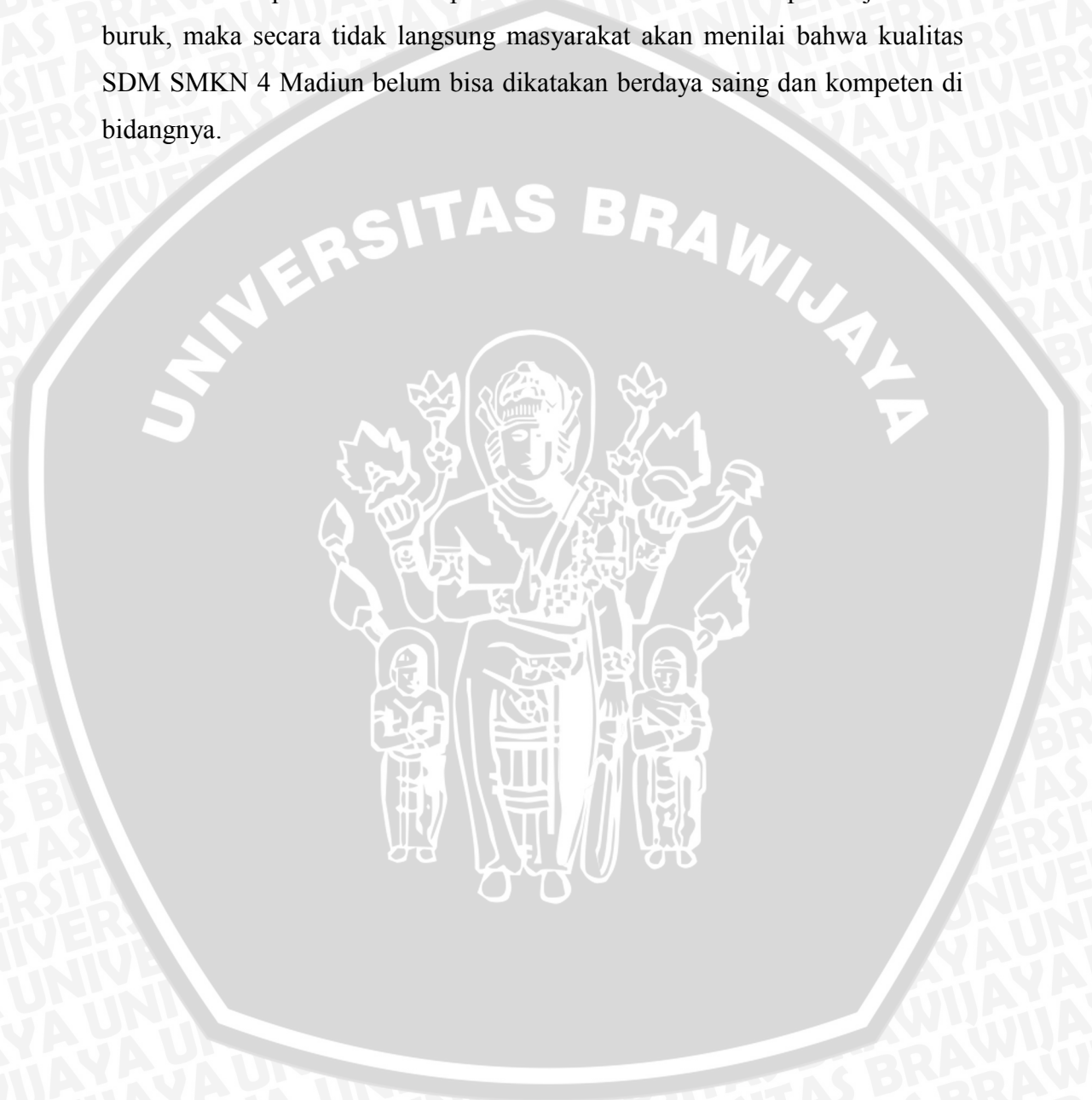
Yang menjadi hambatan eksternal dalam implementasi PSG di SMKN 4 Madiun antara lain adalah kebijakan pemerintah dalam hal anggaran bidang pendidikan dan lokasi industri/perusahaan tempat peserta didik melaksanakan prakerin :

Pertama, kebijakan pemerintah dalam hal anggaran negara yang dirumuskan total 20 % dalam APBN untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan hambatan lainnya adalah lokasi industri yang digunakan untuk prakerin siswa. Dalam suatu kesempatan, pemerintah akhirnya mengalokasikan 20 % APBN untuk anggaran pendidikan. Alokasi anggaran ini untuk memenuhi amanat konstitusi, meskipun dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal itu dalam Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2009 Beserta Nota Keuangannya, di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (15/8) pagi, di Gedung DPR/MPR (Jakarta 15 Agustus 2008 : Pidato Kenegaraan dalam tokoh Indonesia.com). Anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN kita ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini. Walaupun jumlahnya sudah ditambah, tetapi bila melihat kebutuhan pendidikan kita yang sangat tinggi, maka jumlah segitu masih dipertanyakan lagi. Untuk memadu padankan antara teori yang didapat di sekolah dengan prakteknya di dalam Sekolah Menengah Kejuruan pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standart industri apabila menginginkan output yang cerdas, terampil dan kompetitif di era global ini. Jika hanya mengandalkan dana dari APBN saja untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia maka jumlah segitu tidak akan cukup.

Untuk mengantisipasi kekurangan dana tersebut, maka pihak sekolah harus mampu mengadakan pembiayaan mandiri sesuai UUSPN No.20 tahun 2003 mengemukakan pengadaan dan pendayaagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau keluarga peserta didik. Bertitik tolak pada program kegiatan dan keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka kepala sekolah harus mampu menyusun rencana pembiayaan. Dalam hal ini sekolah mengajak partisipasi baik dari orang tua siswa ataupun masyarakat dalam mencapai tujuan. Orang tua membayar uang sekolah, ujian, sumbangan untuk peserta didik baru, laboratorium, uang prakerin (@Rp.175.000) dan sebagainya pada akhirnya dikelola sekolah untuk menambah anggaran pemerintah yang akan digunakan selama proses pendidikan. Dari pihak sekolah sendiri, SMKN 4 Madiun mulai berwirausaha dengan menyediakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum seperti jasa catering, jasa salon, dan jasa aula sekolah. Usaha tersebut juga turut mengajak partisipasi peserta didik dalam menanggapi permintaan konsumen. Oleh karena itu, sekolah harus mampu menyesuaikan kondisi internal dengan kondisi eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar akan output yang cerdas, terampil dan kompetitif.

Hambatan eksternal *kedua* berhubungan dengan lokasi industri/perusahaan yang digunakan peserta didik untuk praktek kerja industri. Jika melihat lokasi industri yang jauh, peserta didik rata-rata mengeluh tentang harus beradaptasi selama kos di luar kota yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Mereka harus menyesuaikan diri terhadap budaya kerja maupun rutinitas yang berlaku selama berada di tempat kerja. Berdasarkan data yang didapat, pihak sekolah program keahlian Restorant mengadakan kerja sama dengan beberapa restoran yang berada di luar kota Madiun seperti Rumah Makan Menggo Terrace Surabaya, Catering Sono Kembang Batu-Malang. Melihat dari jarak yang jauh antara lokasi prakerin dengan tempat tinggal peserta didik tidak mengherankan banyak siswa prakerin yang berada di luar kota mengeluh akan hal ini, dan tentu saja akan mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Perbedaan budaya di sekolah dan di industripun juga turut mempengaruhi, misalnya di sekolah semangat kerja siswa sangat bergantung kepada

kemampuan guru memotivasi, sedangkan di industri iklim kerjalah yang memacu setiap orang untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Jika hal ini terus berlanjut, maka juga akan mempengaruhi tingkat produktivitas siswa prakerin dalam bekerja, yang dinilai oleh pihak industri/perusahaan yang berkaitan. Jika performa siswa prakerin selama berada di tempat kerja dinilai buruk, maka secara tidak langsung masyarakat akan menilai bahwa kualitas SDM SMKN 4 Madiun belum bisa dikatakan berdaya saing dan kompeten di bidangnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dan analisis implementasi Pendidikan Sistem Ganda terhadap output SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMKN 4 Madiun memerlukan komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh implementator kebijakan. Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang terdapat di SMKN 4 Madiun meliputi program-program sekolah yang di dalamnya terdapat praktek kerja industri atau prakerin. Waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk melaksanakan prakerin adalah 6 bulan yaitu 3 bulan pertama pada tingkat dua semester genap dan tiga bulan berikutnya pada semester ganjil tingkat tiga. Prosedur pelaksanaan prakerin meliputi : sosialisasi program, pemetaan peserta didik, pengiriman surat, pendaftaran, seleksi, penempatan dan pembekalan, pemberangkatan, prakerin, penjemputan kembali ke sekolah, evaluasi dan pembuatan laporan, KBM.
- 2) Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa output SMKN 4 Madiun yaitu jumlah lulusan setiap tahun, belum berhasil terserap dunia kerja secara optimal. Pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah lulusan SMKN 4 madiun adalah 229 orang, yang terserap perusahaan maupun swasta yaitu 106 orang, yang masih dalam masa tunggu dan lain-lain adalah 100 orang, sedangkan yang melanjutkan sekolah 23 orang. Walaupun tidak seberapa signifikan selisihnya tetapi output SMKN 4 Madiun yang bekerja setelah lulus menunjukkan hasil yang baik. Hal ini membawa SMKN 4 Madiun ikut berkontribusi dalam menghasilkan output yang berdaya saing terhadap dunia kerja sekarang ini.
- 3) Untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, maka implementasi PSG di SMKN 4 Madiun memerlukan fasilitas pendukung yang cukup besar. Ketika pemerintah belum mampu memenuhi fasilitas berupa peralatan praktek yang memenuhi standar dunia industri sebagai sarana peserta didik dalam melaksanakan praktek di sekolah terkait dengan kebijakan

Pendidikan Sistem Ganda (PSG), maka upaya-upaya yang diambil sekolah untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut akan mengarah pembiayaan mandiri melalui kebijakan otonomi sekolah, dan salah satunya menjadikan lembaga sekolah yang berjiwa entrepreneur.

- 4) Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun tidak mungkin tanpa hambatan. Hambatan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan internal dan eksternal. Terdapat beberapa hambatan internal antara lain : *pertama*, faktor latar belakang sosial ekonomi, dan budaya dari peserta didik. *Kedua*, dinamika berpikir yang cenderung masih mengikuti kurikulum lama dari beberapa guru yang mengajar. *Ketiga*, belum tersedianya jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standart industri. Dan hambatan eksternal yang turut mempengaruhi implementasi PSG di SMKN 4 Madiun antara lain adalah : *pertama*, kebijakan pemerintah dalam rangka anggaran pendidikan di Indoneia. *Kedua*, lokasi dunia usaha/industri untuk prakerin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan implementasi Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun :

1. Agar implementasi PSG dapat berjalan lebih baik, maka diperlukan pelatihan yang lebih insentif dan lebih banyak program sekolah yang dapat menambah daya kreativitas peserta didik. Alternatif ini dapat dilakukan dengan mengadakan lomba dari masing-masing program keahlian yang didampingi oleh guru pembimbing dan mendatangkan praktisi dari dunia usaha/industri yang bersangkutan untuk menilai dan mengevaluasi sampai di mana tingkat kreativitas peserta didik.
2. Diperlukan semacam partisipasi dari peserta didik untuk mendukung program pembiayaan mandiri terhadap kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan minimnya dana pemerintah untuk mendukung implementasi PSG di SMKN 4 Madiun. Tentunya tetap memperhatikan manajemen sekolah dan melihat kebijakan tersebut sebagai peluang bisnis sekaligus melihat sejauh mana *service* tersebut dapat diterima masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan yang diambil sekolah justru menyengsarakan peserta didik. Seperti usaha

catering sekolah, dari program keahlian Restaurant yang dibuka untuk umum. Selain dapat menghasilkan masukan bagi sekolah, ide tersebut juga dapat meningkatkan keterampilan atau kreativitas peserta didik yang terlibat dalam kegiatan produksi.

3. Sebelum dilaksanakan praktek kerja industri (prakerin), ada baiknya pihak sekolah memberikan pedoman ataupun gambaran tentang kurikulum pendidikan kejuruan yang ada di SMKN 4 Madiun untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap siswa magang agar tercipta hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dalam merespon kebutuhan pasar.
4. Saran ataupun masukan dari dunia usaha/industri yang bekerja sama dengan sekolah terhadap kualitas peserta didik harus benar-benar ditindaklanjuti agar saran yang disampaikan masyarakat benar-benar terealisasikan, sehingga kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui Pendidikan Sistem Ganda meningkat.
5. Membuka jalan bagi lulusan yang berpotensi, memiliki daya saing untuk mengetahui informasi tentang macam pekerjaan dan akses ke dunia kerja, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan karena minimnya informasi setelah mereka lulus.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU no. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 30 Januari 2009

Mahasiswa

Nama : Saras Rahmadani

NIM : 0510313127

RINGKASAN

Saras Rahmadani. 2005. Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap Output SMKN 4 Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

**Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abd.Yuli Andi Gani, MS
2. Dr. Suryadi, MS**

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya kerjasama antara sekolah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Peran dunia usaha dalam hal ini posisinya sebagai sub sistem sekolah kejuruan mempunyai arti penting bagi siswa dan guru, yaitu sebagai lahan praktik nyata untuk memadukan mata Diklat yang telah dipelajari dan menyatukannya dengan seni bisnis melalui ilmu kewirausahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan implementasi PSG tersebut pada SMKN 4 Madiun. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSG di SMKN 4 Madiun sudah terealisasi dengan baik, dengan adanya program praktek kerja industri dari sekolah selama enam bulan. Di samping itu, terdapat beberapa hambatan yang membuat implementasi PSG di SMKN 4 Madiun kurang maksimal. Hambatan tersebut dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal. Hal ini juga menyebabkan output SMKN 4 Madiun belum dapat terserap secara optimal terhadap dunia kerja. Didukung dengan data jumlah lulusan tahun 2007/2008 di SMKN 4 Madiun adalah 229 orang, sedangkan yang terserap perusahaan maupun swasta yaitu 106 orang, yang masih dalam masa tunggu dan lain-lain termasuk adalah 100 orang, yang melanjutkan sekolah 23 orang.

SUMMARY

Saras Rahmadani. 2005. The Implementation of Dual System Education (DSE / PSG) on Outputs of SMKN 4 Madiun in Increasing Education Quality.

**Advisory Lecturers: 1. Prof. Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MS.
2. Dr. Suryadi, MS.**

The research conducted on the basis of inters school and business world cooperation in increasing education quality, particularly on Sekolah Menengah Kejuruan (Vocational School) with Dual System Education (PSG). The role of business world in this case is positioning as Sub System of expertise school, which has important role for the students and the teachers. It gives places for real practices field to combine education and practice subject that has been learn and associate it with business art through entrepreneurship knowledge.

The research has objective to know how the implementation of Dual System Education (PSG) in increasing the quality of education is and what factors that become obstacles in concreting the implementation of PSG on SMKN 4 Madiun. The research used descriptive method with qualitative approach.

The result of the research showed that the implementation of PSG on SMKN 4 Madiun has been realized well, with the program of industrial work practices. From the school for six months. Beside that, there were some obstacles that made the implementation of PSG on SMKN 4 Madiun was less maximal. They were differentiated into internal and external obstacles. These also made the outputs of SMKN 4 Madiun could not be absorbed well into work field. Based on the data the number of graduated students on 2007/2008 of SMKN 4 Madiun were 229, with 106 students accepted in company, 23 were continuing their education, while the rest 100 were waiting for vacancy, jobless or other things.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap Outout SKMKN 4 Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

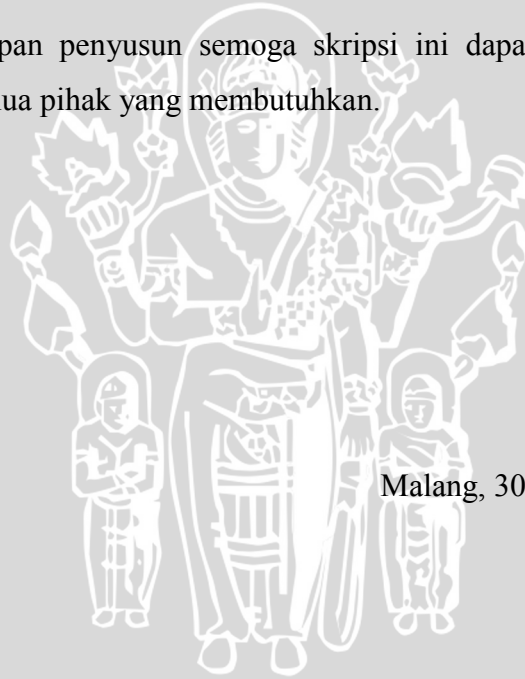
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Alm. Bapak Moh. Abdul Manan dan Ibu Maharini yang senantiasa membimbing, mendidik, dan mendoakan anak-anaknya menjadi orang yang lebih bermanfaat.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MS, selaku pembimbing utama, yang telah banyak membimbing, dan memberikan ilmu dan arahan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Suryadi, MS selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Suhadak, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
6. Bapak Liluk Dwi Muljanto, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Madiun.
7. Seluruh guru SMKN 4 Madiun yang telah membantu pembuatan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya.
8. Rekan-rekan angkatan 2005 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

9. Rekan-rekan kos Watu Gong 42 yang telah memberikan dukungan dan pertemanan yang membangkitkan sisi positif dalam diri saya. Terima kasih untuk selalu percaya kepadaku.
10. Rekan-rekan alumni SMA 2 Madiun (10 sister, FORMADIMA, "Bayu Puspo Kusumo" dan semuanya yang tidak aku sebutkan satu-persatu di lembar ini) yang telah membuatku tahu bahwa teman adalah kekuatan yang tak tertandingi untuk kita meraih mimpi...

Pepatah mengatakan "*Tiada Gading yang Tak Retak*", maka seperti itulah skripsi ini. Penyusun menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi, dan pengalaman, penyusun mengharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya skripsi ini.

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun semua pihak yang membutuhkan.



Malang, 30 Januari 2009

Penyusun

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kebijakan Publik.....	13
1. Hakekat Kebijakan Publik.....	13
2. Implementasi Kebijakan Publik	13
3. Fungsi Implementasi Kebijakan	16
B. Pendidikan Sistem Ganda (PSG).....	16
1. Hakekat PSG	16
2. Komponen PSG.....	20
3. Tujuan PSG	22
C. Sekolah Menengah Kejuruan	22
1. Pengertian Sekolah	22
2. Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Pendidikan	23
3. Sekolah Menengah Kejuruan	26
4. Karakteristik Pendidikan Kejuruan	27
5. Tujuan Pendidikan Kejuruan.....	27
6. Prosedur Pengorganisasian Kurikulum	28
7. Masalah yang Dihadapi	29
8. Output.....	30
D. Pendidikan	30
1. Pengertian	31
2. Perlunya Standarisasi Pendidikan	31
3. Kualitas Sebagai Inti dari Standarisasi	33
III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38

E.	Teknik Pengumpulan Data	39
F.	Instrumen Penelitian	41
G.	Analisis Data	41
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Penyajian Data Umum	43
1.	Gambaran Umum Kota Madiun	42
2.	Gambaran SMKN 4 Madiun	47
3.	Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 4 Madiun	54
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	59
1.	Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan	59
2.	Faktor yang menghambat implementasi PSG dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4 Madiun	76
C.	Pembahasan	80
1.	Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun dalam meningkatkan kualitas pendidikan	80
a.	Prosedur Implementasi PSG dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMKN 4 Madiun	88
b.	Faktor yang Mendukung Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun	89
c.	Output yang Diharapkan dari Implementasi PSG	92
2.	Faktor-faktor yang menghambat Implementasi PSG di SMKN 4 Madiun	98
a.	Hambatan Internal	99
b.	Hambatan Eksternal	103
V.	PENUTUP	106
1.	Kesimpulan	106
2.	Saran	107

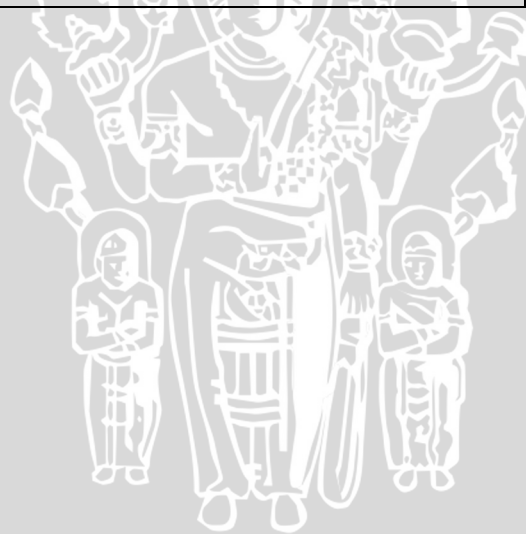
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Model Input-Output Pendidikan	02
2.	Model Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda	18
3.	Diagram Komponen Program Pendidikan dan Pelatihan pada SMK	21
4.	Peta Kota Madiun	43
5.	Peta Letak SMKN 4 Madiun	48
6.	Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Industri	66



DAFTAR TABEL

Gambar	Teks	Halaman
1.	Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Dan Penempatannya Pada Tahun 2006	45
2.	Jumlah Ruangan di SMKN 4 Madiun	50
3.	Jumlah Peserta Didik (Kelas X,XI,XII) Agustus 2008	52
4.	Data Jenis Pekerjaan Wali Peserta Didik Jurusan Restoran Kelas X	53
5.	Data Tingkat Pendidikan Wali Peserta Didik Jurusan Restoran Kelas X	53
6.	Data Penelusuran Tamatan dan Keterserapan Siswa SMKN 4 Madiun	72



Alhamdulillah Ya Allah...

Karya ilmiah ini kupersembahkan

***Kepada Alm. Bapak Moh. Abdul Manan who love me
in his whole life..***

***dan Ibunda tercinta, Maharini who have important
role in my life, I just nothing without you..***

serta Adikku tersayang,

***Dangan Prasetya who always support me anytime,
anywhere....I love u all***





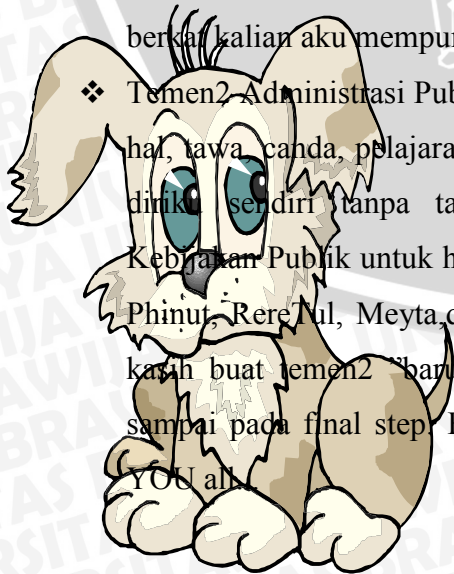
Alhamdulillah Ya Allah...

Setelah melewati segala kesulitan yang tidak mudah dan akhirnya

Kau berikan padaku kemudahan, kelancaran dan jalan keluar dari tiap masalah...

I would like thank's to :

- ❖ Alm.Bapak Moh Abdul Manan dan Ibu Maharini yang telah MENDIDIK tanpa lelah, membimbing, mengarahkan, dan MENYAYANGI Saras hingga akhirnya menjadi seseorang yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Mom..you are my SUNSHINE and medical treatment for my soul...Om Hendro Wahyudiono,, terimakasih untuk semua bantuan dan bimbingannya...
- ❖ My dear dear Brother, Dangan...terimakasih buat ADVICE yang sangat berharga buat aku untuk terus maju melawan segala rintangan di depan...Dan semua support yang sudah membuatku tidak sendirian untuk menyelesaikan ini semua..Make Our Mom PROUD of you..We TRUST you..
- ❖ Semua mantanku who have give me SUPPORT and honest friendship (specially for Bhie and Mas B)...You have broke my heart and I still stand up here to prove that I never give up. Rasa sakit itu masih membekas, tapi berkat kalian aku mempunyai harapan baru dan semangat baru thx's...
- ❖ Temen2 Administrasi Publik Angkatan 2005 yang sudah memberiku banyak hal, tawa, canda, pelajaran berharga dan yang terpenting aku dapat menjadi diriku sendiri tanpa takut tidak diterima. Terimakasih buat temen2 Kebijakan Publik untuk hal baru yang kita perjuangkan sama2 (Kucil, Titut, Phinut, Rere Nul, Meyta dan semua yang tidak aku sebutin satu2..) Terima kasih buat temen2 "baru kukenal" karena perjuangan skripsi kita hingga sampai pada final step. From the deepest of my heart I hope the best for YOU all.





- ❖ Anak2 kos Watu Gong 42, terima kasih untuk BIG SUPPORT-nya yang udah bikin aku menjadi seorang Saras yang lebih baik dari kemaren...MY BIRTHDAY surprise, I never forget it...Dari mulai angkatan mbak2 ampe angkatan adek2, WISH you LUCK..Thanks for being good listener for my all story...
- ❖ 10 SISTER (Chuyex, Pungki, Kempot, Tyas, NENEK, Tingtong, Kinton, Kartiem, Gembul) my BEST friend I ever had...Friendship is like HEAVEN that we have in the world. It give me strength, LOVE, honest, SWEET tablet when my world feel bad..Thanks for everything..Hope we success..
- ❖ Dosen pembimbingku yang udah care and kasih masukan for my future...Prof. Dr. A. Andi Gani, MS dan Bapak Dr. Suryadi, MS.

I don't want to be forgotten
Not now or ever,
I want to live and be remembered
In your thoughts,
And in your words
a simple wish and burning desire...



Remember me in my gesture which made a person feel
important and needed,
Just remember ME!!!

- By caring,**
- By giving,**
- By thinking,**
- By loving,**
- By helping,**
- By bearing...**

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, Stan L, dkk. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* (Terjemahan). Ice-Hall,Inc.,Englewood Cliffts, New Jersey 07632.
- Arief. 2007. *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan : Bagaimana Mengelola Kualitas Pelayanan Agar Memuaskan Pelanggan*. Malang : Bayu Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1988. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Hamalik, DR. Oemar. 1990. *Pendidikan Tenaga Kerja Nasional*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2008. Bandung : Pt remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zauhar, Susilo. 2001. *Administrasi Publik*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. 1996. Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) National Council For Vocational Education.
- Pengembangan Hubungan SMK Dengan Dunia Kerja dalam Rangka Pendidikan Sistem Ganda*. 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. 2006. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

JURNAL

Jurnal Sosial. September 2006. SN: 1410-1254 35/th.VIII. Pendidikan Mengangkat Martabat Bangsa oleh berbagai sumber : 6-7.

Jurnal Jurist. Edisi Desember 2006. Membangkitkan Ruh Pendidikan melalui Instrumen Hukum oleh Pan Mohamad Faiz.

Vocational Education Journal 66, no. 1 (January 1991): 22-25. Buzzell, C.H. www.absoluteastronomy.com/topics/Vocational_education - 59k.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kepmen Dikbud nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Website

Anonymous. 2008. *Pendidikan Kejuruan*. <http://www.wikipedia.com> . Tanggal akses 11 Juni 2008

Ayu N.Andini.2008. *One Thousand of Indonesian Education Tales. Pendidikan Kejuruan*. <http://www.wordpress.com>. Tanggal akses 28 Mei 2008.